Mansour Fakih

ANALISIS GENDER & TRANSFORMASI SOSIAL

Dulpikar A 04/03/2017

ANALISIS GENDER DAN TRANSFORMASI SOSIAL

ANALISIS GENDER DAN TRANSFORMASI SOSIAL

DR. MANSOUR FAKIH

insist PRESS

Analisis Gender dan Transformasi Sosial
DR. Mansour Fakih

Copyright © Nena Fakih 2005
Hak Penerbitan © Insistpress 2008
Pertama kali diterbitkan oleh Pustaka Pelajar tahun 1996

Rancang Sampul: Edi Lingkar
Tata Letak: Tri Handoko

Diterbitkan oleh
INSISTPress
Jln. Ganesha II No. 9
Muja-Muju, Yogyakarta 55165
Telp./Faks. 0274-556433

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Analisis Gender dan Transformasi Sosial/Mansour Fakih/
Yogyakarta: INSISTPress
Edisi/Cetakan ke-13, September 2008
xxi + 192 halaman, 13 x19 cm, pustaka, Indeks
ISBN: 979-3457-93-7

1. Analisis Gender 2. Transformasi Sosial 3. Pembangunan
I. JUDUL

PENGANTAR PENERBIT

Sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 1996, buku ini mendapat sambutan luar biasa dari banyak kalangan, baik aktivis perempuan dan kalangan LSM, mahasiswa, cendikia, ulama maupun para perumus kebijakan ulama. Salah satu penyebab hangatnya sambutan yang muncul saat itu adalah minimnya bacaan tentang isu gender, apalagi yang ditulis oleh penulis dari Indonesia. Daya tarik utama dari buku ini sebenarnya terletak pada hubungan antara gerakan feminis dengan perlawanan terhadap penindasan dan ketidakadilan, serta keberpihakan penulis dalam melawan proses pembangunan yang mendehumanisasikan rakyat. Gerakan feminis dalam sudut pandang Mansour Fakih tidak menjadi ekslusif sebagai gerakan milik kaum perempuan saja.

Setelah lebih dari satu dasawarsa sejak penerbitan pertama buku ini, ternyata isu gender tetap mengemuka, bahkan mendapat lebih banyak tantangan. Sehingga wajar jika bacaan yang membahas persoalan-persoalan gender tetap dicari, dan permintaan terhadap buku ini masih terus mengalir. Lebih dari itu, penerbit

sendiri melihat bahwa pandangan-pandangan yang diungkapkan oleh Mansour Fakih dalam bukunya ini masih sangat relevan dengan kondisi sosial kita hingga sekarang. Oleh karena itu, setelah melalui pembicaraan khusus dengan ahli waris Mansour Fakih, kami memutuskan untuk menerbitkan kembali buku ini.

Kami menyampaikan terimakasih kepada Nena Fakih —isteri alm. Mansour Fakih— yang dengan tangan terbuka menerima buku ini "pulang ke rumahnya" di INSISTPress setelah lebih satu dasawarsa mengembara di tempat lain. Jika dihitung dari awal terbitnya, buku ini sudah dicetak ulang untuk kesembilan kalinya —sebuah kenyataan yang jarang terjadi terhadap buku—buku dari penulis Indonesia.

Walaupun tidak ada perubahan dalam isi, kami yakin kehadiran kembali buku ini akan menebus sedikit dahaga kawan-kawan pemerhati dan praktisi yang berjuang membela kaum perempuan dan proses dehumanisasi terhadap rakyat.

Selamat membaca.

Yogyakarta, Agustus 2008

PENGANTAR EDISI KEDUA

Sungguh di luar dugaan ternyata edisi pertama buku tentang analisis gender ini cukup mendapat sambutan yang luas terutama dari kalangan aktivis LSM dan gerakan perempuan serta mahasiswa di berbagai kota, khususnya Yogyakarta dan Jakarta. Sambutan yang hangat tersebut mendorong dan membangkitkan motivasi penulis untuk secara sungguh-sungguh memperbaiki buku tersebut setelah mencatat secara seksama berbagai kritik, umpan balik, dan saran dari banyak kalangan yang telah membaca dan mendiskusikannya. Dorongan inilah yang sesungguhnya membuat penulis dengan antusias duduk kembali untuk melakukan revisi terhadap buku edisi pertama tersebut.

Meskipun dari segi esensi buku *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* ini tidak berbeda dari edisi pertamanya dengan judul *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial,* namun edisi kedua ini lebih merupakan penyempurnaan terhadap edisi pertama. Revisi ini segera dilakukan mengingat besarnya antusiasme dan dorongan serta kritik dari pelbagai kalangan terhadap buku edisi pertama

tersebut. Revisi ini memang dilakukan tidak hanya dari segi tata bahasa saja, namun juga menyangkut pelbagai hal seperti kesalahan penulisan ejaan kata maupun nama orang, sistematika, penjernihan pengertian, dan pelbagai tambahan uraian yang diperlukan guna mempertajam penyajian.

Banyak rekan yang memiliki kesamaan kepedulian terhadap masalah gender terlibat secara sungguh-sungguh dalam menyumbangkan kritik dan saran penyempurnaan terhadap buku ini. Selain catatan yang disampaikan secara pribadi dari beberapa rekan, juga resensi di media massa dan berbagai diskusi telah diselenggarakan untuk membedah edisi pertama buku ini. Di antaranya adalah diskusi yang diselenggarakan oleh Lembaga Pers Mahasiswa, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta; diskusi buku yang diselenggarakan oleh mahasiswa jurusan Sosiologi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta; serta diskusi oleh aktivis-aktivis LSM dan feminis yang diselenggarakan oleh Sekretariat Bersama Perempuan Yogyakarta. Seluruh kritik dan saran dari semua rekan tersebut telah menjadi pertimbangan dan bahan masukan yang berharga bagi penulis untuk melakukan revisi terhadap buku ini.

Selain judul buku, yang menurut penyunting edisi kedua lebih sesuai diberi judul *Analisis Gender dan Transformasi Sosial,* beberapa hal dalam buku ini juga direvisi demi memberi kemudahan bagi para pembaca dalam memahami isi serta tercapainya tujuan dan makna penulisan buku ini. Pertama, banyak pembaca mengritik grafis sampul halaman depan dan kutipan komentar yang terdapat dalam sampul belakang buku edisi pertama. Oleh banyak pembaca, maupun banyak rekan aktivis perempuan, desain grafis sampul tersebut dianggap bertentangan dengan kandungan dan semangat yang diuraikan dalam buku ini. Sehingga, pada edisi kedua ini revisi grafis juga dilakukan. Kedua, beberapa kejanggalan dan kesalahan tata bahasa ternyata juga telah memengaruhi pengertian dan maksud dari kalimat ataupun uraian makna yang dikandungnya, oleh sebab itu usaha menyunting ulang bahasa juga telah dilakukan. Ketiga, perbaikan atas kesalahan pengejaan baik kata asing maupun nama orang juga secara maksimal telah diupayakan. Dan terakhir berkenaan dengan penyajian isi buku, juga telah diusahakan disusun lebih sistematis agar lebih mudah dipahami.

Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih atas kritik dan saran yang menjadi dasar revisi buku ini. Pertama kepada

penerbit Pustaka Pelajar dan saudara Toto Rahardjo yang dengan lapang hati menyarankan agar dilakukan penyuntingan ulang serta telah mendorong diterbitkannya edisi kedua buku ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Saudara M. Miftahudin yang dengan tekun dan sungguh-sungguh telah membaca ulang naskah buku ini dan dengan kerja keras telah memberikan umpan balik serta mengerjakan revisi dan penyuntingan edisi kedua ini.

Kedua, terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada beberapa rekan yang mempunyai kepedulian besar terhadap penyempurnaan buku ini dan secara langsung memberikan kritik dan saran. Terima kasih kepada saudara Dra. Cici Farkha MA dan Dr. Irwan Abdullah yang dengan jernih dan sungguh-sungguh telah menelaah buku dan mendiskusikannya. Juga terima kasih kepada beberapa rekan kalangan LSM Yogyakarta, di antaranya saudara Dra. Budi Sri Wahyuni, Sih Handayani, Dra. Ruhaini MA, Dr. Mohtar Mas'oed, dan banyak aktivis serta cendekiawan di Yogyakarta yang tidak bisa satu per satu ditulis di sini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada saudara Lies Marcoes yang telah membaca dengan tekun dan memberikan umpan balik yang berharga.

Dengan rendah hati penulis sampaikan

terima kasih kepada semua yang telah memberikan sumbangan yang sangat berharga tersebut. Semoga kritik dan umpan balik Anda sekalian selain mendapat ruang yang tercermin dalam perbaikan buku ini, juga ikut mendorong terciptanya proses transformasi sosial menuju suatu masyarakat yang adil.

Yogyakarta, 11 Maret 1996

PENGANTAR PENULIS

Memerangi ketidakadilan sosial sepanjang sejarah kemanusiaan, selalu menjadi tema menarik dan tetap akan menjadi tema penting dalam setiap pemikiran dan konsepsi tentang kemasyarakatan di masa mendatang. Sejarah manusia dalam memerangi ketidakadilan sosial telah melahirkan analisis dan teori sosial yang hingga saat ini masih berpengaruh dalam membentuk sistem kemasyarakatan umat manusia. Misalnya saja analisis dan teori kelas yang dicetuskan oleh Karl Marx dapat membantu analisis sosial saat ini untuk memahami bentuk ketidakadilan ekonomi dan kaitannya dengan sistem sosial yang lebih luas. Antonio Gramsci dan Louis Althusser membahas ideologi dan kultural serta menggugat keduanya karena dianggap sebagai alat dan bagian dari mereka yang diuntungkan untuk melanggengkan ketidakadilan. Para penganut dan pendukung teori kritis (*critical theory*) mazhab Frankfurt mempersoalkan metodologi dan epistemologi positivisme

sebagai salah satu sumber ketidakadilan. Kritik mereka menggugat apa yang dikhotbahkan sebagai pengetahuan "ilmiah" seperti objektivitas, netralitas, bebas nilai, dan sebagainya. Bahkan ilmu pengetahuan dan wacana yang selama ini dianggap netral, akhir-akhir ini oleh pemikiran pascamodern juga telah dipertanyakan. Karena, menurut pandangan mereka, ilmu pengetahuan bisa dan telah menjadi alat untuk melanggengkan ketidakadilan.

Dari pelbagai gugatan terhadap ketidakadilan tersebut, terdapat satu analisis yang mempertanyakan ketidakadilan sosial dari aspek hubungan antarjenis kelamin yang belum pernah disinggung oleh teori-teori di atas. Analisis yang dimaksud adalah analisis gender, suatu analisis yang menjadi alat bagi gerakan feminisme.

Buku ini mencoba menyajikan secara sederhana apa sebenarnya analisis gender. Analisis dan teori gender, sebagaimana layaknya teori sosial lainnya seperti analisis kelas, analisis kultural, dan analisis diskursus adalah alat analisis untuk memahami realitas sosial. Sebagai teori, tugas utama analisis gender adalah memberi makna, konsepsi, asumsi, ideologi, dan praktik hubungan baru antara kaum laki-laki dan perempuan serta implikasinya terhadap kehidupan sosial yang lebih luas (sosial,

ekonomi, politik, kultural), yang tidak dilihat oleh teori ataupun analisis sosial lainnya. Dengan kata lain analisis gender merupakan kacamata baru untuk menambah, melengkapi analisis sosial yang telah ada, dan bukan menggantikannya.

Namun dalam buku ini penulis tidak beambisi mengupas segala macam analisis sosial dari perspektif konsep gender. Penulis lebih berminat memaparkan pengertian kepada pembaca, yang bersifat pengantar, untuk memahami masalah-masalah emansipasi kaum perempuan dalam kaitannya dengan masalah ketidakadilan dan perubahan sosial dalam konteks yang lebih luas.

Sebagai pengantar, uraian dalam buku ini berusaha menghindari analisis yang terlalu teoritis serta mengusahakan implikasi pemahaman teoritis terhadap persoalan-persoalan yang lebih praktis.

Buku ini disusun atas dorongan beberapa teman yang sudah lama berkecimpung dan memperjuangkan masalah kaum perempuan dalam konteks perubahan sosial dan demokratisasi di Indonesia. Kepada teman-teman berikut ini yang dengan sungguh-sungguh mendorong penulis untuk segera menyusun buku ini, penulis ucapkan terima kasih. Pertama-tama kepada teman-teman di Oxfam Indonesia seperti Galuh Soedjatmoko,

Lily Purba, dan Don Marut yang memberikan bahan-bahan bacaan dan kasus-kasus program "*Gender and Development*" yang sedang didukungnya. Penulis sangat berhutang budi karena diperkenankan untuk berdiskusi, melihat program lapangan serta membaca laporan dari banyak ORNOP di Nusa Tenggara Timur maupun di Yogyakarta.

Dorongan untuk menyusun buku ini juga muncul setelah berdiskusi dengan teman-teman aktivis gerakan perempuan, seperti teman-teman di Sekretariat Bersama LSM Perempuan Yogyakarta. Secara lebih khusus penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman aktivis ORNOP lain yang telah menekuni masalah kaum perempuan, seperti Mira Dyarsi, Sita Kayam, Lies Marcoes di Kalyanamitra, Jakarta; serta Tati Krisnawaty dan Yanti Muchtar serta beberapa teman di Solidaritas Perempuan, mereka telah melibatkan penulis secara intensif dalam pergumulan dan pemikiran mengenai isu feminisme dan gender di Indonesia. Selain itu ada beberapa individu yang banyak memberi inspirasi baik melalui diskusi, dialog maupun pembacaan uraian mereka seperti Wardah Hafidz, Arief Budiman, dan Yulia Suryakusuma.

Penulis sangat berhutang budi kepada teman-teman di *Center For International Education,* Universitas Massachusetts di Amherst,

yakni Jane Benbow, Mary Jo Connelly, dan Joan Dixon yang menyelenggarakan kelas *Gender and Development.* Mereka banyak memberikan bahan baik teori maupun studi kasus tentang masalah gender dalam kaitannya dengan pembangunan. Selain itu, penulis juga sangat berhutang budi pada Eugenia Piza-Lopez (Oxford) di Unit Gender Oxfam Inggris dan Irlandia yang senantiasa membantu dengan membagikan bahan-bahan perkembangan pemikiran masalah gender.

Terima kasih kepada Toto Rahardjo di *Komunitas Pak Kanjeng* yang membantu memproses manuskrip menjadi bahan buku. Akhirnya ucapan terima kasih harus disampaikan kepada PUSTAKA PELAJAR dan banyak kawan yang tidak bisa disebut satu per satu dalam pengantar ini yang sangat mendorong dan membantu melancarkan penerbitan buku ini. Kepada semuanya sekali lagi penulis sampaikan ribuan terima kasih.

Amherst, Massachusetts 10 Oktober 1994

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT v

PENGANTAR EDISI KEDUA vii

PENGANTAR PENULIS xiii

DAFTAR ISI xix

BAGIAN PERTAMA 1

Analisis Gender dan Ketidakadilan 3

- Apakah Gender Itu? 7
- Perbedaan Gender Melahirkan Ketidakadilan 12

Diskursus Pembangunan dan Nasib Kaum Perempuan 26

- Sketsa teori-teori Pembangunan 30
- Arkeologi *Developmentalism*: Sebuah Pandangan Kritis 42
- WID dan *Developmentalism* 63

BAGIAN KEDUA **73**

Analisis Gender dalam Gerakan Transformasi Perempuan **75**

- Paradigma Fungsionalisme dalam Feminisme 84
- Paradigma Konflik dalam Feminisme 88

Hegemoni Maskulinitas dan Arah Gerakan Feminisme **103**

- Anatomi gerakan Kaum Perempuan 105
- Arah Gerakan Feminisme 111

BAGIAN KETIGA **121**

Tinjauan Struktural terhadap Buruh Perempuan **123**

- Posisi buruh dalam struktur *Developmentalism* 124
- Menuju Perubahan Posisi Buruh 130

Analisis Gender dan Tafsir Agama **133**

- Pandangan Agama yang Membebaskan dan Transformasi Sosial 134
- Pendekatan Tafsir Agama dengan Perspektif Gender 142
- Identifikasi Agenda Masalah Agama yang Strategis 143

Emansipasi Kaum Perempuan: Refleksi dan Agenda Mendesak **149**

- Manifestasi Gender pada Posisi Kaum Perempuan 153

- Ketidakadilan Gender Harus Dihentikan 160
- Agenda Mendesak 164
- Gerakan Feminisme di Indonesia: Tantangan dan Strategi Mendatang 167

Daftar Pustaka **175**
Indeks **186**
Tentang Penulis 191

BAGIAN PERTAMA

ANALISIS GENDER DAN KETIDAKADILAN

Hal penting yang perlu dipahami dalam rangka membahas masalah kaum perempuan adalah membedakan antara konsep seks (jenis kelamin) dan konsep gender. Pemahaman dan pembedaan antara konsep seks dan gender yang jelas sangatlah diperlukan dalam melakukan analisis untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan. Hal ini disebabkan oleh adanya kaitan yang erat antara perbedaan gender (*gender differences*) dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara lebih luas. Maka sesungguhnya terjadi keterkaitan antara persoalan gender dengan persoalan ketidakadilan sosial lainnya. Pemahaman atas konsep gender sangat diperlukan mengingat dari konsep ini telah lahir suatu analisis gender.

Analisis gender dalam sejarah pemikiran manusia tentang ketidakadilan sosial dianggap sebagai suatu analisis baru, dan mendapat sambutan akhir-akhir ini. Dibanding dengan

analisis sosial lainya, sesungguhnya analisis gender tidak kalah mendasar. Analisis gender justru ikut mempertajam analisis kritis yang sudah ada. Misalnya analisis kelas yang dikembangkan oleh Karl Marx ketika melakukan kritik terhadap sistem kapitalisme, akan lebih tajam jika pertanyaan tentang gender juga dikemukakan. Demikian halnya dengan analisis kritis lain seperti analisis hegemoni ideologi dan kultur yang dikembangkan oleh Antonio Gramsci, merupakan kritik terhadap analisis kelas yang dianggap sangat sempit. Dalam analisis apa pun, tanpa mempertanyakan gender terasa kurang mendalam. Dalam bidang epistemologi dan riset, misalnya analisis kritis (*critical theory*) dari penganut mazhab Frankfurt yang memusatkan perhatian pada perkembangan akhir masyarakat kapitalisme dan dominasi epistemologi positivisme, terasa kurang mendasar justru karena tidak ada pertanyaan tentang gender dalam kritiknya. Lahirnya epistemologi feminis dan riset feminis adalah penyempurnaan dari kritik mazhab Frankfurt dengan adanya pertanyaan gender. Demikian pula analisis diskursus[1] (*discourse*

[1] Istilah diskursus (*discourse*) bukanlah istilah yang netral, diskursus itu mengkonstruksi dan dikonstruksi melalui praktik sosial, lembaga-lembaga dan bahasa. Diskursus sebenarnya merupakan kerangka kerja yang membatasi cakupan obyek-obyek yang dapat diidentifikasi, mendefinisikan perspektif-perspektif di mana seseorang

analysis) yang berangkat dari pemikiran Foucault dan Althusser, yaitu merupakan kritik atas semangat reduksionisme dan antipluralisme dari keseluruhan analisis di bawah pengaruh zaman modernisme. Tanpa analisis gender, kritik mereka kurang mewakili semangat pluralisme yang diimpikan. Dengan demikian analisis gender merupakan analisis kritis yang mempertajam analisis kritis yang sudah ada.

Mengapa pengungkapan masalah kaum perempuan dengan menggunakan analisis gender sering menghadapi perlawanan (*resistance*), baik dari kaum laki-laki maupun perempuan sendiri? Tidak hanya itu, analisis gender justru sering ditolak oleh mereka yang melakukan kritik terhadap sistem sosial yang dominan seperti kapitalisme. Untuk menjawab persoalan ini, perlu diidentifikasi beberapa penyebab timbulnya perlawanan tersebut. Pertama, karena mempertanyakan status kaum perempuan pada dasarnya adalah mempersoalkan sistem dan struktur yang telah mapan. Bahkan, mempertanyakan posisi kaum

---

dapat secara sah menganggapnya sebagai pengetahuan (*knowledge*), dan meliputi jenis-jenis orang tertentu sebagai agen-agen pengetahuan. Menurut Foucault (1972), diskursus adalah kerangka kerja yang ditentukan oleh yang berkuasa yang ditetapkan melalui hubungan-hubungan kekuasaan yang mendasarinya. Pembahasan tentang teori-teori diskursus yang lebih lengkap dan tajam lihat Diane MacDonell (1986), *Theories of Discourse.* New York: Basil Blackwell.

perempuan pada dasarnya berarti menggoncang struktur dan sistem *status quo* ketidakadilan tertua dalam masyarakat. Kedua, banyak terjadi kesalahpahaman ketika masalah kaum perempuan dipertanyakan. Kesulitan lain, dengan mendiskusikan soal gender pada dasarnya berarti membahas hubungan kekuasaan yang sifatnya sangat pribadi, yakni menyangkut dan melibatkan individu kita masing-masing serta menggugat *privilege* yang kita miliki dan sedang kita nikmati selama ini. Oleh karena itu, pemahaman atas konsep gender sesungguhnya merupakan isu mendasar dalam rangka menjelaskan masalah hubungan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki, atau masalah hubungan kemanusiaan kita. Persoalan lain, kata gender merupakan kata dan konsep asing sehingga usaha menguraikan konsep gender dalam konteks Indonesia sangatlah rumit.

Uraian dalam bagian pertama buku ini berupaya membahas pengertian gender dan kaitannya dengan berbagai konsep tentang perubahan sosial. Perlu diungkapkan bahwa pemahaman atas pengertian gender dalam bab ini sangat penting bagi pembaca sebelum membahas bagian selanjutnya. Pengertian gender menjadi kata kunci bagi berbagai uraian dan analisis dalam bagian berikutnya. Dengan kata lain, ketidaksepakatan dan

ketidakpahaman atas apa yang dimaksud tentang gender akan mengakibatkan terjadinya kemungkinan kekeliruan dan kesulitan memahami uraian-uraian selanjutnya.

Apakah Gender Itu?

Sejak tahun 80an kata *gender* telah memasuki perbendaharaan dalam setiap diskusi dan tulisan sekitar perubahan sosial dan pembangunan di Dunia Ketiga. Demikian juga di Indonesia, hampir semua uraian tentang program pengembangan masyarakat maupun pembangunan di kalangan organisasi nonpemerintah membincangkan masalah gender. Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan gender itu? Dari pengamatan, masih terjadi ketidakjelasan dan kesalahpahaman tentang maksud dari konsep gender dan kaitannya dengan usaha emansipasi kaum perempuan. Setidaknya ada beberapa penyebab ketidakjelasan tersebut. Kata gender dalam bahasa Indonesia dipinjam dari bahasa Inggris. Kalau dilihat dalam kamus, tidak secara jelas dibedakan pengertian kata *sex* dan *gender*. Sementara itu, belum ada uraian yang mampu menjelaskan secara singkat dan jelas mengenai konsep gender dan mengapa konsep tersebut penting untuk memahami sistem ketidakadilan sosial. Dengan kata lain, timbulnya ketidakjelasan itu disebabkan oleh kurangnya penjelasan tentang kaitan antara konsep gender

dengan masalah ketidakadilan.

Untuk memahami konsep gender, kata *gender* harus dibedakan dengan kata *seks* (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan penyifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, bahwa manusia jenis laki-laki adalah manusia yang memiliki atau bersifat seperti daftar berikut ini: laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakala (*kala menjing*) dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis perempuan dan laki-laki selamanya. Artinya secara biologis alat-alat tersebut tidak bisa dipertukarkan antara alat biologis yang melekat pada manusia laki-laki dan perempuan. Secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau *kodrat*.

Sedangkan konsep lainnya adalah konsep gender, yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional,

jantan, perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional, perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya saja zaman dahulu di suatu suku tertentu perempuan lebih kuat dari laki-laki, tetapi pada zaman yang lain dan di tempat yang berbeda laki-laki yang lebih kuat. Juga, perubahan bisa terjadi dari kelas ke kelas masyarakat yang berbeda. Di suku tertentu, perempuan kelas bawah di pedesaan lebih kuat dibandingkan kaum laki-laki. Semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki, yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas yang lain, itulah yang dikenal dengan konsep gender.

Sejarah perbedaan gender (*gender differences*) antara manusia jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, di antaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural, melalui ajaran keagamaan maupun negara. Melalui proses panjang, sosialisasi gender

tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan, seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi, sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan.

Sebaliknya, melalui dialektika, konstruksi sosial gender yang tersosialisasikan secara evolusional dan perlahan-lahan memengaruhi biologis masing-masing jenis kelamin. Misalnya, karena konstruksi sosial gender, kaum laki-laki harus bersifat kuat dan agresif maka kaum laki-laki kemudian terlatih dan tersosialisasi serta termotivasi untuk menjadi atau menuju ke sifat gender yang ditentukan oleh suatu masyarakat, yakni secara fisik lebih kuat dan lebih besar. Sebaliknya, karena kaum perempuan harus lemah lembut, maka sejak bayi proses sosialisasi tersebut tidak saja berpengaruh kepada perkembangan emosi dan visi serta ideologi kaum perempuan, tetapi juga memengaruhi perkembangan fisik dan biologis selanjutnya. Karena proses sosialisasi dan rekonstruksi berlangsung secara mapan dan lama, akhirnya menjadi sulit dibedakan apakah sifat-sifat gender itu, seperti kaum perempuan lemah lembut dan kaum laki-laki kuat perkasa, dikonstruksi atau dibentuk oleh masyarakat atau kodrat biologis yang ditetapkan oleh Tuhan. Namun, dengan menggunakan pedoman bahwa setiap sifat biasanya melekat pada jenis kelamin

tertentu dan sepanjang sifat-sifat tersebut bisa dipertukarkan, maka sifat tersebut adalah hasil konstruksi masyarakat dan sama sekali bukanlah kodrat.

Dalam menjernihkan perbedaan antara seks dan gender ini, yang menjadi masalah adalah, terjadi kerancuan dan pemutarbalikan makna tentang apa yang disebut seks dan gender. Dewasa ini di masyarakat terjadi peneguhan pemahaman yang tidak pada tempatnya tentang pengertian yang sesungguhnya dari *gender*, karena konstruksi sosial justru dianggap sebagai *kodrat* dan diartikan sebagai ketentuan biologis atau ketentuan Tuhan. Padahal, sebagian besar dari sesuatu yang dewasa ini sering dianggap atau dinamakan sebagai "kodrat wanita" sebenarnya adalah konstruksi sosial dan kultur, atau *gender*. Misalnya saja sering diungkapkan bahwa mendidik anak, mengelola dan merawat kebersihan, dan keindahan rumah tangga, atau urusan domestik sering dianggap sebagai "kodrat wanita". Padahal kenyataannya, bahwa kaum perempuan memiliki peran gender dalam mendidik anak, merawat, dan mengelola kebersihan dan keindahan rumah tangga adalah konstruksi kultural dalam suatu masyarakat tertentu. Oleh karena itu, boleh jadi urusan mendidik anak dan merawat kebersihan rumah tangga bisa dilakukan oleh kaum laki-laki. Oleh karena jenis pekerjaan itu bisa dipertukarkan

dan tidak bersifat universal, apa yang sering disebut sebagai "kodrat wanita" atau "takdir Tuhan atas wanita" dalam kasus mendidik anak dan mengatur kebersihan rumah tangga, sesungguhnya adalah *gender.*

Setelah jelas perbedaan antara konsep jenis kelamin (*sex*) dan gender, dapat diajukan pertanyaan mengapa perbedaan jenis kelamin harus melahirkan perbedaan gender? Apa permasalahan yang ditimbulkan oleh perbedaan gender tersebut? Dengan kata lain, kalau perbedaan jenis kelamin perempuan dan laki-laki dapat dibedakan dari perbedaan gender: bahwa kaum perempuan itu tidak rasional, emosional, lemah lembut dan bahwa laki-laki memiliki sifat rasional, kuat, atau perkasa, lantas di mana letak masalahnya? Uraian selanjutnya berusaha membahas persoalan yang ditimbulkan karena adanya perbedaan gender tersebut.

Perbedaan Gender Melahirkan Ketidakadilan

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Namun, yang menjadi persoalan, ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan

struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Untuk memahami bagaimana perbedaan gender menyebabkan ketidakadilan gender, dapat dilihat melalui berbagai manifestasi ketidakadilan yang ada. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yakni: marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender. Manifestasi ketidakadilan gender tidak bisa dipisah-pisahkan, karena saling berkaitan dan berhubungan, saling memengaruhi secara dialektis. Tidak ada satu pun manifestasi ketidakadilan gender yang lebih penting, lebih esensial, dari yang lain. Misalnya, marginalisasi ekonomi kaum perempuan justru terjadi karena stereotipe tertentu atas kaum perempuan dan hal itu menyumbang kepada subordinasi, kekerasan kepada kaum perempuan, yang akhirnya tersosialisasikan dalam keyakinan, ideologi, dan visi kaum perempuan sendiri. Dengan demikian, kita tidak bisa menyatakan bahwa marginalisasi kaum perempuan adalah yang paling menentukan dan terpenting dari yang lain dan oleh karena itu perlu mendapat

perhatian lebih. Atau sebaliknya, bahwa kekerasan fisik (*violence*) adalah masalah paling mendasar yang harus dipecahkan terlebih dahulu.

Uraian berikut membahas secara lebih rinci masing-masing manifestasi ketidakadilan gender.

- ***Gender dan Marginalisasi Perempuan***

Proses marginalisasi, yang mengakibatkan kemiskinan, sesungguhnya banyak sekali terjadi dalam masyarakat dan negara yang menimpa kaum laki-laki dan perempuan, yang disebabkan oleh berbagai kejadian, misalnya penggusuran, bencana alam, atau proses eksploitasi. Namun ada salah satu bentuk pemiskinan atas satu jenis kelamin tertentu, dalam hal ini perempuan, yang disebabkan oleh gender. Ada beberapa perbedaan jenis dan bentuk, tempat dan waktu serta mekanisme proses marginalisasi kaum perempuan karena perbedaan gender tersebut. Dari segi sumbernya bisa berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsiran agama, keyakinan tradisi, kebiasaan, atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan.

Banyak studi telah dilakukan dalam rangka membahas program pembangunan pemerintah yang menjadi penyebab kemiskinan kaum perempuan. Misalnya,

program swasembada pangan atau revolusi hijau (*green revolution*) secara ekonomis telah menyingkirkan kaum perempuan dari pekerjaannya sehingga memiskinkan mereka. Di Jawa misalnya, program revolusi hijau dengan memperkenalkan jenis padi unggul yang tumbuh lebih rendah, dan pendekatan panen dengan sistem tebang menggunakan sabit, tidak memungkinkan lagi *panenan* dengan *ani-ani*, padahal alat tersebut melekat dan digunakan oleh kaum perempuan. Akibatnya banyak kaum perempuan miskin di desa termarginalisasi, yakni semakin miskin dan tersingkir karena tidak mendapatkan pekerjaan di sawah pada musim panen. Berarti program revolusi hijau dirancang tanpa mempertimbangkan aspek gender.

Marginalisasi kaum perempuan tidak saja terjadi di tempat pekerjaan, namun juga terjadi dalam rumah tangga, masyarakat, atau kultur, dan bahkan negara. Marginalisasi terhadap perempuan sudah terjadi sejak di rumah tangga dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan. Marginalisasi juga diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan. Misalnya banyak di antara suku-suku di Indonesia yang tidak memberi hak kepada kaum perempuan untuk

mendapatkan waris sama sekali. Sebagian tafsir keagamaan memberi hak waris perempuan setengah dari hak waris laki-laki.

- ***Gender dan Subordinasi***

Pandangan gender ternyata bisa menimbulkan subordinasi terhadap perempuan. Anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting.

Subordinasi karena gender tersebut terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu. Di Jawa, dulu ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, toh akhirnya akan ke dapur juga. Bahkan, pemerintah pernah memiliki peraturan bahwa jika suami akan pergi belajar (jauh dari keluarga) dia bisa mengambil keputusan sendiri. Sedangkan bagi istri yang hendak tugas belajar ke luar negeri harus seizin suami. Dalam rumah tangga masih sering terdengar jika keuangan keluarga sangat terbatas, dan harus mengambil keputusan untuk menyekolahkan anak-anaknya maka anak laki-laki akan mendapatkan prioritas utama. Praktik seperti itu sesungguhnya

berangkat dari kesadaran gender yang tidak adil.

- ***Gender dan Stereotipe***

Secara umum stereotipe adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Celakanya stereotipe selalu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Stereotipe yang diberikan kepada suku bangsa tertentu, misalnya Yahudi di Barat atau Cina di Asia Tenggara, telah merugikan suku bangsa tersebut. Salah satu jenis stereotipe itu adalah yang bersumber dari pandangan gender. Banyak sekali ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan, yang bersumber dari penandaan yang dilekatkan kepada mereka. Misalnya, penandaan yang berawal dari asumsi bahwa perempuan bersolek merupakan upaya memancing perhatian lawan jenisnya, maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan stereotipe ini. Bahkan jika ada pemerkosaan yang dialami oleh perempuan, masyarakat berkecenderungan menyalahkan korbannya. Masyarakat memiliki anggapan bahwa tugas utama kaum perempuan adalah melayani suami. Stereotipe ini berakibat wajar sekali jika pendidikan kaum perempuan dinomorduakan. Stereotipe terhadap kaum

perempuan ini terjadi di mana-mana. Banyak peraturan pemerintah, aturan keagamaan, kultur, dan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan karena stereotipe tersebut.

- ***Gender dan Kekerasan***

Kekerasan (*violence*) adalah serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu disebabkan oleh anggapan gender. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender ini disebut *gender-related violence*. Pada dasarnya, kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Banyak macam dan bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan gender, di antaranya:

Pertama, bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk perkosaan dalam perkawinan. Perkosaan terjadi jika seseorang melakukan paksaan untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan yang bersangkutan. Ketidakrelaan ini seringkali tidak bisa terekspresikan disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya ketakutan, malu, keterpaksaan baik ekonomi, sosial maupun

kultur, tidak ada pilihan lain.

Kedua, tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga (*domestic violence*). Termasuk tindak kekerasan dalam bentuk penyiksaan terhadap anak-anak (*child abuse*).

Ketiga, bentuk penyiksaan yang mengarah kepada organ alat kelamin (*genital mutilation*), misalnya penyunatan terhadap anak perempuan. Berbagai alasan diajukan oleh suatu masyarakat untuk melakukan penyunatan ini. Namun salah satu alasan terkuat adalah, adanya anggapan dan bias gender di masyarakat, yakni untuk mengontrol kaum perempuan. Saat ini, penyunatan perempuan sudah mulai jarang kita dengar.

Keempat, kekerasan dalam bentuk pelacuran (*prostitution*). Pelacuran merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh suatu mekanisme ekonomi yang merugikan kaum perempuan. Setiap masyarakat dan negara selalu menggunakan standar ganda terhadap pekerja seksual ini. Di satu sisi pemerintah melarang dan menangkapi mereka, tetapi di lain pihak negara juga menarik pajak dari mereka. Sementara seorang pelacur dianggap rendah oleh masyarakat, namun

tempat pusat kegiatan mereka selalu saja ramai dikunjungi orang.

Kelima, kekerasan dalam bentuk pornografi. Pornografi adalah jenis kekerasan lain terhadap perempuan. Jenis kekerasan ini termasuk kekerasan nonfisik, yakni pelecehan terhadap kaum perempuan di mana tubuh perempuan dijadikan objek demi keuntungan seseorang.

Keenam, kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilisasi (*enforced sterilization*) dalam Keluarga Berencana. Keluarga Berencana di banyak tempat ternyata telah menjadi sumber kekerasan terhadap perempuan. Dalam rangka memenuhi target mengontrol pertumbuhan penduduk, perempuan seringkali dijadikan korban demi program tersebut, meskipun semua orang tahu bahwa persoalannya tidak saja pada perempuan melainkan berasal dari kaum laki-laki juga. Namun, lantaran bias gender, perempuan dipaksa melakukan sterilisasi yang sering kali membahayakan baik fisik ataupun jiwa mereka.

Ketujuh, adalah jenis kekerasan terselubung (*molestation*), yakni memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan berbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh.

Jenis kekerasan ini sering terjadi di tempat pekerjaan ataupun di tempat umum, seperti dalam bis.

Kedelapan, tindakan kejahatan terhadap perempuan yang paling umum dilakukan di masyarakat yakni yang dikenal dengan pelecehan seksual atau *sexual and emotional harassment*. Ada banyak bentuk pelecehan, dan yang umum terjadi adalah *unwanted attention from men*. Banyak orang membela bahwa pelecehan seksual itu sangat relatif karena seringkali tindakan tersebut merupakan usaha untuk bersahabat. Tetapi sesungguhnya pelecehan seksual bukanlah usaha untuk bersahabat, karena tindakan tersebut merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi perempuan.

Ada beberapa bentuk yang bisa dikategorikan pelecehan seksual. Di antaranya:

1. Menyampaikan lelucon jorok secara vulgar kepada seseorang dengan cara yang dirasakan sangat ofensif.
2. Menyakiti atau membuat malu seseorang dengan omongan kotor.
3. Menginterogasi seseorang tentang kehidupan atau kegiatan seksualnya atau kehidupan pribadinya.

4. Meminta imbalan seksual dalam rangka janji untuk mendapatkan kerja atau untuk mendapatkan promosi atau janji-janji lainnya.
5. Menyentuh atau menyenggol bagian tubuh tanpa ada minat atau tanpa seizin dari yang bersangkutan.

- ***Gender dan Beban Kerja***

Adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, mengakibatkan semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Konsekuensinya, banyak kaum perempuan yang harus bekerja keras dalam waktu lama untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumah tangganya, mulai dari membersihkan dan mengepel lantai, memasak, mencuci, mencari air untuk mandi, hingga memelihara anak. Di kalangan keluarga miskin, beban yang sangat berat ini harus ditanggung oleh perempuan sendiri. Terlebih jika si perempuan tersebut harus bekerja, maka ia memikul beban kerja ganda.

Bias gender yang mengakibatkan beban kerja tersebut seringkali diperkuat dan disebabkan oleh adanya pandangan atau keyakinan di masyarakat bahwa jenis "pekerjaan

perempuan", seperti semua pekerjaan domestik, dianggap dan dinilai lebih rendah dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang dianggap sebagai "pekerjaan lelaki", serta dikategorikan sebagai "tidak produktif" sehingga tidak diperhitungkan dalam statistik ekonomi negara. Sementara itu kaum perempuan, karena anggapan gender ini, sejak dini telah disosialisasikan untuk menekuni peran gender mereka. Di lain pihak kaum lelaki tidak diwajibkan secara kultural untuk menekuni berbagai jenis pekerjaan domestik itu. Kesemuanya ini telah memperkuat pelanggengan secara kultural dan struktural beban kerja kaum perempuan.

Bagi kelas menengah dan golongan kaya, beban kerja itu kemudian dilimpahkan kepada pembantu rumah tangga (*domestic workers*). Sesungguhnya, mereka ini telah menjadi korban dari bias gender di masyarakat. Mereka bekerja lebih lama dan berat, tanpa perlindungan dan kejelasan kebijakan negara. Selain belum adanya kemauan politik untuk melindungi mereka, hubungan feodalistik dan bahkan bersifat perbudakan tersebut memang belum bisa secara transparan dilihat oleh masyarakat luas.

Manifestasi ketidakadilan gender dalam bentuk marginalisasi ekonomi, subordinasi, kekerasan, stereotipe, dan beban kerja tersebut terjadi di berbagai tingkatan. Pertama, manifestasi ketidakadilan gender tersebut terjadi di tingkat negara, baik dalam suatu negara maupun dalam organisasi antarnegara seperti PBB. Banyak kebijakan dan hukum negara, perundang-undangan serta program kegiatan yang masih mencerminkan sebagian dari manifestasi ketidakadilan gender. Demikian juga, banyak kebijakan PBB dan pendekatan pembangunan yang dilakukan oleh PBB dianggap mencerminkan manifestasi ketidakadilan gender. Kedua, manifestasi tersebut juga terjadi di tempat kerja, organisasi maupun dunia pendidikan. Banyak aturan kerja, manajemen, kebijakan keorganisasian, serta kurikulum pendidikan yang masih melanggengkan ketidakadilan gender tersebut. Ketiga, manifestasi ketidakadilan gender juga terjadi dalam adat istiadat masyarakat di banyak kelompok etnis, dalam kultur suku-suku atau dalam tafsiran keagamaan. Bagaimanapun mekanisme interaksi dan pengambilan keputusan di masyarakat masih banyak mencerminkan ketidakadilan gender tersebut. Keempat, manifestasi ketidakadilan gender itu juga terjadi di lingkungan rumah tangga. Proses pengambilan keputusan, pembagian kerja dan

interaksi antar-anggota keluarga dalam banyak rumah tangga sehari-hari dilaksanakan dengan menggunakan asumsi bias gender. Oleh karenanya rumah tangga juga menjadi tempat kritis dalam menyosialiasikan ketidakadilan gender. Hal terakhir dan yang paling sulit diubah adalah, ketidakadilan gender tersebut telah mengakar ke dalam keyakinan dan menjadi ideologi kaum perempuan maupun laki-laki. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa manifestasi ketidakadilan gender ini telah mengakar mulai dalam keyakinan di masing-masing orang, keluarga, hingga tingkat negara yang bersifat global. ❖

DISKURSUS PEMBANGUNAN DAN NASIB KAUM PEREMPUAN

Dalam bagian ini pembahasan difokuskan pada analisis kritis tentang pengaruh ketidakadilan gender dan ketidakpekaan dalam masalah gender terhadap ideologi besar seperti teori-teori ilmu sosial tentang pembangunan. Uraian berikut ini memusatkan perhatian secara kritis terhadap diskursus pembangunan yang sejak mula dikembangkan tanpa mempertimbangkan masalah gender dan telah menimbulkan akibat dan hasil yang berbeda antara kaum laki-laki dan perempuan. Seperti akan ditunjukkan dalam uraian berikut bahwa hampir semua teori ilmu sosial tentang pembangunan yang sangat berpengaruh terhadap nasib berjuta-juta umat manusia telah dikembangkan tanpa mempertimbangkan masalah gender. Akibatnya, pembangunan yang semboyannya untuk menyejahterakan dan menjawab tantangan kemiskinan dan keterbelakangan bangsa-bangsa Dunia Ketiga tersebut justru

telah mengakibatkan keterbelakangan kaum perempuan. *Women in Development* (WID) yang dicitakan sebagai jawaban atas kritik terhadap pembangunan (*developmentalism*) juga dianggap telah gagal menjalankan tugasnya, karena program ini hanya mampu menjawab persoalan dan kebutuhan praktis jangka pendek kaum perempuan. Tanpa analisis gender, diskursus pembangunan telah gagal menjawab kebutuhan strategis kaum perempuan, yakni suatu proses jangka panjang untuk mentransformasikan baik keyakinan dan ideologi ketidakadilan gender maupun struktur kekuasaan yang tidak adil yang dibangun berlandaskan keyakinan dan ideologi gender.

Dalam dua dasawarsa terakhir kita menyaksikan fenomena luar biasa, bagaimana sebuah gagasan mendominasi dan memengaruhi pemikiran secara global, khususnya di Dunia Ketiga. Gagasan itu disebut *development* yang nyaris menjadi "agama baru". Istilah *development* tersebar dan dipergunakan sebagai visi, teori, dan proses yang diyakini rakyat di hampir semua negara khususnya di Dunia Ketiga. *Development* merasuk secara misterius dan dimiliki oleh hampir setiap orang karena diterjemahkan ke dalam bahasa lokal, melalui pilihan kata yang sesuai, di masing-masing negara. Bahkan di negara yang belum memiliki bahasa nasional seperti Filipina

misalnya, kata yang dipilih untuk melokalkan *development* menggunakan tiga bahasa daerah utama, yakni *Pag-Unlad* untuk bahasa Tagalog, dalam bahasa Ilongo adalah *Pag-Uswag,* sedangkan untuk bahasa Ilocano menjadi *Progreso.* Di Indonesia, kata *development* diterjemahkan menjadi *pembangunan.*

Di Indonesia kata 'pembangunan' menjadi diskursus yang dominan dan erat kaitannya dengan lahirnya Orde Baru. Kata 'pembangunan' selain menjadi semboyan juga diabadikan sebagai nama pemerintahan Orde Baru. Hal itu bisa dilihat dari penamaan kabinet pemerintahan Orde Baru yang selalu dikaitkan dengan kata 'pembangunan' meskipun kata 'pembangunan' sesungguhnya telah dikenal dan dipergunakan sejak zaman Orde Lama.

Perbedaan esensi dari kata pembangunan zaman Orde Lama dengan kata pembangunan dalam konteks Orde Baru terkait erat dengan diskursus pembangunan (*discourse of development*) yang dikembangkan oleh negara-negara Barat. Uraian berikut mencoba melihat diskursus pembangunan secara kritis. Karenanya, perhatian uraian ini tidak melakukan tinjauan dari segi bahasa, tetapi mencoba melakukan kajian atas politik-ekonomi dalam permulaan diskursus pembangunan, dan bagaimana proses pembangunan disebar kepada dan diserap oleh negara-negara Dunia Ketiga, serta kaitannya

dengan diskursus pembangunan di Indonesia sejak Pemerintahan Orde Baru.

Jika kita melihat pengertian konsep dasar *pembangunan*, sesungguhnya tidak ada konsep dalam ilmu sosial yang serumit dan sesamar kata tersebut. Istilah pembangunan dipakai dalam bermacam-macam konteks, dan seringkali dipergunakan dalam konotasi politik dan ideologi tertentu. Ada banyak kata yang memiliki makna sama dengan kata pembangunan, seperti misalnya perubahan sosial, pertumbuhan, kemajuan dan modernisasi. Dari kata tersebut hanya ada satu istilah yang memberi makna perubahan ke arah positif, yaitu perubahan sosial. Kata pembangunan sangat tergantung pada konteks siapa yang menggunakan dan untuk kepentingan apa. Maka, uraian mengenai pengertian pembangunan ini akan lebih jelas jika dilihat dari konteks *grand theory* yang menjadi landasan berbagai teori mengenai perubahan sosial.

Untuk memulainya, dalam uraian berikut akan dipaparkan mengenai beragam sketsa dan perkembangan berbagai teori ilmu sosial yang berpengaruh terhadap teori-teori pembangunan. Selanjutnya uraian secara kritis difokuskan kepada diskursus pembangunan (*discourse of development*) dan ketidakmampuan *developmentalism* mengubah posisi ideologis

kaum perempuan di masyarakat, dan kemudian dilanjutkan dengan penguraian tentang program *Women in Development* (WID) yang lebih ditujukan kepada kaum perempuan, dan bukan kepada analisis hubungan ketidakadilan gender.

Sketsa Teori-teori Pembangunan

Cara untuk menyampaikan berbagai teori tanpa mengadili terlebih dahulu merupakan persoalan bagi setiap orang yang mencoba mendeskripsikan tentang aneka ragam teori, dalam hal ini adalah *pembangunan.* Kesulitannya terletak pada bias masing-masing penulis dan pembaca dalam memandang dan memperlakukan teori tersebut. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan berikut ini adalah dengan cara mengambil bentuk kronologi perkembangan *grand theory,* terutama pada sejarah pemikiran pembangunan abad modern hingga saat ini. Meski demikian, secara jujur penulis merasa sulit menghindari subjektivitas sejak pengumpulan bahan bacaan dan analisis untuk menyusun kronologi ini.

- ***Teori Evolusi***

  Zaman pencerahan (*enlightenment*) memberi dampak besar terhadap pemikiran tentang perubahan sosial. Dampak yang paling menonjol adalah munculnya apa yang dikenal sebagai *teori evolusi* atau *organik.* Teori tersebut didasarkan pada 6 asumsi

tentang perubahan, yaitu bahwa perubahan dilihat sebagai:

1. natural
2. direksional
3. imanen
4. kontinyu
5. suatu keharusan
6. berjalan melalui sebab universal yang sama

Meskipun awal perkembangan teori evolusi berpangkal pada pemikiran Friedrich Hegel, namun filosof Prancis Auguste Comte lah yang membawa teori evolusi menjadi pengetahuan ilmu sosial positivistik. Tidak seperti Hegel, Comte tidak meletakkan Tuhan dalam pusat teori evolusinya. Comte menggambarkan bahwa perubahan selalu dimulai dari fase *teologis* di mana masyarakat dikuasai oleh "Pendeta" dan diperintah oleh Militer. Fase kedua adalah fase *metafisis* di mana dosa berdasar pada pemikiran filosofis manusia, sedangkan tingkat ketiga adalah *ilmiah* atau *positif* yaitu dengan memahami hukum alam dan eksperimentasi ilmiah.

Teori evolusi sangat memengaruhi hampir semua teori tentang perubahan sosial dan teori pembangunan setelahnya. Bagi Comte, intervensi manusia sangat menentukan perkembangan fase-fase evolusi tersebut. Pengetahuan ilmiah dapat direncanakan

yang oleh pengikutnya sering disebut sebagai rekayasa sosial (*social engineering*), yang oleh Herbert Spencer disebut sebagai *Darwinis sosial*. Aplikasi teori ini berpengaruh kepada pemikiran modern tentang pembangunan, yaitu bahwa masyarakat bergerak dari masyarakat miskin nonindustri, primitif, akan berevolusi ke masyarakat industri yang lebih kompleks dan berbudaya. Menurut teori ini yang menjadi sumber persoalan adalah tradisi.

- ***Teori Fungsionalisme Struktural***

Teori ini muncul tahun 30an sebagai kritik terhadap teori evolusi, dan sering disebut sebagai *fungsionalisme*. Teori ini dikembangkan oleh Robert Merton dan Talcott Parsons. Meski tidak secara langsung menyinggung pembangunan, namun teori ini terkait dengan beberapa teori pembangunan seperti *teori sumber daya manusia* dan *modernisasi*. Teori ini sesungguhnya sangat sederhana, yakni pandangan tentang masyarakat sebagai sistem yang terdiri atas bagian yang saling berkaitan (agama, pendidikan, struktur politik sampai rumah tangga). Masing-masing bagian secara terus-menerus mencari keseimbangan (*equilibrium*) dan harmoni. Adapun interelasi terjadi karena adanya konsensus. Pola yang non-normatif dianggap

akan melahirkan gejolak. Jika hal tersebut terjadi maka masing-masing bagian akan cepat menyesuaikan diri untuk mencapai keseimbangan kembali. Para penganut teori ini menganggap masyarakat akan berubah namun tidak ditetapkan berapa lama evolusinya. Konflik di masyarakat dilihat tidak fungsional, karenanya harus dihindarkan. Maka, berdasarkan teori ini status quo harus dipertahankan.

- ***Teori Modernisasi***

Teori modernisasi lahir tahun 1950an dan merupakan tanggapan kaum intelektual terhadap Perang Dunia. Bagi para penganut teori evolusi, modernisasi dianggap sebagai jalan optimis menuju perubahan. Menurut Huntington (1976) proses modernisasi bersifat revolusioner (perubahan cepat dari tradisi ke modern), kompleks (melalui banyak cara), sistematik, global (akan memengaruhi semua manusia), bertahap (melalui langkah-langkah), hegemonisasi (*convergency*) dan progresif. Teori ini dipakai oleh kalangan interdisiplin, seperti sosiologi, psikologi, ilmu politik, ekonomi, antropologi dan bahkan agama. Pemikiran modernisasi dapat dijumpai dalam buku McClelland, *The Achieving Society* (1961). Berdasarkan tafsiran McClelland atas Max Weber, jika Etika Protestan menjadi pendorong pertumbuhan

di Barat, analog yang sama juga bisa untuk melihat pertumbuhan ekonomi. Apa rahasia pemikiran Weber tentang Etika Protestan? Menurutnya adalah kebutuhan untuk berprestasi (*the need for achievement* –N Ach). Dan menurut McClelland, penjelasan mengenai keterbelakangan rakyat Dunia Ketiga adalah karena rendahnya kebutuhan berprestasi itu.

Alex Inkeles, berdasarkan pokok kajian yang sama, mengembangkan sejumlah pertanyaan mengenai sikap yang disebut skala modernitas, suatu alat untuk menentukan tingkat modernitas suatu masyarakat. Sebagaimana fungsionalisme, skala modernitas ini menganggap sosialisasi dalam keluarga, sekolahan dan publik memegang peran penting dalam perubahan sikap. Oleh karena nilai tradisionalisme memiliki dampak penting terhadap proses perubahan sikap, maka tradisionalisme yang disangka menjadi penghambat modernitas harus diarahkan ke sikap modern dalam masing-masing individu, karena peran individulah yang akan membawa pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya, gambaran masyarakat modern yang dicita-citakan adalah masyarakat Kapitalisme Barat tahun 1950an yang dianggap telah mencapai *high mass consumption*.

- ***Teori Sumber Daya Manusia***

Sementara teori modernisasi didominasi kaum sosiolog dan psikolog, para ekonom merumuskan teori pembangunan dengan berlandaskan pada teori fungsionalisme struktural yang disebut teori sumber daya manusia (*human capital theory*). Jika teori modernisasi memusatkan perhatian pada sikap dan nilai-nilai individu, maka para ekonom ini lebih menekankan pada kemampuan produktif sumber daya manusia (SDM) sebagai modal investasi bagi proses pembangunan. Teori sumber daya manusia ini dikembangkan oleh Theodore Schultz (1961) dengan tema yang dikenal sebagai *investasi dalam sumber daya manusia*. Bagi penganut teori ini, keterbelakangan masyarakat (dianggap) bersumber dari faktor-faktor intern negara atau masyarakat itu sendiri. Teori ini mengandalkan *economic return of investment* dalam bidang pendidikan. Bagi pengambil keputusan, upaya meningkatkan investasi pada sumber daya manusia merupakan hasil dari pesatnya pertumbuhan ekonomi. Sedangkan bagi masing-masing individu, investasi tersebut dipandangnya sebagai imbalan atas prestasi mereka.

- *Teori Konflik*

Jika sebagian besar teori di atas (*evolusi* dan *fungsionalisme struktural*) menjelaskan bahwa perubahan diyakini terjadi secara perlahan dan damai dengan mengabaikan konflik sebagai dimensi perubahan sosial, maka teori ini justru lebih mendasarkan atas konflik. Contoh konflik adalah revolusi, eksploitasi, kolonialisme, ketergantungan, konflik kelas dan rasial. Bahkan bagi Nisbet (1969) prinsip konflik sesungguhnya implisit, dua sisi mata uang dalam semua teori perubahan dan pembangunan. Meskipun gagasan konflik sudah lama ada dalam pemikiran manusia, namun Hegel adalah pemikir pertama yang memberi tekanan perhatian pada konflik sebagai inti dari teori perubahan. Bagi Hegel, perubahan adalah *dialectics*, yakni hasil dari proses *tesis*, *antitesis*, dan *sintesis*. Konsepsi ini memengaruhi dasar teori Karl Marx yang kemudian berpengaruh kepada banyak teori perubahan dan *developmentalism* saat ini.

Menurut Marx, masyarakat terpolarisasi dalam dua kelas yang selalu bertentangan, yaitu kelas yang mengeksploitasi dan kelas yang dieksploitasi. Marx melihat masyarakat berkembang dari masyarakat komunis primitif kemudian perbudakan, feodal, kapitalis, sosialis dan akhirnya menuju

komunisme. Perubahan tersebut melalui suatu konflik. Bagi Marx, konflik terjadi antara kelas borjuis dan proletar. Dalam sistem kapitalis, proses eksploitasi (*appropriation of surplus value*) dari kelas proletar (buruh yang menghasilkan produk) oleh borjuis (majikan yang tidak bekerja tetapi menguasai alat produksi) diselenggarakan oleh kelas menengah. Hasil dari eksploitasi itu selanjutnya didistribusikan ke berbagai pihak dalam bentuk pajak, bunga bank, sewa tanah, riset pengembangan dan lain-lain. Sebagai imbalannya, lembaga-lembaga tersebut (*superstructure*) mendukung kelas borjuis dengan memberikan legitimasi terhadap eksploitasi dalam bentuk norma, penekanan maupun penindasan. Jika kesadaran buruh meningkat dan konflik kelas tidak dapat dikendalikan, maka perubahan pun terjadi (Smelser,1973). Dalam proses perubahan itu masyarakat akan melalui masa sosialisme (setelah kapitalisme runtuh) di mana pada tingkat ini dibutuhkan pemerintahan terpusat oleh kaum proletar, agar tidak kembali ke kapitalisme. Dalam tahap ini program utama yang harus dilakukan adalah pendidikan massa dan membangkitkan kesadaran ideologis, yakni kesadaran akan situasi eksploitasi (Melotti, 1977).

Banyak kritik terhadap tafsiran marxisme ortodoks yang mekanistik. Salah satunya datang dari Gramsci (1972), yang menolak *determinisme ekonomi* dengan memberi perhatian pada *hegemoni* dalam melanggengkan struktur kelas dan ideologi masyarakat. Secara tidak langsung para penganut teori kritis dari mazhab Frankfurt juga mengritik pemikiran mekanistik yang sangat positivistik tersebut. Louis Althusser secara lebih cemerlang melakukan pembelaan terhadap Marx, yang dituangkan dalam bukunya, *For Marx*. Sungguh pun demikian, pada kenyataannya banyak teori pembangunan yang dipengaruhi oleh pemikiran Marx, salah satu di antaranya adalah teori ketergantungan.

- ***Teori Ketergantungan***

Pendekatan teori ini berlawanan dengan teori evolusi dan modernisasi. Teori ketergantungan (*dependency theory*) menekankan hubungan-hubungan dalam masyarakat, misalnya masalah struktur sosial, kultur, ekonomi dan politik. Asumsi dasar teori ini adalah, bahwa keterbelakangan dan pembangunan merupakan konsep yang saling berkaitan. Keterbelakangan masyarakat dianggap sebagai proses yang berhubungan dengan perkembangan masyarakat di luarnya. Kata

ketergantungan dipakai untuk memberi tekanan bahwa hubungan kemajuan di masyarakat *center* misalnya merupakan keterbelakangan di daerah pinggiran (*peripheral*) yang diakibatkan oleh proses sejarah yang disengaja. Kerangka teori ini akarnya juga dari pemikiran Marx tentang eksploitasi. Dengan analisis yang sama, Paul Baran (1957) menganalisis bahwa sebagian besar keterbelakangan di Dunia Selatan adalah akibat dari kapitalisme Barat. Pemikiran Lenin tentang imperialisme juga mewarnai teori ini. Menurut teori ketergantungan, transfer sumber daya dapat terjadi dengan berbagai cara; termasuk cara merampok, hubungan kolonialisme, atau melalui operasi perusahaan multinasional. Gunder Frank (1972) secara lebih rinci menjelaskan bahwa dominasi negara *center* terhadap *periphery* tidak perlu dilakukan secara langsung seperti zaman kolonialisme dulu, sudah cukup jika pemimpin elit negara miskin memiliki sikap, nilai dan kepentingan yang sama dengan tuan mereka di negara kaya. Mereka ini disebut oleh Frank sebagai *lumpen-bourgeoisie.*

- ***Teori Pembebasan***

Teori ini dianggap masih dekat dengan teori marxis dan ketergantungan. Meskipun menolak, namun teori pembebasan (*liberation*

theory) memberikan titik perhatian alternatif terhadap keterbelakangan dan cara mengatasinya. Teori ini juga tidak mampu memberikan harapan, khususnya bagi orang miskin, tanpa adanya perubahan mendasar dalam struktur masyarakat dan struktur yang lebih luas dalam sosio-ekonomi, politik dan kultur. Pada dasarnya, teori ini memilih pendekatan humanistik ketimbang pendekatan struktural. Dalam asumsinya, teori ini menganggap bahwa masyarakat berada dalam keadaan terbelakang karena ditindas oleh pemegang kekuasaan dalam masyarakat mereka sendiri, yakni mereka yang mengontrol sumber daya ekonomi seperti tanah, industri dan kekayaan. Sebagian menyarankan perlunya pendidikan penyadaran akan hal itu, atau yang disebut oleh Paulo Freire dengan *Conscientisation.* Freire (1972) merupakan salah satu tokoh yang menekankan pentingnya pendidikan dalam pembebasan dan pembangunan. Menurut Freire, masalah pembangunan lebih merupakan soal keadilan ketimbang kekayaan (Curle, 1973). Masih dalam pendekatan dan analisis yang sama, Gustavo Gutierrez juga melakukan analisis dengan cara mengaitkan teologi. Upaya pembebasan melahirkan apa yang dikenal sebagai Teologi Pembebasan (*Liberation Theology*) di Amerika

Latin. Landasan teologi ini dipergunakan untuk melakukan penyadaran, seperti di Amerika Latin yang dikenal sebagai *Christian-Based Community.*

- ***Teori Kekuasaan dan Diskursus dalam Perubahan Sosial***

Teori ini lahir dari inspirasi pandangan Foucault tentang diskursus (*discourse*), kekuasaan (*power*) dan pengetahuan (*knowledge*), terutama dalam hal bagaimana diskursus dan pengetahuan mampu menjadi alat berkuasa. Bagi Foucault, kekuasaan dan pengetahuan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Melalui proses 'pendisiplinan' dan 'normalisasi', serta proses penggunaan pengetahuan, kekuasaan telah diterapkan dalam berbagai aspek (seperti misalnya kegilaan, sakit, kejahatan dan seksualitas). Dengan demikian, bagi Foucault, bentuk perjuangan tidak hanya melawan eksploitasi (ekonomi) dan dominasi (sosial, etnis, seksual, agama) saja, namun juga melawan *subjection* (yakni bentuk penyerahan seseorang sebagai individu, seperti hubungan psikiater dengan pasiennya). Baginya setiap strategi yang mengabaikan ketiga hal tersebut pasti akan gagal.

Escobar (1989) menggunakan cara analisis yang dipakai Foucault untuk menganalisis

hubungan yang bersifat dominatif antara negara Barat dan Dunia Ketiga melalui diskursus *developmentalism*. Analisis yang sama dilakukan Adele Mueller (1988) terhadap gagasan dan pengetahuan/ kekuasaan dalam *Women in Development*. Apa yang dipelajari dari analisis diskursus adalah bahwa analisis ini telah menyumbangkan sikap kearifan dan kehati-hatian bagi siapa saja yang memikirkan konsep pembangunan. Tidak terkecuali adalah hubungan dalam pembangunan itu sendiri, antara LSM dan masyarakat, antara media massa dengan masyarakat, antara lembaga pendidikan dan masyarakat yang selama ini dianggap wajar-wajar saja, hendaknya mulai direnungkan.

Sketsa ringkas ini diharapkan bisa memudahkan kita untuk secara sistematis melakukan analisis dan studi kritis terutama terhadap *mainstream* pembangunan yang diterapkan dan mendominasi di hampir seluruh negara Dunia Ketiga.

Arkeologi *Developmentalism:* Sebuah Pandangan Kritis

Saat ini kita hidup dalam suatu abad yang dikenal sebagai zaman pembangunan (*the age of Development*). Zaman di mana suatu gagasan mampu mendominasi dan memengaruhi

pemikiran bangsa-bangsa secara global, menyangkut gagasan pembebasan masalah kemiskinan dan keterbelakangan bagi berjuta-juta rakyat di Dunia Ketiga. Istilah pembangunan (*development*) kini telah menyebar dan dipergunakan sebagai visi, teori dan proses yang diyakini oleh rakyat di hampir semua negara, khususnya Dunia Ketiga. Dan selanjutnya pembangunan menjadi sinonim modernisasi.

Modernisasi, sebagaimana telah diuraikan di atas, dianggap sebagai jalan paling optimis menuju perubahan, bersifat revolusioner, bertahap, homogen, dan progresif. Tradisionalisme dianggap sebagai penghambat modernitas, sehingga harus disingkirkan dari dalam diri masing-masing individu. Ini semua yang akan membawa pada pertumbuhan ekonomi, jalan menuju masyarakat *high mass consumption*.

Sementara kalangan ekonom merumuskan teori-teori mereka dengan menekankan pada kemampuan produktif sumber daya manusia sebagai modal utama. Dalam teori ini, keterbelakangan suatu masyarakat bersumber pada faktor intern masyarakat itu sendiri. Teori ini mengandalkan pada pengembalian investasi ekonomi (*economic return of investment*) dalam bidang pendidikan. Para pengambil keputusan beranggapan bahwa upaya meningkatkan

investasi sumber daya manusia merupakan imbalan atas prestasi masing-masing. Teori inilah yang kemudian menjadi dasar teori *developmentalism* tersebut.

Developmentalism dan modernisasi yang dijanjikan sebagai ideologi yang mampu membedah dan menyembuhkan "penyakit" kemiskinan dan keterbelakangan berjuta-juta umat manusia, dinilai telah gagal memenuhi janjinya untuk menciptakan kesejahteraan rakyat di Dunia Ketiga. Malahan, teori ini dianggap menjadi penyebab kesengsaraan berjuta-juta rakyat di negeri-negeri Dunia Ketiga.

Jika ditelaah secara kritis dari konteks kesejarahannya, mengapa dan bagaimana *developmentalism* diciptakan, maka kita akan mengetahui bahwa pada awalnya *developmentalism* dikembangkan dalam rangka membendung banjir semangat antikapitalisme dari berjuta-juta rakyat di Dunia Ketiga. Gagasan pembangunan dimulai tahun 1940an, khususnya pada tanggal 20 Januari 1949, yakni pada saat Presiden Amerika Harry S. Truman mengumumkan kebijakan pemerintahannya. Sejak itu istilah pembangunan (*development*) dan keterbelakangan (*underdevelopment*) resmi menjadi kosa kata dan doktrin kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Selain lebih dimaksud untuk memberi jawaban atas penolakan rakyat

Dunia Ketiga yang baru merdeka atas kapitalisme, teori modernisasi dan pembangunan juga ditujukan sebagai jawaban ideologis atas meningkatnya ketertarikan rakyat Dunia Ketiga terhadap keberhasilan Uni Soviet sebagai kekuatan baru. Dengan demikian jelas bahwa gagasan pembangunan mulanya dilontarkan dalam rangka Perang Dingin, yakni suatu kebijakan untuk menghambat dan (jika mungkin) menghentikan laju sosialisme di Dunia Ketiga. Maka, tidaklah mengherankan jika banyak analis menempatkan gagasan pembangunan sebagai kemasan baru dari "kue" lama kapitalisme.[2]

Bagaimana pemikiran pembangunan (kapitalisme) tersebut disebarluaskan ke dan diserap oleh masyarakat Dunia Ketiga? Para pakar ilmu-ilmu sosial pada tahun 1950an dan 1960an memainkan peran diskursif yang penting. Pada masa itu, mereka yang berafiliasi dengan *The Center for International Studies* di Massachusetts Institute of Technology (MIT) membantu membangun diskursus akademis tentang pembangunan.[3] Tahun 1968, para pakar ilmu-ilmu sosial Amerika Serikat terlibat

---

[2] Gendzier, Irene. 1985. *Managing Political Change: Social Scientists and the Third World.* Boulder, Colorado: Westview Press. Juga Douglas Lummis. 1991. "Development Against Democracy," dalam *Jurnal Alternatives*, Vol. 16, no.1.

[3] Gendzier, Irene, *Ibid.* (1985).

semakin jauh dalam memengaruhi kebijakan Amerika atas globalisasi diskursus pembangunan dan modernisasi. Para pakar ilmu-ilmu sosial diminta oleh pemerintah Truman untuk menyelenggarakan suatu Konferensi tentang Pelaksanaan Pasal IX Undang-undang Bantuan Luar Negeri 1966 (*Conference on the Implementation of Title IX of the Foreign Assistance Act of 1966*), di mana para ilmuwan liberal mendominasi interpretasi atas konsep Pembangunan (Millikan and Pye, 1968; dan Gendzier, 1985). Itulah masa-masa di mana mereka sangat produktif menciptakan pengetahuan dan teori pembangunan maupun modernisasi. Pada masa itu, ekonom seperti Rostow mencetuskan *teori pertumbuhan* (*growth theory*), sedangkan McClelland dan Inkeles mengemukakan *teori modernisasi* (*theory of modernization*). Salah satu hasil penting studi mereka adalah, bahwa gagasan pembangunan dan modernisasi harus menjadi pilar utama kebijakan program bantuan dan politik luar negeri Amerika Serikat.[4]

Banyak teori yang lahir dari teori modernisasi sebagai landasan *developmentalism,*

---

[4] Walt Whitman Rostow adalah bekas Profesor MIT, yang pindah ke Gedung Putih menjadi penasihat Presiden Lyndon B. Johnson. Lihat, Gettleman, M.E. and D. Mermelstain. 1967. *The Great Society Reader: The Failure of America Liberalism.* New York: Vintage Book. Uraiannya tentang *Growth Theory,* lihat: Rostow, W.W. 1960. *The*

umumnya meyakini satu hal yang sama yakni bahwa faktor manusia (bukan struktur dan sistem) yang menjadi fokus utama perhatian mereka. Model pertama, dengan menggunakan metafora pertumbuhan yakni tumbuh sebagai organisme, teori modernisasi melihat pembangunan sebagai proses evolusi perjalanan dari tradisional ke modern. Pemikiran ini dapat ditemukan dalam skema lima tahap (*the five-stage scheme*) pembangunan dari teori pertumbuhan yang sangat terkenal yang dikembangkan oleh W.W. Rostow (1960). Asumsinya bahwa semua masyarakat, termasuk masyarakat Barat, pernah mengalami *traditional* dan akhirnya menjadi *modern*. Dalam hal ini, sikap manusia tradisional dianggap sebagai masalah. Menurut pandangan Rostow dan pengikutnya, pembangunan akan berjalan secara otomatis melalui akumulasi kapital (tabungan dan investasi) dengan tekanan bantuan dan hutang luar negeri. Rostow menekankan perlunya elit wiraswasta yang menjadi penggerak utama proses itu. Pandangan-pandangan lainnya didasarkan

---

Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto. New York: Cambridge University Press. Sedangkan uraian Modernisasi lihat: Inkeles, Charles and Smith, David. 1974. *Becoming Modern,* Massachusetts: Harvard University Press. Juga Mc Clelland, David C. 1961. *The Achieving Society.* New York: D.Van Nostrad.

kepada studi McClelland, Inkeles dan Smith (1961).

Konsep pembangunan dan modernisasi yang kemudian serta merta dianut oleh berjuta-juta rakyat Dunia Ketiga, pada dasarnya merupakan refleksi paradigma Barat tentang perubahan sosial. Pembangunan diidentikkan dengan gerak langkah demi langkah menuju *modernitas yang lebih tinggi* (*higher modernity*). Modernitas di sini merefleksi pada bentuk perkembangan dan kemajuan teknologi dan ekonomi seperti yang dicapai oleh negara-negara industri. Konsep ini mempunyai akar sejarah dan intelektualitas perubahan sosial yang berhubungan dengan revolusi industri di Eropa. Sementara di sebagian besar Dunia Ketiga, interpretasi konsep pembangunan dipahami melulu sebagai perbaikan umum dalam standar hidup (*general improvement in the standard of living*).

Dalam masa yang sangat singkat, gagasan pembangunan dan modernisasi menjadi program besar-besaran. Selain menjadi doktrin politik bantuan luar negeri Amerika baik kepada pemerintah Dunia Ketiga maupun LSM, juga hampir setiap universitas di Barat secara serempak membuka kajian baru yang dikenal dengan *Development Studies*. Melalui *Studies* di Barat ini, proses penyebar-serapan kapitalisme ke penjuru dunia dipercepat dan berlangsung mulus, yakni melalui teknokrat, intelektual dan

bahkan aktivis LSM Dunia Ketiga yang menjadi pasar utama program studi tersebut. Escobar (1990) menggambarkan proses penyebarluasan diskursus pembangunan terjadi melalui penciptaan jaringan kerja kelembagaan (seperti lembaga dana internasional, universitas, lembaga penelitian, dan badan perencana pembangunan) demi memfungsikan aparat *developmentalism*. Begitu terkonsolidasi, mereka menentukan apa yang harus dibicarakan, dipikirkan, diidamkan, pendek kata semua diarahkan menuju gagasan *developmentalism* dan modernisasi.

Tidak hanya itu, bahkan tim ahli ilmu-ilmu sosial tersebut mengajukan usulan untuk menggunakan berbagai cara guna mendiseminasikan ideologi pembangunan tersebut dengan sasaran khusus bangsa Dunia Ketiga.

Pertama, saran mereka, menggunakan pengaruh Amerika kepada kebijakan ekonomi dan perencanaan. Mereka tahu bahwa bantuan Amerika selama ini sangat efektif dalam memengaruhi kebijakan dan perencanaan ekonomi.

Kedua, mendidik pemimpin Dunia Ketiga, baik dalam bentuk pelatihan, maupun perjalanan observasi ke Amerika Serikat. Strategi ini, konon, diusulkan berdasarkan pengalaman peran pemimpin mahasiswa dalam

menghancurkan pemerintahan nasionalis Indonesia tahun 1966.

Ketiga, yaitu dengan menggunakan sarana agama. Banyak studi agama diarahkan pada pencarian peran agama dalam pembangunan, sehingga, perlunya *sekularisasi* menjadi bahasa resmi pemimpin agama Dunia Ketiga.

Sedangkan yang terakhir, adalah menggunakan fungsi pelatihan dan penelitian tenaga-tenaga universitas Amerika yang bekerja di luar negeri atas biaya USAID (Milikan dan Pye, 1968).

Lantas persoalannya apa? Ideologi dan teori modernisasi dan pembangunan yang kini menjadi arus utama teori dan praktik perubahan sosial itu, justru menciptakan berbagai ketidakadilan dan melanggengkan struktur ekonomi yang tidak adil dan ketergantungan; menguatkan proses dominasi kultur dan pengetahuan, memperkokoh penindasan politik, hingga mempercepat perusakan lingkungan. Salah satu akibat yang relevan untuk dibicarakan adalah, modernisasi telah melanggengkan pendominasian terhadap perempuan.

Pengetahuan akan pembangunan yang diproduksi oleh negara Barat dan disebarkan ke rakyat Dunia Ketiga bukanlah pengetahuan netral, selain sarat dengan ideologi Barat juga terkandung nafsu untuk mengontrol. Melalui

diskursus pembangunan, Dunia Pertama menetapkan kontrol atas Dunia Ketiga. Pada mulanya Dunia Ketiga diberi label "kekurangan", maka dengan segala (seolah-olah) jiwa kedermawanannya Dunia Pertama memberi bantuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Menurut Mueller justru bantuan tersebut merupakan hubungan imperialistik. Escobar menggunakan analisis Foucault tentang diskursus terhadap pembangunan.[5] Diskursus pembangunan selanjutnya tidak memberi legitimasi terhadap bentuk, cara dan pengetahuan *nonpositivistik* apa pun seperti pertanian tradisional, serta menghancurkan segala bentuk formasi sosial yang nonkapitalistik, seperti tradisi *gotong-royong* di Jawa yang telah diubah menjadi hubungan kapitalistik. Gagasan pembangunan juga menghancurkan segala bentuk proses politik melalui doktrin modernisasi politik. Itu semua menunjukkan bahwa diskursus pembangunan merupakan suatu proses pendominasian secara

---

[5] Michel Foucault, pada akhir tahun 1960 dan awal 1970an menyumbangkan gagasan kritis dalam pemikiran tentang makna diskursus. Baginya, *knowledge is not something that can exist apart from power relation.* Karyanya dalam diskursus memiliki implikasi radikal tidak saja terhadap disiplin ilmu humaniora, seni dan sastra namun juga semua ilmu pengetahuan tentang manusia. Escobar (1978) meminjam analisisnya untuk menganalisis hubungan Dunia Pertama dengan Dunia Ketiga melalui pembangunan.

intelektual, politik, ideologi, ekonomi dan kultural.

Invasi pembangunan (secara kultural, politik, pengetahuan, dan ekonomi) selain oleh Amerika Serikat juga didukung lembaga-lembaga dana internasional seperti Bank Dunia dan IMF (Hayter, 1985:111). Bantuan pembangunan (*development aid*) sering dikembangkan dalam rangka menjaga *status quo*. Mereka mengikat negara berkembang pada kemauan ekonomi negara kaya. Bagian terbesar dari apa yang disebut bantuan (*aid*) biasanya digunakan oleh pemerintah Dunia Ketiga untuk melayani pinjaman (*loans*) Bank Dunia. Sebagian dijatahkan oleh pemberi bantuan dalam rangka melicinkan ekspor serta mendukung kepentingan bisnis mereka sendiri yang ditanamkannya di Dunia Ketiga (Kruijer, 1987:116).

Di masing-masing negara, diskursus pembangunan dikembangkan hingga ke pelosok pedesaan. Di Indonesia misalnya, ideologi *development* kemudian diterjemahkan menjadi *pembangunan* melalui mekanisme kontrol ideologi yang ketat dan canggih, baik di bidang sosial, kultur, ekonomi dan politik. Dalam rangka melindungi ideologi pembangunan, pemerintah melakukan berbagai pendekatan: antara lain, dengan menjalankan kebijakan massa mengambang (*the floating mass policy*),

yakni suatu kebijakan yang melarang keberadaan semua organisasi (politik) massa di tingkat desa. Strategi berikutnya, pemerintah menggeser tradisi demokrasi dalam sistem dan proses pemilihan Lurah. Perombakan tersebut dijalankan melalui penyaringan, seleksi ketat calon dengan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah sebelum dipilih rakyat, yang bahkan sudah mulai dilakukan dengan cara penempatan seorang pejabat pemerintah atau militer sebagai Lurah. Cara lainnya adalah dengan menempatkan militer di setiap desa (Babinsa). Dalam bidang ekonomi, pemerintah menciptakan Koperasi Unit Desa (KUD), satu-satunya lembaga perkoperasian yang diijinkan beroperasi di tingkat kecamatan. Pada tahun 1979 diterapkan perundang-undangan Pemerintahan Desa, untuk menggantikan tradisi *rembug desa* dengan suatu lembaga yang dibentuk dan dikontrol oleh pemerintah (Adi Sasono, 1987).

Strategi lain yang dikembangkan sebagai upaya penyebaran ideologi pembangunan adalah melalui pendidikan. Baik secara formal, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, maupun pendidikan nonformal melalui kursus-kursus, penataran, khutbah di masjid, gereja, dan pengajian-pengajian. Pendekatan pembangunan dilakukan dari yang skala besar sampai yang berskala kecil.

Gagasan pembangunan telah diterima tanpa pertanyaan. Kalau toh ada perdebatan, pada umumnya terjadi hanya di seputar perbedaan cara, metodologi, dan teknik pelaksanaan belaka, bukan pada aras prinsip. Itulah kenyataan yang bila disimpulkan maka sesungguhnya *developmentalism* secara misterius telah diyakini oleh sebagian besar masyarakat, birokrat pemerintahan, akademisi, seniman. Bahkan, celakanya, para aktivis yang memimpikan perubahan (seperti mahasiswa dan aktivis LSM) secara tak sadar ikut mendukung ideologi yang (seolah-olah) ditentangnya.

Dari banyak studi menunjukkan bahwa ideologi dan teori pembangunan serta modernisasi, sejak dalam gagasan dan konsepsi dasarnya sesungguhnya tidak mengandung maksud dan tujuan untuk menciptakan dunia yang lebih baik dan adil secara mendasar. Pada dasarnya, *developmentalism* merupakan media dan alat transfer pengalaman dari negara-negara industri maju untuk dijadikan model proses politik, ekonomi, sosial dan kultur oleh Dunia Ketiga. Menurut mereka, demokrasi dan pembangunan akan berjalan saling mendukung. Pembangunan ekonomi menjadi syarat bagi demokrasi. Industrialisasi, idealnya, akan melahirkan kekayaan dan kekayaan melahirkan kesenangan, dan dengan kesenangan memungkinkan orang secara bebas belajar

berpartisipasi dalam politik, dan kebebasan itulah yang melahirkan demokrasi. Padahal kalau kita analisis secara kritis, pada kenyataannya politik, ekonomi, kultur, maupun gender, tak bisa dipisahkan karena saling berkaitan dan saling bergantung.

Hubungan antara negara (*state*) dan warga negara (*civil society*) dalam sistem kapitalisme tidak bisa lagi direduksi secara sederhana. Dalam kondisi yang tercipta akibat proses pembangunan sangat sulit melihat hubungan antara unsur yang mendominasi dan yang didominasi, yang mengeksploitasi dan yang dieksploitasi sebagaimana analisis kelas dalam marxisme tradisional. Dalam sistem kapitalisme modern, hubungan antarunsur masyarakat merupakan proses dalam mekanisme yang saling berkait namun penuh dengan kontradiksi antarberbagai unsur dalam sistem tersebut. Kelas dan nonkelas menjadi dua unsur penting di dalamnya.[6]

Proses hubungan kelas (antara buruh dan majikan misalnya) melalui fungsi manajer bersifat eksploitatif. Majikan mendapat *surplus* dari hasil kerja keras para buruh, tetapi hasil *surplus* tersebut harus didistribusikan kepada unsur nonkelas dalam bentuk pajak melalui

---

[6] Lihat Resnick S, dan Richard D., Wolf. 1987. *Knowledge and Class: A Marxian Critique of Political Economy*. Chicago: Chicago University Press.

negara. Unsur nonkelas tersebut adalah pemerintah, lembaga keamanan, lembaga wakil rakyat, lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga agama, lembaga judikatif, media massa, dan lain-lain, yang semuanya saling tergantung dan terkait. Oleh karena pendapatan utama unsur nonkelas (negara) bergantung kepada unsur kelas, maka semua unsur tersebut harus melakukan kegiatan untuk mendukung dan melanggengkan sumber utama kelas dengan cara memberikan perlindungan politik, ekonomi, keamanan maupun infrastruktur. Bentuk-bentuk perlindungan itu sangat beragam, mulai dari kesiagaan aparat keamanan untuk mengamankan daerah-daerah industri, peraturan perburuhan berupa pelarangan pemogokan serta berbagai aturan untuk mengontrol organisasi buruh, serta perlindungan insentif dalam sektor ekonomi seperti proteksi, memberi kuota, subsidi, kemudahan perizinan dan kemudahan mendapatkan permodalan serta perlindungan lainnya. Selain perlindungan tadi, negara juga berperan membangun infrastruktur untuk kepentingan melancarkan industri lainnya, sehingga memungkinkan proses kelas tersebut dapat berjalan lancar. Pendekatan yang dipakai di sini menggunakan konsep *overdeterminism.* Konsep ini merupakan suatu epistemologi yang menolak pendekatan *esensialisme* dan

determinisme, yakni suatu pendekatan yang hanya melihat esensi realitas sosial pada satu aspek saja. Hal ini didasarkan atas anggapan bahwa pada dasarnya masalah kemanusiaan tidak bisa dilihat dan dianalisis berdasarkan satu aspek kehidupan belaka, seperti aspek politik, aspek ekonomi (*economic determinism*), namun setiap realitas sosial melibatkan saling ketergantungan antaraspek kehidupan yang saling berhubungan secara dialektis antara struktur ekonomi, politik, kultur, gender maupun lingkungan alam.[7]

Strategi perlindungan lain adalah, melindungi ideologi dan kultur. Langkah yang dijalankan negara untuk melakukan perlindungan ideologi dan kultur, yang dilakukan melalui proses dominasi ideologi dan kultur *civil society*, disebut proses *hegemony*. Dalam pengertian umum, hegemoni adalah loyalitas dari suatu kelompok ekonomi ditujukan untuk kelompok sosial dan ekonomi yang dominan. Gramsci (1972) menggunakan

---

[7] Asumsi yang sama juga dianut oleh paham modernisasi dalam Islam. Keterbelakangan umat Islam, menurut mereka adalah disebabkan karena 'ada yang salah' dalam teologi yang dianut umat Islam. Mereka menuduh tradisional yang fatalistik, sebagai penyebab masalah. Asumsi tersebut dianut oleh kaum modernis sejak Muhamad Abduh atau Jamaludin Afgani sampai kelompok pembaharu saat ini. Lihat: Dr. Harun Nasution. 1978. *Pembaharuan dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

negara. Unsur nonkelas tersebut adalah pemerintah, lembaga keamanan, lembaga wakil rakyat, lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga agama, lembaga judikatif, media massa, dan lain-lain, yang semuanya saling tergantung dan terkait. Oleh karena pendapatan utama unsur nonkelas (negara) bergantung kepada unsur kelas, maka semua unsur tersebut harus melakukan kegiatan untuk mendukung dan melanggengkan sumber utama kelas dengan cara memberikan perlindungan politik, ekonomi, keamanan maupun infrastruktur. Bentuk-bentuk perlindungan itu sangat beragam, mulai dari kesiagaan aparat keamanan untuk mengamankan daerah-daerah industri, peraturan perburuhan berupa pelarangan pemogokan serta berbagai aturan untuk mengontrol organisasi buruh, serta perlindungan insentif dalam sektor ekonomi seperti proteksi, memberi kuota, subsidi, kemudahan perizinan dan kemudahan mendapatkan permodalan serta perlindungan lainnya. Selain perlindungan tadi, negara juga berperan membangun infrastruktur untuk kepentingan melancarkan industri lainnya, sehingga memungkinkan proses kelas tersebut dapat berjalan lancar. Pendekatan yang dipakai di sini menggunakan konsep *overdeterminism*. Konsep ini merupakan suatu epistemologi yang menolak pendekatan *esensialisme* dan

determinisme, yakni suatu pendekatan yang hanya melihat esensi realitas sosial pada satu aspek saja. Hal ini didasarkan atas anggapan bahwa pada dasarnya masalah kemanusiaan tidak bisa dilihat dan dianalisis berdasarkan satu aspek kehidupan belaka, seperti aspek politik, aspek ekonomi (*economic determinism*), namun setiap realitas sosial melibatkan saling ketergantungan antaraspek kehidupan yang saling berhubungan secara dialektis antara struktur ekonomi, politik, kultur, gender maupun lingkungan alam.[7]

Strategi perlindungan lain adalah, melindungi ideologi dan kultur. Langkah yang dijalankan negara untuk melakukan perlindungan ideologi dan kultur, yang dilakukan melalui proses dominasi ideologi dan kultur *civil society,* disebut proses *hegemony.* Dalam pengertian umum, hegemoni adalah loyalitas dari suatu kelompok ekonomi ditujukan untuk kelompok sosial dan ekonomi yang dominan. Gramsci (1972) menggunakan

---

[7] Asumsi yang sama juga dianut oleh paham modernisasi dalam Islam. Keterbelakangan umat Islam, menurut mereka adalah disebabkan karena 'ada yang salah' dalam teologi yang dianut umat Islam. Mereka menuduh tradisional yang fatalistik, sebagai penyebab masalah. Asumsi tersebut dianut oleh kaum modernis sejak Muhamad Abduh atau Jamaludin Afgani sampai kelompok pembaharu saat ini. Lihat: Dr. Harun Nasution. 1978. *Pembaharuan dalam Islam.* Jakarta: Bulan Bintang.

istilah hegemoni sebagai pengertian persekutuan kelas yang mendominasi kelas lain.[8] Dominasi kultur yang tidak adil, dominasi politik yang harus dilegitimasi, merupakan proses penjinakkan masyarakat sehingga mereka secara sukarela (*consent*) menerima tatanan *status quo* dan hubungan yang tidak adil tersebut. Proses hegemoni dilaksanakan melalui berbagai cara dengan menggunakan unsur-unsur yang terkait dalam negara seperti media massa, lembaga-lembaga pendidikan, keagamaan dan kemasyarakatan lainnya untuk memengaruhi cara pandang dan keyakinannya sehingga secara tak terasa mereka kehilangan bahkan melupakan kesadaran kritis terhadap sistem dan realitas yang ada.

Semula orang beranggapan bahwa pengetahuan (*knowledge*) adalah bidang yang

---

[8] Pengertian hegemoni adalah: *an order in which a certain way of life and thought is dominant, in which one concept of reality is diffussed throughout society in all its institutional and private manifestations, informing with its spirit all taste, morality, customs, religious and political principles, and all social relations, particularly in their intellectual and moral connotation.* Lihat Gwynn A., Williams. 1960. "Gramsci's Concept of Egomonia". *Journal of the History of Ideas* XXI, 4 (October-December), p. 587. Lihat juga Bates, T. 1975. "Gramsci and the Theory of Hegemony". *Journal of History and Ideas* 36, no. 2 (April-June). Femia, J. 1975. "Hegemony and Consciousness in the Thought of Antonio Gramsci". Political Studies. 23 no.1, (March). Juga, Gramsci, Antonio. 1971. *Prison Notebooks.* New York: International Publisher.

netral. Kesadaran orang tumbuh ketika Foucault untuk pertama kalinya mempersoalkan bahwa pengetahuan ternyata mengandung kekuasaan (*power*). Jadi, antara pengetahuan dan kekuasaan tidak bisa dipisahkan. Di sinilah peran lembaga-lembaga ilmu pengetahuan berjasa melanggengkan proses kelas. Hampir semua bidang pengetahuan dikembangkan demi kepentingan proses kelas tersebut. Misalnya ketika Taylor menciptakan ilmu manajemen, ternyata ilmu itu diciptakan atas pesanan kelompok industrialis saat itu. Tujuan ilmu manajemen Taylor adalah untuk memotivasi buruh (baca: menjinakkan) demi keuntungan perusahaan. Bukankah hakikat ilmu kepemimpinan dan motivasi dalam manajemen yang dikembangkan McGregor adalah agar buruh yang menjual tenaganya itu "merasa memiliki perusahaan", yang dalam kenyataannya bukan milik mereka?

Pandangan ekonomi klasik Adam Smith yang menjadi landasan kapitalisme, dalam perkembangan selanjutnya, diperlakukan sebagai ilmu ekonomi. Artinya, apa yang disebut ilmu ekonomi sekarang ini, tidak lebih dari kapitalisme dan *idem dito* pemikiran ekonomi Adam Smith. Secara sistematik, lembaga pendidikan menyingkirkan banyak pandangan ekonomi yang mengritik kapitalisme dengan berbagai cara. Ada kaitan kepentingan

antara kelas yang memiliki akses ke perguruan tinggi dan yang memberi dana bagi penyelenggaraan pendidikan tersebut. Maka, peran ilmuwan dalam proses melanggengkan sistem kapitalisme ini sangat penting. Jadi tidak heran apabila di negara kapitalis banyak yang berlomba-lomba mendanai riset universitas, dan menjadikannya sebagai bagian dari struktur kapitalisme global.[9]

Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa dalam sistem kapitalisme terjadi "keajaiban", karena di dalam sistem kapitalisme ada kontradiksi antarunsur namun tetap terjadi kesatuan dan persatuan. Masing-masing unsur berlomba untuk mendapatkan bagian terbanyak dari hasil distribusi nilai lebih (*distribution of surplus value*). Kontradiksi terjadi antara tuntutan kenaikan upah buruh dengan gaji staf manajer, antara manajer dengan pajak yang harus dibayar pada negara, antara cicilan dan bunga bank yang mesti dibayar. Proses politik di negara kapitalis

---

[9] Misalnya, sudah sejak lama industri petrokimia sadar pentingnya bisnis bibit pertanian. Sejak 1970an mereka memusatkan perhatian pada industri rekayasa tanaman. Sandoz, Ciba-Geigy, Shell serta ICI adalah sejumlah perusahaan petrokimia yang besar berkat bisnis bibit. Apa urusan mereka mengembangkan teknologi bibit? Lihat saja penjualan Hoechst setiap tahunnya yang mencapai 140 juta US dolar. Diperkirakan Amerika mengantongi laba sebesar 66 milyar US dolar per tahun berkat bisnis bibit (Augstaein, 1989).

pada dasarnya adalah perjuangan antarunsur tersebut untuk mendapatkan bagian terbesar hasil dari *surplus value*. Di sinilah persoalannya, ideologi dan teori yang kemudian diadopsi oleh *developmentalism* dapat menciptakan dan melanggengkan ketergantungan ekonomi, dominasi kultur dan pengetahuan, penindasan politik, ketidakadilan gender, eksploitasi sumber alam yang berakibat pada kerusakan lingkungan dan bentuk-bentuk ketidakadilan lainnya yang saling berkait.

Peran pemerintah Amerika Serikat sangat penting dalam menyebarkan paham pembangunan. Di samping memakai cara paksaan (*coercion*), juga *consent* yakni dengan jalan penjinakkan melalui proyek-proyek bantuan, pertukaran tenaga ahli, transfer teknologi, pengiriman mahasiswa ke universitas di Barat, juga melalui pemikiran dan institusi keagamaan, pendidikan, serta kunjungan wawasan tokoh pemimpin, masyarakat dan intelektual Dunia Ketiga ke Amerika Serikat.[10]

---

[10] Strategi pengiriman tokoh dan mahasiswa ini konon berdasarkan pengalaman peranan mahasiswa dalam menghancurkan pemerintah nasionalis pada tahun 1966. Lihat: Millikan dan Pye. 1968. *Conference on the Implementation of Title IX of the Foreign Assistance Act of 1961*. Massachusetts: MIT.
Peran universitas Amerika dan teknokrat Indonesia dalam proses pembangunan ekonomi, politik dan perubahan ideologi di Indonesia pada tahun 1960an telah dieksplorasi

Dengan cara tersebut, lambat laun kita menerima penderitaan akibat eksploitasi dan represi mereka dengan senang hati. Pendekatan persuasif secara besar-besaran dan meluas melalui sekolah ataupun media massa (koran, majalah, TV) adalah cara terbaik untuk melakukan proses hegemoni kultur. Akibat cara yang dilakukan itu, pembangunan dan modernisasi mampu menciptakan konsep realitas masyarakat dengan memengaruhi, bahkan mampu mendikte selera, moralitas, kebiasaan, prinsip keberagaman (*diversity*) dan politik serta pola hubungan sosial mereka. Dalam proses tersebut ternyata agama mendapatkan porsi yang menarik. Misalnya saja kita mendengar jargon dan tema pemikiran antara lain, *Peranan Agama dalam Pembangunan, Teologi yang Membangun, Perlunya Sekularisasi Agama* dan lain sebagainya yang intinya adalah upaya menyebarluaskan diskursus dan penafsiran yang mendukung *developmentalism.*

---

oleh banyak peneliti. Lihat Ransom, David. 1970. "The Berkeley Mafia" dalam *Ramparts, No.* 9. Juga lihat: Mortimer, Rex. (ed.). 1973. *Showcase State: The Illusion of Indonesia's Accelerated Modernization.* Sydney: Angus and Robertson. Demikian juga Prof. Bill Liddle, mengungkapkan dalam papernya berjudul "Modernizing Indonesian Politics" dalam Liddle, William, (ed). 1973. *Political Participation in Modern Indonesia.* Monograph Series No. 19. New Heaven: Yale University Southeast Asian Studies.

Diskursus inilah yang pada akhirnya mampu menggusur ajaran agama yang bercorak egalitarian, antieksploitasi, teologi pembebasan serta agama keadilan sosial lainnya.

Puncak dari proses *developmentalism* adalah terciptanya posisi peran Amerika Serikat yang semakin penting, itu terlihat dari besarnya pengaruh mereka atas setiap kebijakan dan perencanaan ekonomi bantuan mereka.

WID dan *Developmentalism*

Women in Development (WID –Perempuan dalam Pembangunan) menjadi bagian diskursus pembangunan, dan merupakan pendekatan dominan bagi pemecahan persoalan perempuan Dunia Ketiga. Gagasan WID[11] dianggap satu-satunya jalan guna memperbaiki status dan nasib berjuta-juta perempuan di negara Dunia Ketiga. Namun setelah kurang lebih sepuluh tahun berjalan, banyak orang mulai menyangsikannya dan mengajukan kritik

---

[11] WID dimulai pada tahun 70an. Konsep ini dimulai ketika pemerintah AS mengumumkan *The Percy Amendment* (Undang-undang Bantuan Luar Negeri) yang secara jelas mencantumkan pentingnya perhatian terhadap perempuan dalam program *International Development*. Program WID di USAID juga dibuat pada tahun yang sama. Kebijakan ini memengaruhi PBB, sehingga pada waktu itu dinyatakan sebagai *International Decade of Women* (1976-1985). Lihat: Pat Miguire, *Women in Development: An Alternative Analysis*, Amherst MA: Center For International Education, 1984.

mendasar terhadap konsep WID. Kritik ini dipelopori oleh berbagai aliran feminisme. WID dianggap bagian dari agenda Dunia Pertama untuk mendominasi Dunia Ketiga. Konsep WID sendiri dianggap membawa bias feminis liberal, kelas menengah kulit putih, yang dianggap tidak memiliki kepentingan pembebasan kaum perempuan.

Pada tahun 1974, ketika suatu konferensi tentang pengintegrasian perempuan ke dalam ekonomi nasional diselenggarakan di Weseley College, dan biro WID mulai dibuka di USAID, saat itulah disiplin ilmu baru tercipta. Sebagian besar literatur mereka sangat praktis, memusatkan perhatian kepada isu-isu yang langsung berkenaan dengan upaya mendorong partisipasi perempuan dalam program pembangunan. Sebagian lainnya merupakan orientasi kebijakan, yang melakukan analisis atas program pembangunan masa lalu yang cenderung memiskinkan perempuan, juga sekaligus mencari program dan struktur kelembagaannya, serta jumlah sumber daya yang harus disediakan untuk tujuan itu.

WID, yang merupakan strategi arus utama *developmentalism*, lebih menghasilkan penjinakkan dan pengekangan perempuan Dunia Ketiga, ketimbang membebaskannya. Banyak kajian telah dilakukan atas masalah ini. Ada yang mengritik dari segi ekonomi dan

teknologi (Stamp, 1989; Boserup, 1970), dari aspek *isu diskursus* dan *pengetahuan/kekuasaan* (Mueller A., 1987), maupun dari aspek lingkungan (Shiva, 1989) serta aspek-aspek lainnya (Sen, 1987; Ahmed, 1985; Charlton, 1984; McCarthy, 1984; Dixon, 1980; de Wolf 1986).

Agenda utama program WID adalah bagaimana melibatkan kaum perempuan dalam kegiatan *pembangunan.* Asumsinya, penyebab keterbelakangan perempuan adalah karena mereka tidak berpartisipasi dalam pembangunan.

Dengan cepat WID menjadi satu-satunya kebijakan yang berkaitan dengan perempuan di hampir semua negara Dunia Ketiga. Biro WID mulai dibuka di USAID tahun 1974, dan sejak itulah pengetahuan, kebijakan, sumber informasi, telah diciptakan dan diekspor guna memengaruhi jutaan nasib perempuan di Dunia Ketiga. Dan sejak itu pula, hampir serentak, semua pemerintah Dunia Ketiga beramai-ramai memasukkan agenda WID ke dalam program pembangunan masing-masing. Departemen urusan peranan perempuan pun menjadi mode di hampir semua pemerintah di Dunia Ketiga. WID senantiasa diajukan sebagai jawaban kaum *developmentalism* atas kritik kaum feminis yang menganggap pembangunan telah mengabaikan perempuan.

Kritik pertama muncul pada tahun 70an.

Buku Ester Boserup berjudul *Women's Role in Economic Development,* adalah serangan kaum feminis pertama terhadap pandangan asumsi konvensional kaum liberal tersebut, terutama atas pandangan mereka bahwa teknologi membebaskan perempuan. Bagi Boserup, peningkatan teknologi pertanian, justru telah merendahkan status perempuan, karena menyingkirkan akses perempuan terhadap kerja produktif. Ia membagi sistem pertanian ke dalam sistem 'pertanian perempuan' yang menggunakan teknik potong dan bakar serta pertanian komunal, dan sistem 'pertanian laki-laki' yang merupakan sistem kerja dengan pendekatan bisnis swasta, petak yang jelas, dan penggunaan buruh tani. Dalam sistem pertanian perempuan, perempuan memerankan fungsi sebagai pedagang dan oleh karenanya memiliki mobilitas geografis yang memadai; sedangkan dalam sistem laki-laki, perempuan seringkali dipaksa tinggal di bawah kekuasaan laki-laki.

Boserup berpendapat bahwa modernisasi juga menghancurkan perempuan. Urbanisasi telah memotong jaringan dukungan kesukuan, mengurangi pekerjaan dalam sektor modern, dan seringkali menutup akses perempuan pada jenis pekerjaan sektor modern karena stereotipe terhadap perempuan. Perempuan kota di seluruh dunia adalah partisipan utama dalam apa yang dikenal sebagai 'sektor informal', pada

umumnya berupa perdagangan kecil, bahkan pelacuran. Pemerintahan kolonial ikut andil atas buruknya nasib status perempuan, yang memaksakan proses pemiskinan perempuan dengan hanya menyediakan pelatihan bagi laki-laki, dan dengan melakukan strukturisasi akses terhadap kredit dan sumber fasilitas yang hanya ditujukan kepada 'kepala keluarga' yang semuanya adalah laki-laki.

Dalam bidang pertanian, perubahan produksi yang membuat produksi pertanian diperjualbelikan secara tunai (*cash-croping*), suatu pendekatan yang masih saja dilakukan hingga kini, didominasi oleh laki-laki. Barbara Rogers, dalam studinya terhadap perempuan dalam program pembangunan bantuan Bank Dunia, menyimpulkan bahwa proses pembangunan mereka adalah bias kaum laki-laki. Di Jawa misalnya, sebelumnya kaum perempuan memiliki peran dalam pertanian, khususnya di musim panen dan tanam. Musim panen merupakan saat-saat yang paling banyak menyerap tenaga kerja dalam proses pertanian terutama tenaga perempuan keluarga miskin. Kegiatan ini diakui oleh setiap keluarga petani miskin sebagai kegiatan yang memiliki andil besar dan sangat penting dalam mendukung pemasukan subsistensi .

Dalam kenyataan sehari-hari peran perempuan sangat besar baik dalam musim

tanam, pemeliharaan sampai musim panen tiba. Namun, sejak Revolusi Hijau, dengan diperkenalkannya tipe padi baru disertai pengenalan teknologi baru, secara sistematik perempuan tergusur dari peran semula. Pengenalan perekonomian uang tunai (*cash economy*) jelas sangat berpengaruh terutama kepada hubungan buruh tani dengan istrinya. Pemilik sawah harus mendistribusikan sebagian dari *surplus-value*, di antaranya dalam bentuk pajak, kredit bank, sewa tanah. Sehingga upah bagi para buruh tani yang menjual tenaganya seringkali diberikan dalam jumlah yang dibawah standar minimum. Para buruh tani ini kemudian menyerahkan upahnya kepada istri mereka. Di sini lantas terjadi hubungan eksploitatif karena dengan upah minimal itu perempuan harus mengerjakan tugas-tugas domestik.

Kebijakan *developmentalism* juga telah menimbulkan kerusakan lingkungan. Watak *anti-nature* memunculkan masalah lingkungan bagi rakyat di Dunia Ketiga. Kerusakan hutan tropis di Amerika Latin dan Asia Tenggara merupakan monumen, saksi hidup tentang *anti-nature* dari *developmentalism*. Industrialisasi pertanian, Revolusi Hijau, ternyata telah ikut andil atas kerusakan lingkungan secara langsung. Logika program ini adalah bagaimana mengubah cara tanam, penggunaan tenaga

kerja, permodalan, bibit unggul, pestisida, pupuk buatan, mekanisasi, di mana seluruh instrumen itu akan mendorong industri pertanian padat modal. Bibit unggul (buatan) misalnya, ternyata tidak unggul dihadapan hama, maka diperlukan *pest control* dan *plant protection* dengan memakai pestisida secara besar-besaran. Kenyataannya, pestisida bukan racun yang mampu mengontrol hama seperti resep mereka, malah melahirkan hama baru, di samping meningkatkan daya tahan hama lama yang cenderung mendatangkan serangan baru. Belum lagi bahaya residu racun bagi manusia. Namun, perang melawan hama itu sesungguhnya tidak perlu. Para petani selama ratusan tahun sesungguhnya paham, bahwa mekanisme kontrol terhadap hama sudah ada dalam ekologi tanaman, yakni dengan cara menyeimbangkan antara *pest* dan *predator* dengan melalui diversitas tanaman itu sendiri. Maka, bibit unggul jenis baru dan racun kimia yang menjadi masukan utama Revolusi Hijau telah mengakibatkan tercemarnya lingkungan yang tak ternilai kerugiannya.

Uraian di atas menggambarkan bahwa *developmentalism* bukanlah persoalan ekonomi belaka. Proses eksploitasi ekonomi pertanian di pedesaan berkait dan bergantung pada hegemoni kultural serta dominasi kekuasaan/ pengetahuan dan teknologi pertanian yang

didukung oleh universitas dan lembaga-lembaga riset, serta ditopang oleh kebijakan politik pemerintah. Pengetahuan dan wacana tentang teknologi, kebijakan pertanian, bertumpu pada kelas tersebut. Pada dasarnya, pemerintah maupun lembaga-lembaga seperti perguruan tinggi, nafas kehidupannya sangat bergantung dari hasil industri dan pertanian.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa WID merupakan strategi dan diskursus *developmentalism* untuk melanggengkan dominasi dan penindasan perempuan di Dunia Ketiga, melalui upaya penjinakkan (*cooptation*) dan pengekangan (*regulation*) perempuan. Berarti, pada dasarnya menghindari upaya emansipasi. Oleh karena itu WID diragukan mampu memacu proses transformasi.

Dengan analisis WID di atas, mengharuskan kita untuk merenungkan kembali dan menemukan alternatif yang memungkinkan terjadinya transformasi sosial. Transformasi sosial yang dimaksud adalah semacam proses penciptaan hubungan yang secara fundamental merupakan sesuatu yang baru dan lebih baik. Yang dimaksud hubungan di sini adalah struktur, yakni hubungan ekonomi yang eksploitatif menuju struktur tanpa eksploitasi, hubungan kultur hegemonik perlu diubah menjadi struktur politik yang nonrepresif, dari struktur gender yang mendominasi perempuan

menuju ke struktur yang membebaskan. Dengan demikian demokratisasi merupakan alternatif dari proses transformasi sosial. Karena, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa *developmentalism* merupakan sistem yang memiliki watak: di bidang ekonomi, memiliki watak otoriter dan eksploitatif; di bidang politik memiliki watak represif; dan secara kultural memiliki watak dominatif.

Sedangkan demokratisisasi merupakan cara dan proses yang memberi peluang dan wewenang yang memungkinkan masyarakat menentukan dan mengelola hidupnya sendiri melalui dialog, diskusi, aksi yang bertumpu di atas persamaan dan keadilan. Pada akhirnya, demokratisasi akan terjadi jika masyarakat sendiri yang menginginkan, memperjuangkan dan memenangkannya.

Jika WID bertujuan memproses persamaan kaum laki-laki dan perempuan, maka transformasi gender merupakan gerakan pembebasan perempuan dan laki-laki dari sistem dan struktur yang tidak adil. Dengan demikian, transformasi gender merupakan upaya pembebasan dari segala bentuk penindasan –baik struktural maupun personal, kelas, warna kulit dan ekonomi intemasional.

Tujuan gerakan transformasi gender tidak sekadar memperbaiki status perempuan yang indikatornya menggunakan norma laki-laki,

melainkan memperjuangkan martabat dan kekuatan perempuan. Hal tersebut membutuhkan perubahan peran, baik perempuan maupun laki-laki. Dalam hal ini kekuatan bukan berarti mendominasi yang lain. Kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan internal, dalam rangka mengontrol hidup dan jasad, juga kemampuan meraih akses terhadap alokasi sumber-sumber material dan nonmaterial. Transformasi gender menolak integrasi perempuan ke dalam *developmentalism*. Karena, tujuan pengintegrasian perempuan itu tidak memberikan pilihan dan suara untuk mempertahankan kehidupan yang diidamkan oleh kaum perempuan, yaitu berbagi kekuasaan. ❖

BAGIAN KEDUA

ANALISIS GENDER DALAM GERAKAN TRANSFORMASI PEREMPUAN

Gender sebagai alat analisis umumnya dipakai oleh penganut aliran ilmu sosial konflik yang justru memusatkan perhatian pada ketidakadilan struktural dan sistem yang disebabkan oleh gender. Sebagaimana yang dituturkan oleh Oakley (1972) dalam *Sex, Gender and Society*, gender berarti perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis yakni perbedaan jenis kelamin (*sex*) adalah kodrat Tuhan dan oleh karenanya secara permanen berbeda. Sedangkan gender adalah perbedaan perilaku (*behabioral differences*) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia (laki-laki dan perempuan) melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Caplan (1987) dalam *The Cultural Construction of Sexuality* menguraikan bahwa perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan tidaklah sekadar biologi, namun melalui proses sosial dan kultural. Oleh karena itu gender berubah dari

waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, bahkan dari kelas ke kelas. Sedangkan jenis kelamin biologis (*sex*) tidak akan berubah.

Perbedaan gender (*gender differences*) pada proses berikutnya melahirkan peran gender (*gender role*) dan dianggap tidak menimbulkan masalah, maka tak pernah digugat. Jadi kalau secara biologis (kodrat) kaum perempuan dengan organ reproduksinya bisa hamil, melahirkan dan menyusui dan kemudian mempunyai peran gender sebagai perawat, pengasuh dan pendidik anak, sesungguhnya tidak ada masalah dan tidak perlu digugat. Akan tetapi yang menjadi masalah dan perlu digugat oleh mereka yang menggunakan *analisis gender* adalah struktur "ketidakadilan" yang ditimbulkan oleh *peran gender* dan *perbedaan gender* tersebut. Berdasarkan studi yang dilakukan dengan menggunakan analisis gender ini, ternyata banyak ditemukan manifestasi ketidakadilan seperti dalam uraian berikut: Pertama, terjadi marginalisasi (pemiskinan ekonomi) terhadap kaum perempuan. Meskipun tidak setiap marginalisasi perempuan disebabkan oleh ketidakadilan gender, namun yang dipersoalkan dalam analisis gender adalah marginalisasi yang disebabkan oleh perbedaan gender. Misalnya, banyak perempuan desa tersingkirkan dan menjadi miskin akibat program pertanian Revolusi Hijau yang hanya

fokus pada petani laki-laki. Hal ini dikarenakan oleh asumsi bahwa petani itu identik dengan petani laki-laki. Atas dasar itu banyak petani perempuan tergusur dari sawah dan pertanian, bersamaan dengan tergusurnya *ani-ani,* munculnya kredit untuk petani yang artinya petani laki-laki, serta penyelenggaraan pelatihan pertanian yang hanya ditujukan kepada petani laki-laki. Jadi yang dipermasalahkan adalah pemiskinan petani perempuan akibat dari bias gender. Di luar dunia pertanian, banyak sekali pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan perempuan seperti 'guru taman kanak-kanak' atau 'sekretaris', yang dinilai lebih rendah dibanding pekerjaan laki-laki dan seringkali berpengaruh terhadap perbedaan gaji antara kedua jenis pekerjaan tersebut.

Kedua, terjadinya subordinasi terhadap salah satu jenis kelamin, umumnya kaum perempuan. Dalam rumah tangga, masyarakat, maupun negara, banyak kebijakan dibuat tanpa 'menganggap penting' kaum perempuan. Bentuk subordinasi yang dimaksudkan misalnya: karena ada anggapan bahwa perempuan toh nantinya akan ke dapur juga, lalu mengapa harus sekolah tinggi-tinggi. Contoh lainnya dari proses subordinasi dan diskriminasi berdasarkan gender adalah: karena ada anggapan bahwa perempuan memiliki pembawaan "emosional", mereka dianggap

tidak tepat tampil sebagai pemimpin partai atau menjadi manajer. Selama berabad-abad, dengan alasan doktrin agama, kaum perempuan tidak boleh memimpin apa pun, termasuk masalah keduniaan, tidak dipercaya memberikan kesaksian, bahkan tidak memperoleh warisan. Adanya penafsiran agama yang mengakibatkan subordinasi dan marginalisasi kaum perempuan itulah yang dipersoalkan. Bentuk dan mekanisme proses subordinasi tersebut berbeda dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat.

Ketiga, adalah pelabelan negatif (stereotipe) terhadap jenis kelamin tertentu, dan stereotipe itu mengakibatkan terjadinya diskriminasi serta berbagai ketidakadilan lainnya. Dalam masyarakat, banyak sekali stereotipe yang dilekatkan kepada kaum perempuan sehingga mengakibatkan munculnya tindakan yang membatasi, menyulitkan, memiskinkan dan merugikan kaum perempuan. Karena adanya keyakinan masyarakat bahwa laki-laki adalah pencari nafkah (*bread winer*) misalnya, maka setiap pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dinilai hanya sebagai 'tambahan' dan oleh karenanya boleh saja dibayar lebih rendah. Itulah makanya dalam suatu keluarga, sopir (dianggap pekerjaan laki-laki) sering dibayar lebih tinggi dibanding pembantu rumah tangga (peran gender perempuan), meski tidak ada yang bisa menjamin bahwa pekerjaan sopir

lebih berat dan lebih sulit dibanding memasak dan mencuci.

Keempat, kekerasan (*violence*) terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan, karena perbedaan gender. Kekerasan ini mencakup kekerasan fisik seperti pemerkosaan dan pemukulan, sampai kekerasan dalam bentuk yang lebih halus seperti pelecehan (*sexual harassment*), dan penciptaan ketergantungan. Banyak sekali kekerasan terhadap perempuan yang terjadi karena adanya stereotipe gender. Perbedaan dan sosialisasi gender yang dipahami sejak dulu, yang mengakibatkan kaum perempuan memiliki fisik yang lemah dan laki-laki umumnya lebih kuat, membuat masyarakat tidak mempermasalahkan anggapan bahwa lemahnya perempuan tersebut membuat laki-laki boleh dan bisa seenaknya memukul dan memperkosa perempuan. Banyak terjadi pemerkosaan justru bukan karena unsur kecantikan, namun karena kekuasaan dan stereotipe gender yang dilekatkan kepada kaum perempuan.

Kelima, karena peran gender perempuan adalah mengelola rumah tangga, maka banyak perempuan menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama (*burden*). Dengan kata lain, *peran gender* perempuan mengelola, menjaga dan memelihara kerapian tersebut, telah mengakibatkan tumbuhnya tradisi dan

keyakinan masyarakat bahwa mereka harus bertanggung jawab atas terlaksananya keseluruhan pekerjaan domestik. Sosialisasi peran gender tersebut menimbulkan rasa bersalah dalam diri perempuan jika tidak menjalankan tugas-tugas domestik tersebut. Sedangkan bagi kaum laki-laki, tidak saja merasa bukan tangung jawabnya, bahkan di banyak tradisi secara adat laki-laki dilarang terlibat dalam pekerjaan domestik. Beban kerja tersebut menjadi dua kali lipat bagi kaum perempuan yang juga bekerja di luar rumah. Selain bekerja di luar, mereka juga masih harus bertanggung jawab atas keseluruhan pekerjaan domestik. Maka, hubungan antara buruh dengan istrinya berbentuk cara produksi yang feodalistik (*feudalistic mode of production*) yakni para buruh membeli perempuan guna melayani keluarga. Namun bagi mereka yang secara ekonomi cukup, pekerjaan domestik ini kemudian dilimpahkan ke pihak lain yakni pembantu rumah tangga. Proses ini mengandung arti terjadi pemindahan marginalisasi, subordinasi dan beban kerja (*burden*) dari istri ke para pembantu rumah tangga yang kebanyakan juga perempuan.

Semua manifestasi ketidakadilan gender tersebut saling berkait dan secara dialektis saling memengaruhi. Manifestasi ketidakadilan itu "tersosialisasi" kepada kaum laki-laki dan

perempuan secara mantap, yang lambat laun akhirnya baik laki-laki maupun perempuan menjadi terbiasa dan akhirnya memercayai bahwa peran gender itu seolah-olah merupakan kodrat. Lambat laun terciptalah suatu struktur dan sistem ketidakadilan gender yang "diterima" dan sudah tidak lagi dapat dirasakan ada sesuatu yang salah. Persoalan ini bercampur dengan kepentingan kelas, itulah mengapa justru banyak kaum perempuan kelas menengah terpelajar yang ingin mempertahankan sistem dan struktur tersebut.

Berdasarkan deskripsi analisis gender di atas, banyak pertanyaan perlu diajukan: apakah gerakan feminis merupakan perjuangan emansipasi perempuan di hadapan kaum laki-laki atau gerakan melawan sistem dan struktur yang mengakibatkan kaum perempuan menderita? Apakah mereka juga beranggapan bahwa laki-laki (terutama kelas proletar) juga memikul beban derita karena dominasi, eksploitasi serta represi dari sistem yang tidak adil? Mungkinkah gerakan feminis menjadi bagian perjuangan transformasi sistem dan struktur sosial yang tidak adil secara luas, menuju ke sistem yang adil baik bagi perempuan maupun laki-laki? Dengan kata lain apakah hakikat feminisme adalah gerakan transformasi sosial, dalam arti tidak melulu sekadar memperjuangkan soal perempuan?

Bagian ini mencoba secara singkat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan meletakkan di mana sebenarnya peran analisis gender dalam gerakan feminisme. Untuk memperjelas peran analisis gender, kita perlu memahami paradigma di balik gerakan dan teori feminisme. Upaya mencari penjelasan teoritik terhadap pertanyaan mengapa dan bagaimana itulah yang melahirkan timbulnya berbagai macam teori feminisme yang ada. Rosemarie Tong (1989) dalam *Feminist Thought*, menjelaskan ragam usaha feminis ke dalam berbagai aliran feminisme, misalnya feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme marxis dan feminisme sosialis, *eco feminism* dan masih banyak lagi. Untuk memberi gambaran singkat, uraian di bawah ini akan menyajikan secara sederhana masing-masing aliran feminisme tersebut.

Pada umumnya orang berprasangka bahwa feminisme adalah gerakan pemberontakan terhadap kaum laki-laki, upaya melawan *pranata* sosial yang ada, misalnya institusi rumah tangga, perkawinan maupun usaha pemberontakan perempuan untuk mengingkari apa yang disebut sebagai *kodrat*. Dengan kesalahpahaman seperti itu maka feminisme tidak saja kurang mendapat tempat di kalangan kaum perempuan sendiri, bahkan secara umum ditolak oleh masyarakat. Untuk itulah kiranya

perlu dibahas secara lebih rinci dan konseptual mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan gerakan feminisme sebagaimana diungkapkan oleh kaum feminis sendiri. Persoalannya feminisme itu sendiri, seperti juga aliran pemikiran dan gerakan lainnya, bukan merupakan suatu pemikiran atau aliran yang tunggal, melainkan terdiri atas berbagai ideologi, paradigma serta teori yang dipakai oleh mereka masing-masing. Meski gerakan feminis datang dengan analisis dan dari ideologi yang berbeda-beda, umumnya mereka mempunyai kesamaan kepedulian, yakni memperjuangkan nasib kaum perempuan.

Pada umumnya mereka mengakui bahwa feminisme merupakan gerakan yang berangkat dari asumsi dan kesadaran bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi, serta harus ada upaya mengakhiri penindasan dan pengeksploitasian tersebut.

Meski terjadi perbedaan antarfeminis mengenai apa, mengapa dan bagaimana penindasan dan eksploitasi itu terjadi, namun mereka sepaham bahwa hakikat perjuangan feminis adalah demi kesamaan, martabat dan kebebasan untuk mengontrol raga dan kehidupan, baik di dalam maupun di luar rumah. Persoalannya, feminisme bukanlah suatu gerakan homogen yang bisa secara mudah diidentifikasi ciri-cirinya.

Secara sederhana kita bisa membagi aliran feminisme menjadi dua aliran besar dalam ilmu sosial yakni aliran *status quo* atau fungsionalisme dan aliran konflik.

Paradigma Fungsionalisme dalam Feminisme

Aliran *fungsionalisme struktural* atau sering disebut aliran *fungsionalisme*, adalah mazhab arus utama (*mainstream*) dalam ilmu sosial yang dikembangkan oleh Robert Merton dan Talcott Parsons. Teori ini memang tidak secara langsung menyinggung masalah kaum perempuan. Namun keyakinan mereka bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang terdiri atas bagian dan saling berkaitan (agama, pendidikan, struktur politik sampai keluarga) dan masing-masing bagian secara terus menerus mencari keseimbangan (*equilibrium*) dan harmoni, dapat menjelaskan posisi mereka tentang kaum perempuan. Interelasi itu terjadi karena konsensus. Pola yang nonnormatif dianggap akan melahirkan gejolak. Jika hal tersebut terjadi, maka masing-masing bagian berusaha secepatnya menyesuaikan diri untuk mencapai keseimbangan kembali. Bagi penganut teori ini, masyarakat berubah secara evolusioner. Konflik dalam suatu masyarakat dilihat sebagai tidak berfungsinya integrasi sosial dan keseimbangan. Oleh karena itu harmoni dan integrasi dipandang sebagai fungsional, bernilai tinggi

dan harus ditegakkan, sedangkan konflik mesti dihindarkan. Maka, *status quo* harus dipertahankan. Jadi, teori ini menolak setiap usaha yang akan menggoncang *status quo,* termasuk yang berkenaan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Mereka melihat bahwa kondisi yang ada adalah normal dan sehat, oleh sebab itu tidak diperlukan perubahan. Jika perubahan memang terpaksa mesti terjadi, yang diperlukan adalah "reformasi" yang terkontrol, tetapi jangan sampai mengganggu stabilitas sosial. Mereka tidak menyoroti hubungan antara kekuasaan dan ketaatan sosial dan kurang peka terhadap aspek *paksaan* dan *konflik* dari segala bentuk kekuasaan.

Pengaruh fungsionalisme tersebut dapat kita temui dalam pemikiran *feminisme liberal.* Aliran ini muncul sebagai kritik terhadap teori politik liberal yang pada umumnya menjunjung tinggi nilai otonomi, persamaan dan nilai moral serta kebebasan individu, namun pada saat yang sama dianggap mendiskriminasi kaum perempuan. Mereka, dalam mendefinisikan masalah kaum perempuan, tidak melihat struktur dan sistem sebagai pokok persoalan. Asumsi dasar feminisme liberal berakar pada pandangan bahwa kebebasan (*freedom*) dan kesamaan (*equality*) berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik.

Kerangka kerja feminis liberal dalam memperjuangkan persoalan masyarakat tertuju pada *'kesempatan yang sama dan hak yang sama'* bagi setiap individu, termasuk di dalamnya kesempatan dan hak kaum perempuan. Kesempatan dan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan ini penting bagi mereka dan karenanya tidak perlu pembedaan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Asumsinya, karena *perempuan adalah makhluk rasional* juga. Oleh karena itu ketika menyoal mengapa kaum perempuan dalam keadaan terbelakang atau tertinggal, feminisme liberal beranggapan bahwa hal itu disebabkan oleh kesalahan "mereka sendiri". Dengan kata lain, jika sistem sudah memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan maka, jika kaum perempuan tidak mampu bersaing dan kalah, yang perlu disalahkan adalah kaum perempuan sendiri.

Itulah sebabnya usulan mereka untuk memecahkan masalah kaum perempuan adalah dengan cara menyiapkan kaum perempuan agar bisa bersaing dalam suatu dunia yang penuh persaingan bebas. Sebagian dari usaha ini dapat dilihat, misalnya, dalam program-program Perempuan dalam Pembangunan (*Women in Development*) yakni dengan menyediakan "program intervensi guna meningkatkan taraf hidup keluarga seperti pendidikan dan ketrampilan,"

serta "kebijakan yang dapat meningkatkan kemampuan perempuan sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan". Pendekatan yang berasumsi bahwa masalah keterbelakangan kaum perempuan itu terletak pada diri kaum perempuan sendiri, dan oleh karenanya diperlukan usaha menggarap kaum perempuan itu, kini menjadi paradigma arus utama dalam memecahkan masalah perempuan.

Feminisme liberal tidak pernah mempertanyakan diskriminasi akibat ideologi patriarki, sebagaimana dipersoalkan oleh feminisme radikal maupun analisis atas struktur 'kelas', politik, ekonomi serta gender sebagaimana dipermasalahkan oleh gerakan feminis sosialis. Meskipun gagasan feminisme liberal ini telah muncul sejak akhir abad 19 dan awal abad 20, namun baru pada tahun 60an gerakan ini kelihatan menonjol, dan akhirnya mendominasi pemikiran tentang perempuan di seluruh dunia, khususnya Dunia Ketiga saat ini. Salah satu pengaruh feminisme liberal ini terekspresi dalam teori modernisasi dan program global yang dikenal sebagai *Women in Development*. Sejak awal, bagi mereka, persoalan perempuan dianggap sebagai masalah (*anomaly*) bagi perekonomian modern atau partisipasi politik maupun pembangunan. Menurut mereka, keterbelakangan kaum perempuan, selain akibat dari sikap irrasional yang

sumbernya karena berpegang teguh pada nilai-nilai tradisional, juga karena kaum perempuan tidak berpartisipasi dalam pembangunan. Oleh karena itu melibatkan kaum perempuan dalam industrialisasi dan program pembangunan dianggap sebagai jalan untuk meningkatkan status perempuan. Karena keduanya dianggap akan berakibat positif bagi perempuan yakni akan mengurangi akibat dari ketidaksamaan kekuatan biologis antara pria dan perempuan.

Paradigma Konflik dalam Feminisme

Sosiologi konflik merupakan aliran ilmu sosial yang menjadi alternatif dari aliran sosiologi fungsionalisme. Mereka percaya bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki kepentingan (*interest*) dan kekuasaan (*power*) yang adalah pusat dari setiap hubungan sosial termasuk hubungan kaum laki-laki dan perempuan. Bagi mereka, gagasan dan nilai-nilai selalu dipergunakan sebagai senjata untuk menguasai dan melegitimasi kekuasaan, tidak terkecuali hubungan antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan asumsi seperti ini maka perubahan akan terjadi melalui konflik yang akhirnya akan mengubah posisi dan hubungan. Demikian juga, perubahan hubungan antara laki-laki dan perempuan hanya akan dilihat dari konflik antar-dua kepentingan. Yang dapat dikategorikan dalam teori konflik ini di antaranya adalah:

Kelompok pertama penganut teori konflik adalah *feminisme radikal* yang sejarahnya justru muncul sebagai reaksi atas kultur *sexism* atau diskriminasi sosial berdasarkan jenis kelamin di Barat pada tahun 60an, khususnya sangat penting dalam melawan kekerasan seksual dan pornografi (Brownmiller, 1976). Para penganut feminisme radikal tidak melihat adanya perbedaan antara tujuan personal dan politik, unsur-unsur seksual atau biologis. Sehingga, dalam melakukan analisis tentang penyebab penindasan terhadap kaum perempuan oleh laki-laki, mereka menganggapnya berakar pada jenis kelamin laki-laki itu sendiri beserta ideologi patriarkinya. Dengan demikian 'kaum laki-laki' secara biologis maupun politis adalah bagian dari permasalahan. Dari situ aliran feminisme ini menganggap bahwa penguasaan fisik perempuan oleh laki-laki, seperti hubungan seksual, adalah bentuk dasar penindasan terhadap kaum perempuan (Jaggar, 1977). Bagi mereka, patriarki adalah dasar dari ideologi penindasan yang merupakan sistem hirarki seksual di mana laki-laki memiliki kekuasaan *superior* dan *privilege* ekonomi (Eisenstein, 1979). Oleh kelompok feminis yang lain, terutama feminisme marxis, analisis mereka disebut sebagai ahistoris karena menganggap patrarki sebagai hal yang universal dan merupakan akar dari segala penindasan. Meskipun mereka

menggunakan bahasa marxis seperti 'kelas' dalam melakukan analisis hubungan antara laki-laki dan perempuan, namun mereka tidak menggunakan kerangka teori kelas secara serius, karenanya sering dianggap membingungkan. Dalam hal ini hubungan gender direduksi pada perbedaan kodrati yang bersumber pada biologi.

Bagi gerakan feminisme radikal, revolusi terjadi pada setiap perempuan yang telah mengambil aksi untuk mengubah gaya hidup, pengalaman dan hubungan mereka sendiri terhadap kaum laki-laki (Stanley and Wise, *Breaking Out: Feminist Consciousness and Feminist Research*). Dengan kata lain, bagi gerakan feminisme radikal, revolusi dan perlawanan atas penindasan perempuan bisa dilakukan dalam bentuk yang sangat personal: urusan *subjektif* individu perempuan. Anggapan ini justru sangat bertentangan dengan kerangka feminisme marxis yang melihat penindasan perempuan sebagai *realitas objektif*. Sungguh pun demikian, sumbangan feminisme radikal ini terhadap gerakan perempuan secara umum sangatlah besar, terutama karena paham dan analisis mereka bahwa *personal is political* memberi peluang politik bagi kaum perempuan. Namun, lagi-lagi golongan ini mengambil bentuk mode perjuangan ideologi maskulinitas, yakni persaingan untuk mengatasi kaum laki-laki.

Kelompok panganut teori konflik yang

kedua adalah *feminisme marxis.* Kelompok ini menolak keyakinan kaum feminis radikal yang menyatakan biologi sebagai dasar pembedaan gender. Bagi mereka penindasan perempuan adalah bagian dari penindasan kelas dalam hubungan produksi. *Persoalan perempuan* selalu diletakkan dalam kerangka kritik atas kapitalisme. Karl Marx sendiri tidak banyak menjelaskan dalam teorinya tentang posisi kaum perempuan dalam perubahan sosial. Menurut Marx hubungan antara suami dan istri serupa dengan hubungan antara proletar dan borjuis, serta tingkat kemajuan masyarakat dapat diukur dari status perempuannya.

Sedangkan sahabatnya (Engels) mengulas masalah ini dalam sejarah prakapitalisme. Dalam bukunya yang berjudul *The Origin of the Family: Private Property and the State,* Engels menjelaskan bahwa sejarah terpuruknya status perempuan bukan disebabkan oleh perubahan teknologi, melainkan karena perubahan dalam organisasi kekayaan. Munculnya era hewan ternak dan pertanian menetap, yakni suatu masa awal penciptaan *surplus,* adalah dasar munculnya *private property* yang kemudian menjadi dasar bagi perdagangan dan produksi untuk perdagangan. Karena laki-laki mengontrol produksi untuk perdagangan, maka mereka mendominasi hubungan sosial dan politik dan perempuan direduksi menjadi

bagian dari *property* belaka. Sejak itulah dominasi laki-laki dimulai.

Pada zaman kapitalisme, penindasan perempuan malah dilanggengkan oleh berbagai cara dan alasan karena menguntungkan. Pertama melalui apa yang disebut *eksploitasi pulang ke rumah*, yakni suatu proses yang diperlukan guna membuat laki-laki yang dieksploitasi di pabrik bekerja lebih produktif. Buruh laki-laki yang bekerja di pabrik dan dieksploitasi oleh kapitalis, selanjutnya pulang ke rumah dan terlibat dalam suatu hubungan kerja dengan istrinya masing-masing. Dalam analisis ini sistem dan struktur hubungan antara kapitalis, buruh dan istrinya adalah sistem yang akhirnya menguntungkan pihak kapitalis. Kedua, kaum perempuan dianggap bermanfaat bagi sistem kapitalisme dalam reproduksi buruh murah. Di negara kapitalis maju, dalam struktur dan sistem masyarakat yang kapitalistik itu, pihak kapitalis menggantungkan segi terjaminnya persediaan buruh pada keluarga buruh itu sendiri. Ketiga, masuknya perempuan sebagai buruh juga dianggap oleh mereka sebagai menguntungkan sistem kapitalisme karena dua alasan. Alasan yang pertama adalah upah buruh perempuan seringkali lebih rendah dibandingkan buruh laki-laki. Upah buruh yang lebih rendah ini membantu pihak kapitalis melakukan akumulasi kapital secara lebih cepat.

Sedangkan alasan kedua adalah dengan masuknya perempuan ke dalam sektor perburuhan juga dianggap menguntungkan sistem kapitalisme karena proses itu dianggap sebagai proses penciptaan buruh cadangan yang tak terbatas. Dalam analisis mereka, besarnya cadangan buruh ini akan lebih memperkuat posisi tawar menawar kaum kapitalis di hadapan buruh dan sekaligus mengancam solidaritas kaum buruh, dan akhirnya mempercepat akumulasi kapital bagi kapitalis.

Itulah mengapa banyak uraian yang menganalisis bahwa salah satu musuh terbesar kapitalisme, sejak komunisme dianggap runtuh, adalah feminisme. Bagi penganut feminisme marxis, penindasan perempuan merupakan kelanjutan dari sistem eksploitatif yang bersifat struktural. Oleh karena itu, mereka tidak menganggap patriarki ataupun kaum laki-laki sebagai permasalahan, akan tetapi sistem kapitalisme yang sesungguhnya merupakan penyebab masalahnya. Dengan begitu penyelesaiannya pun harus bersifat struktural, yakni hanya dengan melakukan perubahan struktur kelas dan pemutusan hubungan dengan sistem kapitalisme internasional. Perubahan struktur kelas itulah yang mereka sebut sebagai proses revolusi. Setelah revolusi, jaminan persamaan bagi laki-laki dan perempuan belumlah cukup, karena perempuan

masih dirugikan oleh tanggung jawab domestik mereka. Oleh karena itu, "kecuali jika urusan mengelola rumah tangga ditransformasikan menjadi industri sosial, serta urusan menjaga dan mendidik anak jadi urusan publik, maka perempuan tidak akan mencapai kesamaan yang sejati" (Engels). Dari perspektif ini, diyakini bahwa emansipasi perempuan terjadi hanya jika perempuan terlibat dalam produksi dan berhenti mengurus rumah tangga. Dengan demikian, proses itu hanya terjadi melalui industrialisasi. Bagi teori marxis klasik, perubahan status perempuan terjadi melalui revolusi sosialis dan dengan menghapuskan pekerjaan domestik (rumah tangga).

Penganut aliran konflik yang ketiga adalah *feminisme sosialis*. Aliran ini, menurut Jaggar (1983), melakukan sintesis antara metode historis materialis Marx dan Engels dengan gagasan *personal is political* dari kaum feminis radikal. Bagi banyak kalangan, aliran ini dianggap lebih memiliki harapan di masa depan karena analisis yang mereka tawarkan lebih dapat diterapkan oleh umumnya gerakan perempuan. Bagi feminisme sosialis, penindasan perempuan terjadi di kelas mana pun, bahkan revolusi sosialis ternyata tidak serta merta menaikkan posisi perempuan. Atas dasar itu mereka menolak visi marxis klasik yang meletakkan eksploitasi ekonomi sebagai dasar

penindasan gender. Sebaliknya, feminisme tanpa kesadaran kelas juga menimbulkan masalah. Oleh karena itu analisis patriarki perlu dikawinkan dengan analisis kelas. Dengan demikian kritik terhadap eksploitasi kelas dari sistem kapitalisme harus dilakukan pada saat yang sama dengan disertai kritik ketidakadilan gender yang mengakibatkan dominasi, subordinasi dan marginalisasi atas kaum perempuan.

Namun banyak orang menganggap bahwa feminisme sosialis ini merupakan pengembangan dari marxisme. Feminis sosialis mulai dikenal tahun 1970an. Aliran ini memiliki ketegangan antara *kebutuhan kesadaran feminis* di satu pihak dan *kebutuhan menjaga integritas materialisme marxisme* di pihak lain, sehingga analisis patriarki perlu ditambahkan dalam analisis *mode of production*. Mereka mengritik asumsi umum tentang hubungan antara perempuan dengan ekonomi. Hubungan antara partisipasi perempuan dalam ekonomi memang perlu, tapi tidak selalu akan menaikkan status perempuan. Rendahnya tingkat partisipasi berkorelasi dengan rendahnya status perempuan. Tetapi keterlibatan perempuan justru dianggap menjerumuskan perempuan, karena mereka akan dijadikan budak (*virtual slaves*). Bagi feminisme sosialis, meningkatnya partisipasi perempuan dalam ekonomi lebih

berakibat pada peran antagonisme seksual ketimbang status.

Feminis sosialis berpendapat, ketidakberhasilan memasukkan perempuan ke dalam masyarakat revolusi di Uni Soviet, China dan Kuba membuktikan bahwa revolusi sosialis tidak dengan serta merta membebaskan perempuan. Aliran ini mengritik kapitalisme dengan disertai kritik dominasi.

Teori kapitalis patriarki, yang diungkapkan pertama kali oleh Zillah Eisenstein, menyamakan dialektika antara struktur kelas kapitalis dengan struktur hirarki seksual. Bahkan dalam analisisnya, Eisenstein melihat bahwa patriarki sudah muncul sebelum kapitalisme dan tetap ada pada era pascakapitalisme. Pandangan ini agak berbeda dengan Engels yang justru melihat persoalan ekonomi, yakni pada awal timbulnya *private property* yang membawa akibat pada pendominasian kaum perempuan.

Eisenstein memulai teorinya dengan tesis *perempuan sebagai suatu kelas* (*women as a class*) yang diterapkan, dengan menguraikan apa yang disebut oleh Marx sebagai keterasingan (*alienation*), untuk melihat nasib perempuan. Seperti proletarisasi buruh, perempuan juga ditekan oleh kapitalis maupun patriarki sehingga tidak memungkinkan atau menghalangi mereka untuk mencapai nilai-nilai esensinya sebagai

perempuan dan manusia.

Feminisme sosialis juga mengganggap bahwa penindasan perempuan bisa melahirkan kesadaran revolusi, tapi bukan revolusi model *perempuan sebagai jenis kelamin* (*women as sex*) yang diproklamirkan oleh feminis radikal. Feminis radikal, seperti Firestone, menganggap karena biologi menentukan nasib perempuan, maka biologi harus diubah. Baginya perjuangan feminis haruslah tidak berhenti pada penghapusan keistimewaan berdasarkan jenis kelamin (*sex privilege*) laki-laki saja, tapi justru harus memperjuangkan perubahan dalam perbedaan jenis kelamin (*sex differences*) itu sendiri. Bagi feminisme radikal, peran utama perempuan tidak lagi mengurus dan menyusui anak dan biologis tidak lagi harus menjadi dasar bagi organisasi sosial. Sebaliknya bagi feminisme sosialis seperti Eisenstein, ketidakadilan bukan akibat dari perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih karena penilaian dan anggapan (*social construction*) terhadap perbedaan itu. Ketidakadilan juga bukan karena kegiatan produksi atau reproduksi dalam masyarakat, melainkan karena manifestasi ketidakadilan gender yang merupakan konstruksi sosial. Oleh karena itu, yang mereka perangi adalah konstruksi visi dan ideologi masyarakat serta struktur dan sistem yang tidak adil yang dibangun atas bias gender.

Pandangan feminis sosialis tidak saja memodifikasi teori marxis, tetapi juga menggunakan fakta universal subordinasi perempuan (yang berbeda isinya dari masa ke masa dan di bawah berbagai *mode of production*) sebagai landasan studi perbandingan dan praksis baru.

Pandangan tentang keterkaitan antara hubungan produksi (*relation of production*) dan cara produksi (*mode of production*) adalah inti pandangan tentang penindasan perempuan yang mengambil bentuk dalam gagasan-gagasan dari pemikir seperti Karen Sacks, Eleanor Leacock, Nancy Chodorow, dan Gayke Rubin. Menurut Sacks, dengan mengutip Engels, melalui proses sejarah perempuan berubah dari anggota masyarakat yang bebas (*independent*) dan sederajat (*equal*) menjadi *subordinate* dan istri yang bergantung (*dependent*). Pertumbuhan pemikiran tentang *private*, di mana keluarga sebagai lembaga yang memeras dan melanggengkannya, adalah penyebab transformasi itu. Salah satu hasil analisis ini adalah masa keemasan zaman di mana barang-barang diproduksi untuk digunakan, bukan diperdagangkan. Pandangan ini membawa perdebatan mengenai istilah marxis mana yang lebih baik bagi perempuan, di bawah bentuk produksi primitif atau feodal ataukah di bawah kapitalisme, dan sejauhmana pemahaman

mengenai *matriarchies functioned* akan dapat menuju masa depan feminis sosialis. Sejak tesis *household as the entire economy* dikembangkan, cabang feminis sosialis juga menjadi bagian dari pandangan dunia perempuan (*female-sphere*).

Menurut Gayke Rubin, dengan mengutip Levi Strauss yang juga memakai pemikiran Engels tentang perempuan sebagai kekayaan, perkawinan adalah *total relationship of exchange*, bukan saja antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga dengan sekelompok laki-laki, dan perempuan dianggap sebagai objek perdagangan. Pembagian kerja secara seksual (*sexual division of labor*) adalah usaha melembagakan ketergantungan antarjenis kelamin yang sesungguhnya menguntungkan laki-laki. Menurut tafsiran Rubin, sangat tabu untuk menyamakan laki-laki dan perempuan. Selanjutnya Rubin menafsirkan teori Freud yang mempertentangkan laki-laki dan perempuan sebagai tanggapan atas krisis Oedipus, sebagai pembebasan perempuan karena secara fisik menerima ketakberdayaan struktural. Penerimaan ini menjadi identitas gender (*gender identity*) yang menurut Nancy Chodorow berkembang menjadi *the reproduction of mothering*.

Rubin dan Chodorow mengajukan pertanyaan mengenai penyebab penindasan perempuan di luar pandangan-pandangan tradisionalisme analisis gender dan kapitalisme

maupun pemikiran pembagian kerja secara seksual guna merekonstruksi identitas gender itu sendiri. Usaha ini tidak sekadar kebijakan feminis yang *incremental*, tapi merupakan usaha pemerintah agar revolusi bisa membatasi restrukturisasi pembagian kerja secara seksual. Menurut mereka, perubahan pola sosialisasi, penyediaan upah bagi jenis pekerjaan rumah tangga, atau melibatkan laki-laki dalam pekerjaan perempuan merupakan strategi yang lemah.

Sesungguhnya masih banyak lagi aliran feminisme selain keempat aliran utama dari gerakan feminisime tersebut. Misalnya saja aliran *eco feminism* yang dikembangkan oleh Vandana Shiva dari India dan Maria Mies dari Jerman. Ada lagi aliran feminisme yang lahir dan berkembang di Amerika Serikat, yakni *black feminism*. Demikian halnya di Dunia Ketiga, lahir feminisme Dunia Ketiga. Hal yang menakjubkan, gerakan feminisme ternyata juga lahir di kalangan agama, seperti Kristen Protestan dan Katolik. Bahkan di kalangan umat Islam telah lahir gerakan *feminisme muslim* yang muncul tidak hanya di negara-negara Timur Tengah. Pergolakan pemikiran feminisme dalam Islam ini dipelopori oleh beberapa tokoh seperti Fatima Mernisi, Riffat Hassan serta Asghar Ali Engineer.

Kaum akademisi lebih sering mempermasalahkan atau memperdebatkan

antar-aliran feminisme tersebut. Hal ini karena di antara aliran feminisme tersebut memang terdapat berbagai asumsi dan keyakinan yang saling bertentangan dan sulit dipersatukan. Namun demikian, para praktisi umumnya melihat berbagai aliran tersebut secara lebih pragmatis serta tidak ingin melanjutkan perdebatan teoritik antar-aliran feminisme tersebut, melainkan mencoba menggunakan analisis masing-masing yang cocok untuk melihat keadaan yang sedang dihadapi. Hal ini karena kaum praktisi umumnya lebih bergumul dan menghadapi persoalan perempuan dalam kehidupan sehari-hari, dan membutuhkan pemecahan yang konkrit dan realistik. Hampir semua aliran dirasakan memberikan sumbangan untuk menguatkan kaum perempuan. Usaha kaum feminis liberal untuk mendidik kaum perempuan agar setara dan mampu bersaing dengan kaum laki-laki bisa digunakan sebagai usaha praktis jangka pendek dalam rangka usaha strategis jangka panjang, emansipasi dan transformasi yang lebih bersifat ideologis diperjuangkan bersama-sama aliran feminisme lainnya. Demikian halnya semboyan feminisme radikal, yakni *personal is political,* bisa menjadi alat proses penyadaran terhadap kuatnya sistem patriarki yang meskipun tidak diakui sebagai hal yang prinsip oleh feminisme liberal, namun banyak menyumbangkan gagasan emansipasi

maupun pemikiran pembagian kerja secara seksual guna merekonstruksi identitas gender itu sendiri. Usaha ini tidak sekadar kebijakan feminis yang *incremental,* tapi merupakan usaha pemerintah agar revolusi bisa membatasi restrukturisasi pembagian kerja secara seksual. Menurut mereka, perubahan pola sosialisasi, penyediaan upah bagi jenis pekerjaan rumah tangga, atau melibatkan laki-laki dalam pekerjaan perempuan merupakan strategi yang lemah.

Sesungguhnya masih banyak lagi aliran feminisme selain keempat aliran utama dari gerakan feminisime tersebut. Misalnya saja aliran *eco feminism* yang dikembangkan oleh Vandana Shiva dari India dan Maria Mies dari Jerman. Ada lagi aliran feminisme yang lahir dan berkembang di Amerika Serikat, yakni *black feminism*. Demikian halnya di Dunia Ketiga, lahir feminisme Dunia Ketiga. Hal yang menakjubkan, gerakan feminisme ternyata juga lahir di kalangan agama, seperti Kristen Protestan dan Katolik. Bahkan di kalangan umat Islam telah lahir gerakan *feminisme muslim* yang muncul tidak hanya di negara-negara Timur Tengah. Pergolakan pemikiran feminisme dalam Islam ini dipelopori oleh beberapa tokoh seperti Fatima Mernisi, Riffat Hassan serta Asghar Ali Engineer.

Kaum akademisi lebih sering mempermasalahkan atau memperdebatkan

antar-aliran feminisme tersebut. Hal ini karena di antara aliran feminisme tersebut memang terdapat berbagai asumsi dan keyakinan yang saling bertentangan dan sulit dipersatukan. Namun demikian, para praktisi umumnya melihat berbagai aliran tersebut secara lebih pragmatis serta tidak ingin melanjutkan perdebatan teoritik antar-aliran feminisme tersebut, melainkan mencoba menggunakan analisis masing-masing yang cocok untuk melihat keadaan yang sedang dihadapi. Hal ini karena kaum praktisi umumnya lebih bergumul dan menghadapi persoalan perempuan dalam kehidupan sehari-hari, dan membutuhkan pemecahan yang konkrit dan realistik. Hampir semua aliran dirasakan memberikan sumbangan untuk menguatkan kaum perempuan. Usaha kaum feminis liberal untuk mendidik kaum perempuan agar setara dan mampu bersaing dengan kaum laki-laki bisa digunakan sebagai usaha praktis jangka pendek dalam rangka usaha strategis jangka panjang, emansipasi dan transformasi yang lebih bersifat ideologis diperjuangkan bersama-sama aliran feminisme lainnya. Demikian halnya semboyan feminisme radikal, yakni *personal is political,* bisa menjadi alat proses penyadaran terhadap kuatnya sistem patriarki yang meskipun tidak diakui sebagai hal yang prinsip oleh feminisme liberal, namun banyak menyumbangkan gagasan emansipasi

kemanusiaan yang sangat mendasar. Analisis kelas dan peran kapitalisme yang dipergunakan oleh feminisme marxis banyak menyumbangkan dan memperkaya gerakan kaum perempuan terutama untuk memahami nasib kaum perempuan dalam suatu sistem dan struktur kapitalisme yang berlaku. Demikian juga, analisis gender yang tadinya banyak dipakai oleh feminisme sosialis, saat ini analisis itu telah menjadi alat analisis yang dipergunakan oleh hampir setiap organisasi yang bergerak memperjuangkan nasib perempuan.

Dari uraian tersebut, dapat ditarik pelajaran bahwa gerakan feminisme mendapat alat analisis untuk mempertajam pandangan mereka. Tanpa analisis gender gerakan feminisme akan mengalami kesulitan untuk melihat sistern dan struktur, dan akibatnya hanya tertuju kepada kaum perempuan saja. Tanpa analisis gender, gerakan feminisme akan menjadi reduksionisme, di mana lebih memusatkan perhatian kepada kaum perempuan dan akan mengabaikan faktor sistem dan struktur. Akibatnya, gerakan feminis tidak akan terisolasi dari seluruh gerakan sosial ke arah tansformasi sosial. Dengan kata lain, analisis gender telah memungkinkan gerakan feminisme dan gerakan-gerakan lain melakukan analisis dan pemecahan masalah bersama-sama. ❖

HEGEMONI MASKULINITAS DAN ARAH GERAKAN FEMINISME

Feminisme sebagai gerakan awalnya berangkat dari asumsi bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi, serta usaha untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi tersebut. Meskipun terjadi perbedaan antarfeminis mengenai apa, mengapa dan bagaimana penindasan dan eksploitasi itu terjadi, namun mereka sepaham bahwa hakikat perjuangan feminis adalah demi kesamaan, martabat dan kebebasan mengontrol raga dan kehidupan baik di dalam maupun di luar rumah. Feminisme bukanlah perjuangan emansipasi perempuan di hadapan kaum laki-laki saja, karena mereka juga sadar bahwa laki-laki (terutama kelas proletar) juga mengalami penderitaan yang diakibatkan oleh dominasi, eksploitasi serta represi dari sistem yang tidak adil. Gerakan feminis merupakan perjuangan dalam rangka mentransformasikan sistem dan struktur yang tidak adil, menuju ke sistem yang adil bagi perempuan maupun laki-laki. Dengan

kata lain, hakikat feminisme adalah gerakan transformasi sosial dalam arti tidak melulu memperjuangkan soal perempuan belaka. Dengan demikian strategi perjuangan jangka panjang gerakan feminisme tidak sekadar upaya pemenuhan kebutuhan praktis kondisi kaum perempuan, atau hanya dalam rangka mengakhiri dominasi gender dan manifestasinya seperti eksploitasi, marginalisasi, subordinasi, pelekatan stereotipe, kekerasan dan penjinakkan belaka, melainkan perjuangan transformasi sosial ke arah penciptaan struktur yang secara fundamental baru dan lebih baik.

Betapa pun gerakan feminisme di Indonesia tergolong masih baru, setelah sekian lama gerakan ini berkembang, sudah waktunya kita melakukan refleksi untuk merenungkan arah gerakan ini dalam jangka panjang. Dalam rangka itu, tulisan ini akan meminjam kerangka Harding (1968) dan Siva (1989) tentang dialektika dua prinsip ideologi antara Feminitas dan Maskulinitas.[1] Bagi kedua penulis ini (Harding dan Siva), feminitas dan maskulinitas adalah dua ideologi yang berbeda dan kontradiktif. Feminitas adalah ideologi yang berciri kedamaian, keselamatan, kasih dan

---

[1] Lihat Harding, Susan. 1986. *The Science Question in Feminism*. Ithaca: Cornell University Press. Juga lihat: Shiva, Vandana. 1989. *Staying Alive*. London: Zed Books.

kebersamaan. Sementara maskulinitas memiliki karakter persaingan, dominasi, eksploitasi dan penindasan. Sebagai prinsip, feminitas tidak mesti hanya dimiliki oleh kaum perempuan, demikian juga dengan maskulinitas yang tidak serta merta hanya dimiliki oleh laki-laki. Pada kenyataannya, banyak sekali kaum perempuan dan bahkan aktivis feminis yang menganut ideologi maskulinitas. Maskulinitas berhasil merealisasikan diri dalam berbagai aspek kehidupan, seperti *developmentalism*, militerisme, ilmu-ilmu positivisme dan reduksionisme serta berbagai ideologi kekerasan lainnya. Menurut Siva (1989), hasil dari merajalelanya prinsip maskulinitas adalah kekerasan terhadap kaum miskin dan perempuan, penghancuran alam dan lingkungan, serta penghancuran terhadap sistem pengetahuan lainnya yang nonrasionalisme. Dalam perjalanannya maskulinitas berhasil mendominasi dan hegemonik. Tulisan ini mencoba melihat gerakan feminis dalam kerangka tersebut untuk mencari bentuk-bentuk perjuangan alternatif di masa mendatang.

Anatomi Gerakan Kaum Perempuan

Meskipun agenda feminisme secara umum adalah dalam rangka mengakhiri penindasan kaum perempuan, namun ada gejala umum yang melanda kaum feminis sendiri, *hosting the oppressor's ideology* yakni maskulinitas. Kaum

liberal misalnya, yang percaya bahwa kebebasan dan persamaan berakar pada rasionalitas, dan "perempuan adalah makhluk rasional" juga, maka mereka menuntut hak yang sama seperti kaum laki-laki. Kaum perempuan harus dididik agar mampu bersaing dalam gelanggang merebut kesempatan untuk memasuki prinsip-prinsip maskulinitas. Mereka tidak mempermasalahkan ketidakadilan struktural dan penindasan ideologi patriarki. Paham seperti itu nampaknya kini justru mendominasi pemikiran perempuan, khususnya di Dunia ketiga. Misalnya, paham modernisasi, yang menganggap perempuan sebagai masalah bagi perkembangan ekonomi modern atau partisipasi politik, karena sikap irrasional mereka berpegang teguh pada tradisi, adalah pandangan yang berakar dari feminisme liberal. Oleh karena itu industrialisasi adalah jalan terbaik untuk mengangkat status perempuan, karena industrialisasi akan memperkecil akibat ketidaksamaan kekuatan biologis antara laki-laki dan perempuan. Program Keluarga Berencana (KB) misalnya, dianggap akan membebaskan perempuan dari proses siklus reproduksi yang tak pernah berhenti.[2]

---

[2] Lihat Sutton, F.X. "The Pattern Variable", dalam buku Harry Eckstein dan David Apter, (eds.). 1963. *Comparative Politics: A Reader.* New York: Free Press.

Sementara itu kaum radikal yang muncul sebagai reaksi atas seksisme di Barat tahun 60an, justru sebaliknya. Bagi mereka penindasan perempuan berakar pada kaum laki-laki. Penguasaan fisik perempuan oleh laki-laki itu adalah bentuk dasar penindasan (Jaggar, 1977) dan patriarki adalah sistem hirarki seksual di mana laki-laki memiliki kekuasaan superior dan *privilege* ekonomi. Jadi sesungguhnya mereka ahistoris, karena menganggap patriarki universal dan akar segala penindasan.[3] Meskipun mereka menggunakan bahasa marxis, sesungguhnya mereka tidak memakai kerangka teori kelas secara sungguh-sungguh. Hubungan gender direduksi pada perbedaan kodrati yang bersumber pada biologi,[4] dan revolusi dapat dilakukan lewat gaya hidup, pengalaman dan hubungan perempuan itu sendiri. Anggapan ini bertentangan dengan kerangka marxis yang melihat penindasan perempuan sebagai realitas objektif. Namun sumbangan mereka sangat besar kepada gerakan perempuan terutama karena paham *personal is political* yang memberi peluang politik bagi kaum perempuan. Lebih dari itu, golongan ini terjebak dalam

---

[3] Lihat A., Jaggar. 1983. *Feminist Politics and Human Nature.* Brighton: Harvester Press.

[4] Lihat Firestone, S. 1970. *The Dialectic of Sex: the Case for Feminist Revolution,* New York: William Morrow and Co. Inc.

penggunaan bentuk mode perjuangan ideologi maskulinitas, yakni persaingan untuk mengatasi kaum laki-laki.

Feminis marxis yang menolak gagasan biologi sebagai dasar pembedaan gender juga tak luput dari mode perjuangan ini. Bagi mereka penindasan perempuan adalah bagian dari penindasan kelas dalam hubungan produksi, sehingga persoalan perempuan selalu diletakkan dalam kerangka kritik atas kapitalisme. Pandangan Engels tentang perubahan organisasi kekayaan dan awal penciptaan surplus sebagai dasar *private property* yang kemudian menjadi dasar bagi perdagangan dan produksi untuk perdagangan, makin menguatkan hubungan antara keterpurukan perempuan dengan penindasan dalam produksi. Karena laki-laki mengontrol produksi untuk perdagangan, maka mereka mendominasi hubungan sosial-politik dan perempuan direduksi menjadi bagian dari kekayaan (*property*) belaka.

Dalam era kapitalisme, penindasan perempuan malah dilanggengkan dengan berbagai cara dan alasan. Yaitu melalui apa yang disebut *eksploitasi pulang ke rumah,* yakni suatu proses yang diperlukan guna membuat laki-laki yang dieksploitasi oleh industri agar bisa produktif. Di samping itu perempuan sangat bermanfaat dalam reproduksi buruh murah. Bahkan masuknya kaum perempuan sebagai

buruh dengan upah lebih rendah dari laki-laki, menciptakan apa yang disebut tenaga buruh cadangan. Akibatnya, jumlah tenaga buruh yang membutuhkan pekerjaan membludak, dan pada gilirannya sangat menguntungkan industri (karena seolah-olah buruh yang membutuhkan industri, bukan industri yang membutuhkan buruh). Berbagai upaya dan berbagai aturan sepihak terpaksa harus dipatuhi oleh buruh semata-mata karena takut tidak terpakai tenaganya. Kondisi tersebut, akhirnya memperkuat posisi tawar kapitalis dan mengancam solidaritas buruh. Proses semacarn itu ujung-ujungnya hanya mempercepat akumulasi modal kapitalis.

Jadi, sesungguhnya penindasan perempuan itu bersifat struktural dan penyelesaiannya pun hanya terjadi apabila ada perubahan struktur kelas, yaitu dengan cara memutuskan hubungan dengan sistem kapitalis internasional. Menurut Engels, revolusi bukan jaminan. Persamaan bagi laki-laki dan perempuan dirasa tidak cukup, karena kaum perempuan tetap dirugikan dengan adanya tanggung jawab domestik mereka, maka perempuan akan mencapai keadilan sejati jika urusan mengelola rumah tangga diubah bentuknya menjadi industri sosial, serta urusan menjaga dan mendidik anak jadi urusan publik. Jadi, emansipasi perempuan hanya bisa terwujud jika perempuan terlibat

dalam produksi dan tidak lagi mengurus rumah tangga, dan proses itu dapat diwujudkan melalui industrialiasi. Bagi teori marxis klasik, terjadinya perubahan status perempuan hanya dapat melalui revolusi sosialis, dengan cara menghapus pekerjaan domestik (rumah tangga). Jelas sekali, dalam hal ini, mereka sangat meremehkan *feminitas* dan mengagungkan *maskulinitas.*

Selanjutnya kaum sosialis melakukan sintesis antara metode *historis materialis* Marx dan Engels dengan gagasan *personal is political*-nya kaum radikal. Bagi banyak orang, sintesis itu memiliki harapan guna mempertahankan feminitas. Bagi mereka penindasan terjadi di kelas mana pun, bahkan revolusi sosialis pun ternyata tidak serta merta menaikkan posisi perempuan. Atas dasar itu mereka menolak visi marxis klasik yang meletakkan eksploitasi ekonomi sebagai dasar penindasan gender. Sebaliknya, feminisme tanpa kesadaran kelas juga menimbulkan masalah. Oleh karena itu analisis patriarki perlu dikawinkan dengan analisis kelas. Kritik kapitalisme harus disertai kritik dominasi atas perempuan. Teori patriarki kapitalis (*capitalist patriarchy theory*) dari Zillah Eisenstein, yang menyamakan struktur kelas kapitalis dengan struktur hirarki seksual, berasumsi bahwa patriarki muncul sebelum kapitalisme dan tetap ada di zaman pascakapitalisme. Perempuan

sebagai suatu kelas, adalah analogi masalah 'keterasingan' Marx yang diterapkan kepada kaum perempuan. Sebagaimana proletarisasi buruh, kaum perempuan juga ditekan baik oleh kapitalisme maupun patriarki dalam upaya pencapaian nilai-nilai hakikinya.[5]

Arah Gerakan Feminisme

Meskipun feminisme sebagai gerakan sudah tua, namun gerakan ini baru dianggap lahir pada tahun 60an. Gerakan feminisme itu muncul di Amerika sebagai bagian dari kultur radikal, termasuk gerakan hak-hak sipil (*civil rights*) dan kebebasan seksual (*sexual liberation*). Buku Betty Friedan, *The Feminist Mystique* (1963) laku keras, dan setelah itu tumbuh kelompok feminis yang memperjuangkan nasib kaum perempuan guna memenuhi kebutuhan praktis seperti pengasuhan anak (*childcare*), kesehatan, pendidikan, aborsi dan lain sebagainya. Lantas gerakan itu merambat ke Eropa, Kanada dan Australia yang selanjutnya kini telah menjadi gerakan global dan menggoncang Dunia Ketiga. Pertanyaannya adalah, apakah prestasi gerakan feminisme akan membawa dampak kepada terciptanya dunia yang tanpa eksploitasi, dominasi, hegemoni dan penindasan?

---

[5] Lihat Eisenstein, Zillah (ed.). 1974. *Capitalist Patriarchy and the Case for Socialist Feminism*. New York: Monthly Review Press.

Secara kuantitatif, dampak feminisme memang nyata di mana dalam waktu 20 tahun banyak terjadi perubahan dan perkembangan yang menyangkut nasib kaum perempuan. Setelah pada tahun 1975 PBB mengumumkan *International Decade of Women*, terjadi beberapa peristiwa penting bagi kaum perempuan. Tahun 1979 PBB mengeluarkan resolusi untuk menghentikan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Kini, hampir setiap negara memiliki perundang-undangan antidiskriminasi, yang menguntungkan kaum perempuan terutama bagi perempuan kelas menengah dan yang berpendidikan. Tak lama kemudian jumlah anak perempuan yang sekolah meningkat; kontrol mereka atas berapa anak yang dikehendaki serta pilihan kontrasepsi juga menguat. Pornografi seksisme dalam bahasa juga mendapat tantangan, meskipun belum sepenuhnya berhasil. Revolusi di Zimbabwe, Angola, Mozambik dan Nikaragua memasukkan pembebasan perempuan sebagai bagian dalam ideologi mereka. Bahkan hampir setiap universitas besar kini membuka bidang *women study*. Bidang dan biro urusan perempuan juga sudah dibentuk di hampir setiap organisasi internasional maupun lokal.

Namun ternyata perubahan secara kuantitatif belum mampu mengubah posisi kaum perempuan secara kualitatif. Perubahan

besar dalam bidang hukum, seperti disetujuinya Undang-undang Anti-Diskriminasi Terhadap Perempuan, ternyata tidak memengaruhi atau mengubah pandangan masyarakat atas posisi kaum perempuan. Semakin terbukanya kesempatan kaum perempuan untuk memasuki berbagai aspek kehidupan dan pekerjaan, ternyata juga tidak serta merta mengubah posisi kaum perempuan di masyarakat. Dengan kata lain, berubahnya undang-undang, hak ekonomi serta akses terhadap berbagai aspek bagi kaum perempuan ternyata tidak dengan sendirinya secara fundamental mengubah posisi mereka. Perubahan itu sendiri baru merupakan satu tetes dalam lautan sistem dan struktur dominasi yang besar. Hukum diskriminasi bisa jadi tepat secara teoritik untuk diperjuangkan, namun pandangan masyarakat, kultur dan tafsiran agama tetap melanggengkan diskriminasi terhadap perempuan. Oleh karena itu, penegakan hukum pada dasarnya barulah langkah pertama.

Atas dasar itulah maka gerakan feminisme tidak harus berhenti dengan langkah pertama, yakni memperjuangkan hal-hal jangka pendek (*war of manouver*). Gerakan feminisme perlu melanjutkan perjuangan secara ideologis dan kultural (*war of position*) dengan melakukan beberapa hal, yakni melakukan identifikasi apa dan bagaimana watak ideologi maskulinitas.

Dengan kata lain gerakan feminisme perlu melakukan dua hal sekaligus, yakni melakukan *analisis konjungtur*, yaitu perkiraan jangka pendek dengan mengaji sumber-sumber perlawanan dan potensi dukungan terhadap feminisme. Selain itu juga, menetapkan agenda perjuangan politik dan kultural untuk kepentingan jangka panjang, sebagai korelasi dari seluruh gerakan sosial ke arah transformasi sosial.

Ada pertanyaan yang sungguh menggelitik, apakah prestasi gerakan feminisme akan membawa dampak pada terciptanya dunia yang tanpa eksploitasi, dominasi, hegemoni dan penindasan?

Feminitas sebagai suatu prinsip juga tengah kehilangan pengaruhnya, disebabkan oleh persoalan kesadaran ideologis dari gerakan feminisme itu sendiri. Gerakan feminisme yang intinya menjadi pembela ideologi feminitas, justru seringkali menciptakan *blunder* maskulinitas bagi model dan tujuan gerakan mereka. Tingkat kesadaran tersebut mirip dengan apa yang pernah diilustrasikan oleh Freire sebagai tingkat kesadaran *magic* dan *naive*. Dengan meminjam pisau analisis Freire (1972) tentang karakter tingkat kesadaran tersebut, dapat dilihat bahwa sampai saat ini gerakan feminisme masih memiliki ciri: *empathize to the oppressors* atau *playing host to oppressor*, serta

mencoba untuk menginternalisir ideologi maskulinitas bagi kaum perempuan.

Atas dasar itulah maka gerakan feminisme selayaknya tidak berhenti dengan langkah pertama, yakni memperjuangkan hal-hal yang sifatnya jangka pendek (*war of manouver*). Gerakan feminisme perlu melanjutkan perjuangan ideologis dan kulturalnya dengan melakukan identifikasi dalam rangka menemukan watak ideologi maskulinitas. Dengan kata lain gerakan feminisme harus melakukan dua hal sekaligus, yaitu melakukan *analisis konjungtur,* perkiraan jangka pendek dengan melakukan kajian atas sumber-sumber perlawanan dan potensi dukungan terhadap feminisme; dan juga menentukan agenda jangka panjang berupa perjuangan politik dan kultural untuk kepentingan itu. Ada beberapa sumber perlawanan yang dapat diidentifikasi, di antaranya adalah perlawanan *arus balik* yang berasal dari kaum perempuan sendiri. Misalnya saja adanya komentar di berbagai media massa, bahwa feminisme adalah gagasan Barat yang dipaksakan. Bahkan setelah isu tersebut reda, muncul serangan yang menyangkut pengalaman keberhasilan feminisme yang dipandang menyengsarakan daripada membahagiakan kaum perempuan. Setelah mereka berhasil mendobrak posisi kaum perempuan dari rumah tangga menjadi *wanita*

karir, ternyata perjuangan itu justru menimbulkan bencana bagi mereka sendiri, yakni mereka menderita secara fisik maupun bathin, karena diberi terlalu banyak *equality*. Argumentasi mereka antara lain, bahwa jalan yang sungguh-sungguh diinginkan oleh kaum perempuan adalah menjadi ibu rumah tangga atau istri yang senantiasa berada di rumah (*housewives*) dan ibu yang bangga dengan keibuannya (*proud mothers*). Kita melihat penderitaan kaum perempuan yang diakibatkan oleh sistem dominasi dan eksploitasi yang dilakukan oleh paham lain, namun justru dituduhkan kepada gerakan feminisme. Ini bisa mengakibatkan rusaknya reputasi gerakan feminisme. Maka, gerakan feminisme perlu memikirkan kembali proses penyadaran guna menangkal serangan tersebut.

Serangan kedua berasal dari anak *maskulinitas* yang bernama *developmentalism* serta implikasinya. *Developmentalism* bagaikan agama baru, karena ia dianggap menjanjikan harapan baru untuk memecahkan persoalan berjuta-juta rakyat di Dunia Ketiga. *Developmentalism* telah menjadi diskursus hampir di semua negara Dunia Ketiga. Kata "pembangunan" sebetulnya sangat erat kaitannya dengan *diskursus pembangunan* yang dikembangkan negara-negara Barat, padahal pembangunan hanyalah kemasan baru isi lama dari kapitalisme. Karena

kapitalisme selalu diuntungkan oleh tertindasnya kaum perempuan maka isu gender dan pembebasan perempuan memang tidak pernah menjadi agenda *developmentalism*, bahkan sebaliknya senantiasa melanggengkannya. Dalam konteks ini gerakan feminisme dan *developmentalism* sesungguhnya bersifat kontradiktif.

Karena sifat elitisme gerakan feminisme itu sendiri (sampai saat ini kesadaran gerakan feminisme masih merupakan gerakan kaum menengah dan elit intelektual), maka dalam perjuangannya seolah-olah para aktivis menjadi wakil 'mereka' kaum perempuan pada umumnya. Melihat realitas gerakan macam itu, perlu dipikirkan bagaimana agar kaum perempuan akar rumput mampu memperjuangkan nasibnya sendiri, sementara para aktivis bisa menciptakan ruang agar mereka mendapat kesempatan berjuang (bergerak sendiri, tanpa diwakili). Maka sebaiknya para aktivis menempuh beberapa strategi, di antaranya: Menciptakan kesempatan agar kaum perempuan akar rumput (*grassroots*) memiliki organisasi. Adanya organisasi tersebut memungkinkan terjadinya suatu proses yang akan melahirkan kesadaran kritis kaum perempuan. Mengenai esensi gerakan feminisme, yakni feminitas, tidak perlu dikembangkan karena prinsip tersebut

sesungguhnya sudah ada di sana sejak awal.

Tantangan dari paham keagamaan yang patriarkis sesungguhnya merupakan bentuk perlawanan terhadap feminisme yang tidak mesti berasal dari kaum fundamentalis. Paham tersebut sesungguhnya bisa lahir dari penganut awam agama biasa saja. Karena paham keagamaan yang patriarkis sangat kuat, justru inilah sumber perlawanan yang seharusnya menjadi sasaran pembebasan perempuan. Selama ini sifat paham keagamaan diterima apriori sebagai kebenaran seperti halnya ajaran Tuhan, maka gerakan feminisme berhadapan dengan paham harga mati. Paham keagamaan, sebagaimana pandangan feminisme, tidaklah homogen melainkan terdiri atas berbagai pandangan paradigmatik. Sebagaimana beragamnya pandangan menyangkut perempuan menurut keyakinan agama, demikian juga halnya dengan seberapa jauh paham feminitas menjadi dasar ajaran agama. Dari persoalan tersebut, penting kiranya memperkuat *jaringan kerja* dengan unsur progresif dari berbagai tokoh agama yang mempertahankan feminitas untuk menyusun agenda bersama.

Strategi jangka panjang harus ditempuh dengan menjalankan gerakan politik dan kultural untuk melakukan serangan terhadap hegemoni maskulinitas. Keberhasilan penetrasi

hegemoni ideologi maskulinitas ini sesungguhnya justru merupakan kekalahan gerakan feminisme, karena sebagian besar gerakan feminisme masih mewarisi visi feminisme yang ada yakni dalam rangka *buying male ideology*. Serangan terhadap hegemoni maskulinitas menjadikan feminisme tidak sekadar mengancam kekuasaan dan *privilege* kaum laki-laki, namun juga akan menggoncang seluruh sistem dan struktur yang tidak adil. Maka perlawanan terhadap gerakan-gerakan feminisme akan semakin kuat di masa mendatang. Gerakan feminisme harus memperkuat barisan, menciptakan berbagai jaringan, dan bergerak untuk merebut ruang agar kaum perempuan bersama mitranya, kaum laki-laki, mendapat kesempatan mengorganisir diri untuk memperjuangkan dan menegakkan prinsip dan ideologi feminitas. Tampaknya tanpa kembali ke feminitas, gerakan feminisme akan semakin jauh dari perjuangan mewujudkan dunia tanpa eksploitasi, dominasi, hegemoni dan penindasan. ❖

BAGIAN KETIGA

TINJAUAN STRUKTURAL TERHADAP BURUH PEREMPUAN

Membicarakan hak asasi dan nasib kaum buruh perempuan dapat diletakkan dalam dua kerangka perspektif yakni yang bersifat kondisional dan struktural.

Analisis kondisional terhadap buruh perempuan menyangkut analisis terhadap nasib kaum buruh secara keseluruhan (buruh laki-laki dan perempuan) baik secara fisik bersifat jangka pendek seperti melihat upah minimum, diskriminasi upah antara buruh laki-laki dan perempuan, kondisi kerja yang menyangkut keselamatan kerja, maupun hak untuk berorganisasi.

Analisis struktural lebih menekankan pada posisi buruh perempuan dalam keseluruhan struktur formasi sosial yang ada. Pada dasarnya kedua analisis tersebut tidak bisa dipisahkan – artinya, analisis terhadap kondisi buruh perempuan harus diletakkan pada perspektif struktural dalam kerangka jangka panjang.

Bagian ini mengetengahkan suatu analisis struktural nasib buruh perempuan dalam formasi sosial pembangunan dewasa ini. Secara sengaja di sini dipilih analisis *overdeterminism* yakni analisis yang berasumsi bahwa sesuatu aspek tidak berdiri sendiri, melainkan setiap aspek secara dialektika saling berpengaruh dan menentukan. Dengan demikian analisis ini menolak *esensialisme* dan *reduksionisme*, yang percaya ada penyebab tunggal terhadap suatu proses analisis.

Posisi Buruh dalam Struktur *Developmentalism*

Apa kaitan teori pembangunan yang kini menjadi arus utama teori dan praktik perubahan sosial itu, terhadap kaum buruh? Di manakah kaum *developmentalism* itu meletakkan posisi kaum buruh? Dari banyak studi menunjukkan bahwa teori *developmentalism* dan *modernisasi* yang kini menjadi *mainstream* teori dan praktik perubahan sosial itu, sejak semula dalam konsepsi dasarnya tidak meletakkan visi tentang dunia yang secara fundamental lebih adil, melainkan hanya demi pertumbuhan dan kemajuan. Penganut paham *developmentalism* mendasarkan keyakinan mereka pada asumsi bahwa negara maju yang menganut sistem kapitalisme adalah bentuk ideal dari sistem dan struktur masyarakat yang demokratis. Dan oleh karena itu, pada dasarnya *developmentalism*

adalah suatu upaya menjadikan pengalaman negara industri maju sebagai model proses politik, ekonomi, sosial dan kultural bagi Dunia Ketiga. Menurut mereka, demokrasi dan pembangunan akan berjalan saling mendukung. Di satu pihak, pembangunan ekonomi merupakan syarat bagi demokrasi, di lain pihak industrialisasi menciptakan kekayaan. Kekayaan lalu melahirkan kesenangan, dan kesenangan memungkinkan orang secara bebas belajar berpartisipasi dalam politik, dan kebebasan inilah yang memungkinkan demokrasi. Namun jika dianalisis secara kritis kita akan memahami bahwa masalah demokrasi politik, ekonomi, kultur dan gender adalah saling berkaitan dan saling bergantung.

Persoalan masyarakat dalam *developmentalism* tidak bisa direduksi menjadi hubungan ekonomi antarkelas dalam masyarakat, namun harus dilihat dalam kaitannya dengan hubungan antara *state* dan *civil society* yang lebih kompleks. Dalam *developmentalism* hubungan antarunsur masyarakat merupakan proses dalam suatu mekanisme yang saling berkaitan tetapi penuh kontradiksi antarberbagai unsur dalam sistem tersebut. Unsur-unsur tersebut dapat dikategorikan dalam dua unsur penting yakni unsur kelas dan nonkelas.

Hubungan kelas tercermin dalam hubungan antara buruh dengan majikan dan manajer.

Hubungan kelas yang dimaksud adalah hubungan di mana unsur majikan dengan dibantu oleh para manajer mendapatkan nilai lebih (*surplus value*) dari hasil kerja buruh. Namun hasil lebih tersebut harus didistribusikan kepada unsur nonkelas dalam bentuk pajak, bunga bank, keuntungan, gaji dan sebagainya. Pajak yang dibayarkan oleh majikan kepada pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan untuk unsur lainnya seperti keamanan, pendidikan, dan lembaga-lembaga lain. Kedua, adalah unsur nonkelas. Termasuk dalam unsur ini adalah pemerintah, aparat keamanan, lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga keagamaan, media masa, dan lain-lain yang semuanya saling bergantung dan berkaitan. Oleh karena pendapatan utama unsur negara (nonkelas) bergantung pada langgengnya kelas, maka seluruh unsur dalam negara harus melakukan sesuatu untuk melanggengkan sumber utama mereka yakni proses kelas, dengan berbagai upaya, diantaranya: melakukan perlindungan politik, ekonomi, keamanan serta infrastruktur untuk melanggengkan proses kelas tersebut. Bentuk-bentuk perlindungan tersebut beragam, mulai dari kesiagaan aparat keamanan untuk mengamankan daerah-daerah industri, peraturan tentang perburuhan dan larangan pemogokan serta berbagai aturan untuk mengontrol organisasi buruh, serta

perlindungan insentif ekonomi seperti proteksi, memberikan kuota, subsidi, kemudahan perizinan dan kemudahan mendapatkan modal serta berbagai perlindungan lain-lain. Selain itu, negara juga berperan untuk membangun infrastruktur untuk kepentingan lancarnya industri seperti jalan, dermaga atau pelabuhan serta infrastruktur industri lainya, sehingga memungkinkan proses kelas tersebut dapat berjalan lancar.

Perlindungan ideologi dan kultur yang harus dilakukan negara dijalankan melalui proses ideologisasi kultur terhadap *civil society* yang disebut sebagai *hegemony*. Dalam pengertian umum hegemoni adalah suatu loyalitas yang bersifat spontan dari golongan massa yang ditujukan kepada kelompok sosial yang dominan karena keunggulan intelektual dan sosial maupun ekonomi, serta merupakan aliansi kelas yang mendominasi kelas lain. Di sini dominasi kultur yang tidak adil, dominasi serta penindasan politik harus dilegitimasi. Masyarakat dijinakkan sehingga secara sukarela (*consent*) menerima tatanan *status quo* dan hubungan yang tidak adil tersebut. Proses hegemoni tersebut dilaksanakan melalui berbagai cara oleh berbagai aparat negara seperti media massa, lembaga pendidikan serta lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya untuk memengaruhi cara pandang dan

keyakinan masyarakat sehingga kehilangan kesadaran kritis mereka terhadap sistem yang ada.

Semula orang selalu beranggapan bahwa pengetahuan (*knowledge*) adalah bidang yang netral. Kesadaran orang tumbuh ketika Foucault untuk pertama kalinya mempersoalkan bahwa dalam pengetahuan teryata mengandung kekuasaan (*power*). Artinya antara pengetahuan dan kekuasaan tak bisa dipisahkan. Di sinilah peran lembaga-lembaga pengetahuan berjasa melanggengkan proses kelas. Hampir semua bidang pengetahuan dikembangkan demi kepentingan proses kelas tersebut. Misalnya, ketika Taylor menciptakan ilmu manajemen, ia melakukannya memang atas pesanan kaum industrialis saat itu.

Ilmu manajemen Taylor bertujuan untuk memotivasi buruh demi keuntungan perusahaan. Bukankah hakikat ilmu kepemimpinan dan motivasi dalam manajemen yang dikembangkan oleh McGregor adalah agar buruh yang menjual tenaga kerjanya itu "merasa memiliki perusahaan", yang sebenarnya bukan milik mereka itu? Dalam bidang ekonomi, yang disebut ilmu ekonomi adalah pandangan ekonomi klasik Adam Smith. Secara sistematik, lembaga-lembaga pendidikan menyingkirkan berbagai pandangan ekonomi klasik yang mengritik kapitalisme, dengan berbagai cara.

Ada kaitan kepentingan antara kelas yang memiliki akses ke perguruan tinggi dan mereka yang memberi dana bagi penyelenggaraan pendidikan tersebut. Peran ilmuwan dalam proses pelanggengan sistem kapitalisme ini juga sangat penting. Oleh karenanya perusahaan raksasa di negara kapitalis berlomba-lomba mendanai riset universitas, dan menjadikannya sebagai bagian dari struktur kapitalisme global.

Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa dalam sistem kapitalisme terjadi *kesatuan dalam kontradiksi* antarbanyak unsur, baik antarunsur dalam proses kelas maupun antarunsur dalam proses nonkelas. Masing-masing unsur "berjuang" untuk mendapatkan bagian terbanyak dari hasil *distribusi nilai lebih.* Kontradiksi terjadi antara tuntutan kenaikan upah buruh dengan gaji staf manajer, antara keuntungan dengan pajak yang harus dibayarkan kepada negara, dan antara bunga bank dengan cicilan yang mesti dibayar dan lain sebagainya. Proses politik di negara kapitalis pada dasarnya adalah perjuangan antarunsur tersebut untuk mendapatkan bagian terbesar hasil dari *surplus value* ini. Dalam hubungan struktural seperti ini posisi buruh memang menjadi problematis. Jika upah buruh dinaikkan, pada saat yang sama akan menurunkan perolehan unsur lain, entah itu pajak, dana pendidikan, dana keamanan, gaji

kelompok aktor sejarah, dengan cara melibatkan ke dalam segenap keputusan dan negosiasi yang menyangkut nasib mereka. Hanya dengan pendekatan seperti itulah persoalan kaum buruh dapat dipecahkan. Dengan cara itu pula berarti usaha selangkah menuju perubahan posisi struktural kaum buruh, yakni dari penghasil nilai lebih menjadi penikmat nilai lebih yang dihasilkannya, terjalani. ❖

ANALISIS GENDER DAN TAFSIR AGAMA

Gerakan feminisme telah banyak membuktikan, minimal menyumbangkan inspirasi pemikiran, bahkan pemahaman terhadap terciptanya dunia yang lebih baik dan lebih adil. Gerakan feminisme tidak hanya memengaruhi lembaga-lembaga birokrasi pembangunan, teori-teori baru ilmu sosial dan penelitian sosial, bahkan juga memengaruhi pandangan berbagai agama, paling tidak memaksa kaum agamawan untuk melihat dan mengevaluasi kembali tafsiran terhadap posisi perempuan yang selama ini ada. Gerakan ini pula yang mendorong munculnya gugatan atas berbagai kultur, tradisi yang memengaruhi kondisi dan posisi perempuan di banyak tempat.

Bagian ini mencoba melakukan rekonstruksi secara kritis tentang gerakan feminisme dikaitkan dengan perspektif agama, khususnya Islam, tentang perubahan sosial. Pertanyaan mendasar yang ingin dijawab dalam uraian ini adalah apa sumbangan dan alternatif gagasan

kaum agamawan untuk memberikan jalan keluar dalam rangka transformasi sosial termasuk mengubah posisi kaum perempuan dalam struktur masyarakat di masa mendatang.

Pandangan Agama yang Membebaskan dan Transformasi Sosial

Dewasa ini agama mendapat ujian baru, karena agama sering dianggap biang masalah, bahkan dijadikan kambing hitam atas terjadinya pelanggengan ketidakadilan gender. Hal yang sangat mengganggu misalnya tentang penggambaran bahwa Tuhan seolah-olah laki-laki, penggambaran semacam ini terjadi di hampir semua agama. Sejauhmanakah pandangan tersebut dipengaruhi oleh atau memengaruhi kultur yang dikenal sebagai patriarki?

Lebih lanjut, apakah pelanggengan ketidakadilan gender secara luas dalam agama bersumber dari watak agama itu sendiri, ataukah justru berasal dari pemahaman, penafsiran dan pemikiran keagamaan yang tidak mustahil dipengaruhi oleh tradisi dan kultur patriarki, ideologi kapitalisme maupun pandangan-pandangan lainnya? Dalam konteks ini, perlu kiranya kita mempertajam persoalan dengan cara melakukan telaah kasus dalam Islam berkenaan dengan prinsip ideal Islam dalam memosisikan perempuan. Pertama-tama harus dipahami lebih dahulu spirit yang dibawa

Islam pada awal kelahirannya, yakni melakukan perbandingan atas posisi dan kondisi perempuan pada zaman sebelum dan sesudah Islam. Banyak sejarawan mengungkapkan bahwa dalam masyarakat pra-Islam atau yang dikenal zaman *jahiliyah,* kedudukan perempuan dalam masyarakat sangatlah rendah posisinya dan amat buruk kondisinya, serta dianggap tidak lebih berharga dari suatu komoditas. Dari berbagai uraian tentang penggambaran kedudukan kaum perempuan, yang menonjol di antaranya ialah, bahwa jika seorang suami meninggal dunia, saudara tua laki-laki atau saudara laki-laki lainnya mendapat waris untuk memiliki jandanya.[1] Bahkan kebiasaan mengubur bayi perempuan hidup-hidup adalah praktik merendahkan kaum perempuan yang membentang luas di dunia Arab pada zaman pra-Islam.[2] Rendahnya martabat kaum perempuan juga terlihat dari hakikat perkawinan yang posesif sifatnya. Mereka juga tidak membatasi berapa jumlah perempuan yang boleh dikawini oleh laki-laki.

Al-Qur'an sebagai rujukan prinsip masyarakat Islam, pada dasarnya mengakui

---

[1] Lihat Ali Engineer, Asghar. 1992. *The Rights of Women in Islam*, dalam bab 2 berjudul "Status of Women during Jahiliya". London: C. Hurst and Co.

[2] Lihat: Muhammad All, Maulana. 1978. *Holy Qur'an*, terjemahan dalam Bahasa Inggris. Lahore. hal. 194.

bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama.[3] Keduanya diciptakan dari satu *nafs* (*living entity*), di mana yang satu tidak memiliki keunggulan terhadap yang lain. Bahkan al-Qur'an tidak menjelaskan secara tegas bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, sehingga kedudukan dan status Hawa lebih rendah. Atas dasar itu, prinsip al-Qur'an terhadap kaum laki-laki dan perempuan adalah sama, di mana hak istri diakui sederajat dengan hak suami.[4] Dengan kata lain, laki-laki memiliki hak dan kewajiban terhadap perempuan, dan sebaliknya perempuan juga memiliki hak dan kewajiban terhadap laki-laki apalagi jika dikaitkan dengan konteks masyarakat pra-Islam yang ditransformasikannya.

Persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan selain dalam hal pengambilan keputusan, juga dalam hak ekonomi, yakni untuk memiliki harta kekayaan dan tidaklah suami ataupun bapaknya boleh mencampuri hartanya.[5] Kekayaan itu termasuk yang didapat melalui pewarisan ataupun yang diusahakannya sendiri. Oleh sebab itu mahar atau mas kawin dibayar oleh laki-laki untuk pihak perempuan

---

[3] Asad, Muhammad. 1980. *The Message of the Qur'an*, Giblartar. hal. 933.

[4] *Al-Qur'an*, Surat An-Nisa: ayat 1.

[5] *Al-Qur'an*, Surat An-Nisa: ayat 32.

sendiri, bukan untuk orang tua dan tidak bisa diambil kembali oleh suaminya.

Lantas dari manakah asal datangnya pemikiran yang telah menjadi tradisi dan tafsir keagamaan yang meletakkan posisi perempuan lebih rendah dari laki-laki dan berbagai usaha untuk melanggengkannya? Sesungguhnya ada banyak hal yang memperkokoh kedudukan perempuan yang semuanya dianggap mewakili pandangan resmi Islam, antara lain: pengaruh kultur Timur Tengah abad pertengahan. Sheikh Nefzawi seorang penulis Muslim yang mewakili kultur pada zamannya menjelaskan tipe ideal kaum perempuan di masa itu. Menurutnya perempuan ideal adalah:

perempuan yang jarang bicara atau ketawa.
Dia tak pernah meninggalkan rumah,
walaupun untuk menjenguk tetangganya atau sahabatnya.
Ia tidak memiliki teman perempuan,
dan tidak percaya terhadap siapa saja kecuali kepada suaminya.
Dia tidak menerima apa pun dari orang lain kecuali dari suami dan orang tuanya.
Jika dia bertemu dengan sanak keluarganya,
dia tidak mencampuri urusan mereka.
Dia harus membantu segala urusan suaminya,
tidak boleh banyak menuntut ataupun bersedih.
Ia tak boleh tertawa selagi suaminya bersedih,
dan senantiasa menghiburnya.

Dia menyerahkan diri hanya kepada suaminya,
meskipun jika kontrol akan membunuhnya....
perempuan seperti itu
adalah yang dihormati oleh semua orang.[6]

Kultur semacam itu di sebagian masyarakat Islam masih dipertahankan, namun di berbagai masyarakat Muslim sudah tidak berlaku lagi. Dalam kasus tersebut kultur patriarki benar-benar ikut andil melanggengkan ketidakadilan gender.

Lebih dari persoalan tersebut, tafsir keagamaan tetap memegang peran penting dalam melegitimasi dominasi atas kaum perempuan. Persoalannya di sini adalah, mengapa al-Qur'an seolah-olah menempatkan kedudukan laki-laki di atas perempuan.[7] Ali Engineer (1992) mengusulkan, dalam memahami ayat yang berbunyi "*laki-laki adalah pengelola atas perempuan*" hendaknya dipahami sebagai deskripsi keadaan struktur dan norma sosial masyarakat pada masa itu, dan bukan suatu norma ajaran. Ayat tersebut menjelaskan bahwa saat itu laki-laki adalah manajer rumah tangga, dan bukan pernyataan kaum laki-laki harus menguasai, memimpin. Dalam sejarah

---

[6] Dikutip dari Asghar Ali Enggineer dalam "The Rights of Women in Islam", dari Sheikh Nefzami. 1964. *The Perfumed Garden*, diterjemahkan oleh Richard Burton. New York. hal. 97.

Islam keadaan kaum perempuan berubah, seiring makin berkembangnya kesadaran hak kaum perempuan, dan konsep hak juga makin meningkat. Pada saat ayat tersebut diwahyukan memang belum ada kesadaran akan hal itu. Kata *qowwam* selalu dipahami berbeda dari masa ke masa. Dulu atas dasar ayat tersebut perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki, dan implikasinya adalah seperti zaman feodal bahwa perempuan harus mengabdi kepada laki-laki sebagai bagian dari tugasnya. Namun Qur'an menegaskan bahwa kedudukan suami dan istri adalah sejajar.[8]

Untuk memahami tentang kedudukan kaum perempuan, kita dianjurkan untuk memahami konteks ayat ini. Diriwayatkan pada suatu hari seorang sahabat Nabi bernama Saad bin Rabi menampar istrinya, Habibah bin Zaid, karena suatu persoalan. Habibah tidak terima dan mengadukan peristiwa tersebut kepada ayahnya. Lantas ayahnya pergi mengadu kepada Nabi. Keputusan Nabi adalah, meminta Habibah untuk membalasnya. Atas keputusan Nabi tersebut kaum laki-laki di Madinah saat itu protes. Kalau ditarik makna dari peristiwa tersebut, jelas bahwa Nabi telah memperhitungkan dan paham betul akan ada akibatnya, yaitu pasti menghebohkan

---

7 *Al-Qur'an*, An-Nisa; ayat 34.

8 *Al-Qur'an*, An-Nisa; ayat 35.

masyarakat yang didominasi oleh laki-laki. Jadi Surat Annisa ayat 35 yang menganjurkan untuk mengangkat hakim dalam menyelesaikan perselisihan tersebut diturunkan dengan semangat untuk mengurangi kekerasan terhadap kaum perempuan, dan bukan menegaskan superioritas laki-laki atas perempuan. Namun kenyataannya banyak tafsiran justru tidak mencerminkan dan tidak mengungkapkan kondisi sosial dan kekerasan yang pada saat itu dituntut oleh kaum perempuan untuk dihentikan.

Bisakah seorang perempuan menjadi kepala negara, pemimpin lembaga atau kepala rumah tangga? Kalau kita telaah melalui al-Qur'an, tidak ada alasan yang tegas untuk melarang perempuan memiliki posisi seperti itu, kecuali sebuah *hadis ahad* riwayat Abu Bakar yang menjadi dasar pendukung pandangan ini. Hadis tersebut sangat berlawanan dengan peristiwa Perang Unta di mana Aisyah, istri Nabi, memimpin Komando Perang. Peristiwa yang justru terjadi setelah hadis itu diriwayatkan. Mengapa Abu Bakar sebagai periwayat hadis tersebut tidak memberontak atau desersi atas kepemimpinan Aisyah? Kalau beliau memang percaya bahwa perempuan menurut Nabi tidak sah memimpin? Ataukah bahkan Nabi sendiri justru tidak membedakan peran laki-laki atau perempuan? Dari petikan kejadian itu, penulis

hanya ingin menandaskan bahwa tafsir atau interpretasi terhadap ajaran agama sangat dipengaruhi oleh kacamata pandang yang digunakan oleh penafsirnya, yang sering kali juga berkaitan dengan seberapa jauh keuntungan spiritual dan material yang bisa diperoleh. Artinya tafsir agama, erat kaitannya dengan aspek ekonomi, politik, kultural dan juga ideologi. Seluruh elemen itu saling tergantung dan terkait satu sama lain.

Diperlukan kajian kritis guna mengakhiri bias dan dominasi dalam penafsiran agama. Maka diperlukan suatu proses kolektif yang mengkombinasikan studi, investigasi, analisis sosial, pendidikan serta aksi untuk membahas isu perempuan. Hal ini termasuk memberikan semangat dan kesempatan perlawanan kepada kaum perempuan guna mengembangkan tafsiran ajaran agama yang tidak bias laki-laki. Usaha ini dimaksud untuk menciptakan perimbangan dan perubahan radikal dengan menempatkan perempuan sebagai pusat perubahan. Proses ini termasuk menciptakan kemungkinan bagi kaum perempuan untuk membuat, mengontrol dan menggunakan pengetahuannya sendiri. Usaha inilah yang memungkinkan tumbuhnya kesadaran kritis menuju transformasi kaum perempuan. Gerakan transformasi gender ini mempercepat transformasi sosial secara luas dan menyeluruh.

Pendekatan Tafsir Agama dengan Perspektif Gender

Pada dasarnya inti ajaran setiap agama, khususnya dalam hal ini Islam, adalah menganjurkan dan menegakkan prinsip keadilan. Al-Qur'an, sebagai prinsip-prinsip dasar atau pedoman moral tentang keadilan, mencakup berbagai anjuran untuk menegakkan keadilan ekonomi, keadilan politik, dan keadilan kultural termasuk keadilan gender. Persoalan muncul ketika masyarakat berkembang dan jenis ketidakadilan juga berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Dalam kaitan itu, guna memahami dan menganalisis tentang apa yang adil dan apa yang tidak adil serta bagaimana mekanisme ketidakadilan yang menjadi prinsip dasar agama, seseorang membutuhkan pisau analisis atau perlu meminjam analisis ilmu-ilmu sosial atau politik-ekonomi.

Diperlukan metode pendekatan dalam penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang bisa dipergunakan untuk memahami bagaimana ajaran moral agama yang bersifat prinsipil mesti membutuhkan analisis sosial. Pada dasarnya di dalam al-Qur'an terdapat dalil ayat-ayat yang bersifat mutlak dan tidak bisa ditafsirkan lebih dari satu pengertian, yang disebut dalil *qoth'iy* (*qoth'iyul dalalah*). Ayat-ayat tersebut jumlahnya sangat sedikit, yakni biasanya menyangkut hal-

hal yang sangat prinsip. Sementara itu terdapat dalil al-Qur'an yang bisa dan boleh menimbulkan tafsiran, yang disebut dalil *dhanny* (*dhanniyul dalalah*). Dalam hal dalil-dalil *dhanny* inilah sesungguhnya untuk memahaminya diperlukan pisau analisis yang harus dipinjam dari ilmu-ilmu lainnya, termasuk meminjam pisau analisis gender. Dengan begitu pemahaman atau tafsiran terhadap ajaran keadilan prinsip dasar agama akan berkembang sesuai dengan pemahaman atas realitas sosial, karena sesungguhnya prinsip dasar seruan agama Islam untuk menegakkan keadilan tetap relevan.

Dengan demikian penafsiran terhadap dalil yang bersifat *dhanniyah* dengan menggunakan analisis dan perspektif gender perlu dilakukan. Implikasi dari penafsiran tersebut adalah kemungkinan dilakukannya rekonstruksi fikih yang merupakan landasan perilaku keseharian umat Islam. Tafsir dan fikih perempuan, yakni bukan saja tafsir dan fikih yang dilahirkan oleh kaum perempuan sendiri, melainkan juga tafsir dan fikih yang telah menggunakan analisis dan perspektif gender.

Identifikasi Agenda Masalah Agama yang Strategis

Dengan menekuni persoalan-persoalan gender, ada beberapa permasalahan tafsiran keagamaan yang dianggap strategis agar segera mendapat

perhatian untuk dikaji. Pertama, yang menyangkut persoalan subordinasi kaum perempuan akibat penafsiran yang meletakkan kaum perempuan dalam kedudukan dan martabat yang tidak subordinatif terhadap kaum laki-laki. Padahal, pada dasarnya semangat hubungan laki-laki dan perempuan dalam Islam bersifat adil (*equal*). Oleh karena itu subordinasi kaum perempuan merupakan suatu keyakinan yang berkembang di masyarakat yang tidak sesuai atau bertentangan dengan semangat keadilan seperti ayat Tuhan dalam al-Qur'an, surat al-Hujurat ayat 14 yang berbunyi:

> *Sesungguhnya telah Aku ciptakan kalian laki-laki dan perempuan dan Aku jadikan kalian berbangsa dan bersuku-suku agar kalian lebih saling mengenal; sesungguhnya yang mulia di antara kalian adalah yang paling takwa.*

Masih banyak lagi ayat al-Qur'an yang mendukung pandangan bahwa kaum perempuan tidaklah subordinasi dari kaum laki-laki, seperti surat at-Taubah ayat 71; an-Nisa ayat 123; Surat Ali Imran ayat 195 dan surat an-Nahl ayat 97.

Kedua, pemahaman yang bias gender selain meneguhkan subordinasi kaum perempuan, juga membawa akibat pada persoalan waris dan kesaksian, di mana nilai kaum perempuan dianggap separuh dari kaum laki-laki. Untuk membahas ini perlu dilakukan analisis konteks

sosial terhadap struktur sosio-kultural pada saat ayat tersebut diturunkan, sehingga pemahaman masalah waris dan kesaksian tidak bertentangan dengan prinsip keadilan yang disampaikan dalam ayat-ayat di atas. Umumnya mereka yang menekuni masalah keadilan gender tidak melihat angka pembagiannya, melainkan semangat keadilannya. Sehingga demi mencapai keadilan, mengubah angka yang sesuai dengan sistem dan struktur sosial dewasa ini pun perlu dilakukan.

Ketiga, segenap ayat yang berkenaan dengan hak produksi dan reproduksi kaum perempuan. Dalam tradisi penafsiran Islam yang tidak menggunakan perspektif gender, kaum perempuan sama sekali tidak memiliki hak berproduksi maupun reproduksi yakni untuk mengontrol organ reproduksi mereka. Maka dari itu, usaha untuk menafsirkan kembali hak-hak tersebut agar terjadi keadilan gender dalam hak-hak reproduksi perlu mendapat perhatian. Di antara agenda mengenai penafsiran hak-hak reproduksi ini meliputi:

a) Hak jaminan keselamatan dan kesehatan yang berkenaan dengan pilihan-pilihan untuk mejalankan dan menggunakan atau menolak penggunaan organ reproduksinya, mulai dari menstruasi, mengandung, melahirkan dan menyusui. Dalam kaitan ini termasuk hak untuk menentukan kehamilan

bagi perempuan sepanjang akan membahayakan kesehatan dan keselamatannya.

b) Hak untuk memilih pasangan. Dalam kenyataan masih banyak beredar keyakinan di masyarakat Islam bahwa orang tua (dalam hal ini ayah) memiliki hak menentukan jodoh (*Ijbar*) bagi anak gadisnya. Kajian tentang hak-hak perempuan untuk menentukan nasib jodohnya ini juga perlu diagendakan.

c) Hak untuk menikmati dan menolak hubungan seksual. Dalam pandangan Islam yang bias gender, kaum perempuan secara seksual dimiliki dan dikontrol oleh kaum laki-laki dan tugas utama istri adalah melayani. Meskipun tidak jelas dari mana pandangan ini datangnya, namun hubungan seksual bagi kaum perempuan lebih dikonstruksi sebagai kewajiban belaka. Oleh karena itu perlu dilakukan dekonstruksi terhadap tafsir dan ajaran fikih yang menolak segenap jenis ketidakadilan gender dalam bentuk pelecehan seksual (*sexual harassment*), pemerkosaan terhadap istri (*marital rape*) yang masih menjadi masalah kontroversial tersebut.

Dari uraian di atas dapat disimpukan bahwa tafsiran agama mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam melanggengkan

ketidakadilan gender maupun sebaliknya, yaitu dalam usaha menegakkan keadilan gender. Untuk itu diperlukan suatu pengkajian ulang terhadap keseluruhan tafsir agama dan implikasinya terhadap ajaran dan perilaku keagamaan. Kajian tersebut menyangkut identifikasi akar permasalahan dan strategi pemecahannya.

Suatu strategi advokasi bisa dipinjam untuk melakukan proses penyadaran dan penafsiran ulang dengan pendekatan-pendekatan sebagai berikut. Apabila persoalannya terletak dalam pengertian ayat al-Qur'an atau bunyi suatu hadis, maka yang perlu dilakukan adalah penafsiran ulang terhadap ayat tersebut dengan perspektif gender, penelitian terhadap autentisitas hadis tersebut, untuk menemukan hadis yang lebih sahih. Ini berarti memerlukan usaha yang melibatkan ulama dengan berbagai orang dengan bermacam-macam disiplin ilmu yang mempunyai perspektif gender.

Namun jika persoalannya terletak pada penafsirnya, yakni dalam pemahaman para ulama yang memiliki otoritas penafsiran, maka perlu diadakan pendekatan dan pendidikan atau lokakarya guna membahas analisis gender bagi kalangan otoritas ilmu keagamaan tersebut. Kegiatan ini berarti melibatkan mereka yang dianggap memiliki otoritas ilmu keagamaan dalam memahami dan mendeseminasikan

wacana keadilan gender dalam Islam. Namun jika persoalannya terletak pada kultur masyarakat agama yang melanggengkan ketidakadilan gender, yang diperlukan adalah suatu usaha kampanye dan pendidikan massa tentang masalah gender yang dilakukan oleh semua pihak yang peduli terhadap masalah keadilan, termasuk melibatkan para ulama.

Untuk itu sudah saatnya lembaga keagamaan dan pendidikan serta lembaga kajian keagamaan memiliki bagian "pengkajian perempuan" sebagai wadah yang memberi ruang untuk mengkaji persoalan kedudukan perempuan dalam agama. Dalam masyarakat Islam misalnya, perlunya kajian perempuan di pesantren maupun lembaga pendidikan tinggi Islam sudah semakin mendesak. Melalui lembaga kajian seperti ini kemungkinan lahirnya tafsir maupun fikih perempuan yang berperspektif keadilan gender terbuka lebar. ❖

EMANSIPASI KAUM PEREMPUAN: REFLEKSI DAN AGENDA MENDESAK

Dari uraian dan analisis dalam bab-bab terdahulu, kita dapat melakukan refleksi atas latar perdebatan isu perempuan. Pertanyaan *apakah* dan *mengapa* ada masalah bagi kaum perempuan yang merupakan akar perdebatan isu perempuan telah memunculkan tanggapan yang sangat beragam.

Tanggapan pertama memandang bahwa sesungguhnya tidak ada masalah bagi kaum perempuan sehingga sistem hubungan antara laki-laki dan perempuan saat ini adalah yang terbaik dan karena itu kondisi dan posisi kaum perempuan tidak perlu dipersoalkan. Pada umumnya, kelompok ini berasal dari mereka yang tengah menikmati dan diuntungkan oleh sistem dan struktur hubungan laki-laki dan perempuan yang ada, maka berusaha melanggengkannya –status quo.

Responsi kedua datang dari mereka yang menganggap bahwa saat ini kaum perempuan berada dalam kondisi dan posisi yang ditindas dan dieksploitasi. Namun demikian kelompok ini terpecah menjadi, secara garis besar, empat aliran dengan masing-masing asumsinya ketika mereka berusaha menjawab pertanyaan *mengapa* kaum perempuan tertindas dan tereksploitasi ini, yakni: liberalis, radikalis, marxis dan sosialis.

Golongan *liberalis* berasumsi bahwa kebebasan dan keadilan berakar pada rasionalitas dan "perempuan adalah makhluk yang rasional" juga. Bagi mereka perbedaan antara nilai tradisional dan modern adalah pusat letak masalah. Sehingga, mereka menganggap, keterbelakangan dan ketidakmampuan kaum perempuan bersaing dengan laki-laki adalah karena kelemahannya sendiri, yaitu akibat dari kebodohan dan sikap irrasional yang berpegang teguh kepada nilai-nilai tradisional. Konsekuensinya, ketidakadilan yang dipahami sebagai akibat struktur penindasan yang melahirkan ideologi *sexist* yakni patriarki maupun struktur ekonomi dan politik yang didominasi oleh kaum laki-laki tidak dipertanyakan.

Berbeda dengan liberalis, golongan *radikalis* justru sejak awal melihat bahwa akar penindasan kaum perempuan adalah dominasi kaum laki-laki di mana penguasaan fisik

perempuan oleh laki-laki diyakini sebagai bentuk dasar penindasan (Jaggar, 1977). Patriarki, yakni ideologi kelelakian di mana laki-laki dianggap memiliki kekuasaan *superior* dan *privilege* ekonomi, dianggap sebagai masalah universal dan mendahului segala bentuk penindasan. Mereka mereduksi hubungan gender kepada perbedaan kodrati dan biologis (*women as a sex*). Mereka juga menganggap bahwa *personal is political.* Oleh karena itu, perubahan kondisi dan posisi kaum perempuan harus dimulai dari individu perempuan itu sendiri.

Berlawanan dengan kaum radikalis, golongan *marxis* memandang penindasan perempuan adalah bagian dari eksploitasi kelas dalam hubungan produksi. Maka, isu perempuan harus diletakkan dalam kerangka kritik atas kapitalisme.

Kelompok marxian ini beranggapan bahwa penyebab dasar penindasan terhadap perempuan bersifat struktural (akumulasi modal, dan pembagian kerja internasional). Akibatnya, mereka hanya memilih solusi di antara dua pilihan yaitu: revolusi atau pemutusan hubungan dengan sistem kapitalisme internasional. Namun, karena kaum perempuan baru akan meraih kesamaan sejati jika urusan pengelolaan rumah tangga ditransformasikan menjadi industri sosial, dan

urusan menjaga dan mendidik anak jadi urusan publik, maka emansipasi perempuan tidak akan pernah terjadi kecuali jika perempuan terlibat dalam produksi dan tidak lagi mengurus urusan rumah tangga. Dengan demikian, menurut mereka, perubahan status perempuan akan terjadi melalui revolusi sosialis dan penghapusan pekerjaan domestik (rumah tangga) melalui industrialisasi.

Perspektif radikalis dan marxian tampaknya masih dianggap tidak memuaskan. Kaum *sosialis* muncul dengan sintesis antara teori kelas marxisme dan gagasan *the personal is political* dari feminisme radikal (Jaggar 1983). Teori patriarki kapitalis -teori yang menyamakan dialektika antara struktur kelas dengan struktur hirarki seksual— dari Zillah Eisenstein merupakan bentuk sintesis tersebut. Dengan tesis *perempuan sebagai suatu kelas,* teori itu melihat bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi di kelas manapun. Namun, teori patriarki kapitalis menolak anggapan *perempuan sebagai suatu jenis kelamin* —anggapan dari feminisme radikal— yang menganggap biologi sebagai penentu nasib perempuan. Bagi Eisenstein, ketidakadilan bukan semata-mata akibat dari perbedaan biologis, tetapi lebih disebabkan oleh penilaian dan anggapan (*social construction)* terhadap perbedaan tersebut. Jadi, bagi kelompok feminisme sosialis ini, kritik atas

kapitalisme harus disertai dengan kritik atas penindasan dan pendominasian kaum perempuan.

Dari refleksi singkat di atas, kita melihat betapa kompleksnya perdebatan di seputar masalah perempuan. Perbedaan analisis dan pemahaman atas masalah kaum perempuan tersebut akan berkait erat dengan pendekatan dan teori yang akan digunakan sebagai upaya mengakhiri penindasan dan eksploitasi terhadap kaum perempuan. Namun, persoalan menjadi lebih rumit ketika salah satu dari pandangan feminisme, yaitu pandangan feminisme liberal, mendominasi pemikiran pembangunan tentang kaum perempuan.

Manifestasi Gender dalam Posisi Kaum Perempuan

Dari uraian dan analisis pada bagian-bagian sebelumnya, kita juga telah menyadari bahwa perbedaan gender (*gender differences*) telah melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Setelah kita telaah secara mendalam, perbedaan gender ini ternyata telah mengakibatkan lahirnya sifat dan stereotipe yang oleh masyarakat dianggap sebagai ketentuan kodrati atau bahkan ketentuan Tuhan. Sifat dan stereotipe yang sebetulnya merupakan konstruksi ataupun rekayasa sosial dan akhirnya terkukuhkan menjadi *kodrat kultural*, dalam proses yang panjang akhirnya telah

mengakibatkan terkondisikannya beberapa posisi perempuan, antara lain:

1. Perbedaan dan pembagian gender yang mengakibatkan, termanifestasi dalam, posisi *subordinasi* kaum perempuan di hadapan laki-laki. Subordinasi di sini berkaitan dengan politik terutama menyangkut soal proses pengambilan keputusan dan pengendalian kekuasaan. Meskipun jumlahnya 50% dari penduduk bumi, namun posisi kaum perempuan ditentukan dan dipimpin oleh kaum laki-laki. Subordinasi tersebut tidak saja secara khusus terdapat dalam birokrasi pemerintahan, masyarakat maupun di masing-masing rumah tangga, tetapi juga secara global. Banyak sekali contoh kasus, baik dalam tradisi, tafsir keagamaan, maupun dalam aturan birokrasi di mana kaum perempuan diletakkan dalam posisi yang lebih rendah dari kaum laki-laki. Misalnya, persyaratan bagi perempuan yang hendak menunaikan tugas belajar ke luar negeri ia harus mendapat izin dari suami, sebaliknya suami tidak perlu persyaratan izin dari istri.
2. Dalam sektor ekonomi, perbedaan dan pembagian gender juga melahirkan proses *marginalisasi* perempuan. Proses marginalisasi perempuan terjadi dalam kultur, birokrasi maupun program-program pembangunan. Misalnya dalam program pertanian yang

dikenal dengan Revolusi Hijau, kaum perempuan secara sistematis disingkirkan dan dimiskinkan. Penggantian bibit pertanian jenis unggul terpaksa mengganti *ani-ani* dengan sabit, artinya menggusur banyak sekali pekerjaan kaum perempuan di komunitas agraris terutama di pedesaan. Dengan hanya mengakui laki-laki sebagai "kepala rumah tangga", program industrialisasi pertanian secara sistematis menghalangi dan tidak memberi ruang bagi kaum perempuan untuk mendapatkan pelatihan dalam bidang pertanian ataupun akses kredit. Perlakuan semacam itu secara tidak terasa menggusur keberadaan kaum perempuan ke garis marginal. Di sektor lain juga terjadi banyak sekali jenis aktivitas kaum perempuan yang selalu dianggap tidak produktif (dianggap bernilai rendah), sehingga mendapat imbalan ekonomis lebih rendah.

3. Perbedaan dan pembagian gender juga membentuk penandaan atau stereotipe terhadap kaum perempuan yang berakibat pada penindasan terhadap mereka. Stereotipe merupakan satu bentuk penindasan ideologi dan kultural, yakni pemberian *label* yang memojokkan kaum perempuan sehingga berakibat kepada *posisi* dan *kondisi* kaum perempuan. Misalnya stereotipe kaum

perempuan sebagai "ibu rumah tangga" sangat merugikan mereka. Akibatnya jika mereka hendak aktif dalam kegiatan yang dianggapnya sebagai bidang kegiatan laki-laki seperti kegiatan politik, bisnis ataupun di pemerintahan, maka dianggap bertentangan atau tidak sesuai dengan kodrat perempuan. Sementara stereotipe laki-laki sebagai "pencari nafkah" mengakibatkan apa saja yang dihasilkan oleh kaum perempuan dianggap sebagai "sambilan atau tambahan" dan cenderung tidak dihitung, tidak dianggap atau tidak dihargai.

4. Perbedaan dan pembagian gender juga membuat kaum perempuan bekerja lebih keras dengan memeras keringat jauh lebih panjang (*double-burden*). Pada umumnya, jika dicermati, di suatu rumah tangga ada beberapa jenis pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki dan beberapa yang dilakukan oleh perempuan. Pada kenyataannya, dalam banyak observasi yang dilakukan, menunjukkan bahwa hampir 90% pekerjaan domestik dikerjakan oleh perempuan. Terlebih-lebih bagi mereka yang bekerja (umpamanya buruh industri atau profesi lainnya), artinya mereka memiliki peran ganda (beban kerja ganda di rumah dan di luar rumah).

5. Perbedaan gender tersebut juga melahirkan kekerasan dan penyiksaan (*violence*) terhadap kaum perempuan, baik secara fisik maupun secara mental. Keberagaman bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan terjadi karena perbedaan gender muncul dalam berbagai bentuk. Diantaranya yang bersifat fisik seperti pemerkosaan, persetubuhan antaranggota keluarga (*incest*), pemukulan dan penyiksaan, bahkan yang lebih sadis lagi pemotongan alat genital perempuan dan lain sebagainya. Kekerasan dalam bentuk nonfisik, yang sering terjadi misalnya pelecehan seksual, menyebabkan ketidaknyamanan bagi perempuan secara emosional.
6. Perbedaan dan pembagian gender dengan segenap manifestasinya di atas, mengakibatkan tersosialisasinya citra posisi, kodrat dan penerimaan nasib perempuan yang ada. Dengan kata lain segenap manifestasi ketidakadilan gender itu sendiri juga merupakan proses penjinakkan (*cooptation*) peran gender perempuan, sehingga kaum perempuan sendiri juga menganggap bahwa kondisi dan posisi yang ada seperti sekarang ini sebagai sesuatu yang normal dan kodrati. Jadi, keseluruhan manifestasi tersebut ternyata saling berkait dan saling tergantung serta saling

menguatkan satu sama yang lain.

Pelanggengan posisi *subordinasi, stereotipe,* dan *kekerasan* terhadap kaum perempuan ini secara tidak sadar juga dijalankan oleh ideologi dan kultur *patriarki,* yakni ideologi kelelakian. Ideologi ini ada di kepala kaum laki-laki maupun perempuan, juga dalam tafsir agama yang sangat memengaruhi kebijakan negara dan birokrasi pembangunan.

Beberapa hal bisa disimpulkan dari refleksi ini, pertama bahwa memperjuangkan perempuan tidak sama dengan perjuangan perempuan melawan laki-laki. Persoalan penindasan terhadap perempuan bukanlah persoalan kaum laki-laki, melainkan persoalan sistem dan struktur ketidakadilan masyarakat dan ketidakadilan gender adalah salah satunya. Gerakan kaum perempuan adalah gerakan transformasi dan bukan gerakan untuk membalas dendam kepada laki-laki. Jika demikian, gerakan transformasi perempuan adalah suatu proses gerakan untuk menciptakan hubungan antara sesama manusia yang secara fundamental lebih baik dan baru. Hubungan ini meliputi hubungan ekonomi, politik, kultural, ideologi, lingkungan dan termasuk di dalamnya hubungan antara laki-laki dan perempuan. Untuk itu ada beberapa agenda guna mengakhiri sistem yang tidak adil ini:

1. Melawan *hegemoni* yang merendahkan perempuan, dengan cara melakukan *dekonstruksi ideologi*. Melakukan dekonstruksi artinya mempertanyakan kembali segala sesuatu yang menyangkut nasib perempuan di mana saja, pada tingkat dan dalam bentuk apa saja. Pertanyaan tersebut dapat dimulai dari kasus yang sifatnya makro, seperti *Women In Development* (WID), sampai kasus-kasus yang dianggap kecil yakni pembagian peran gender di rumah tangga.
   Bisa juga melakukan pendidikan yang sifatnya pendidikan kritis (*critical education*) atau kegiatan apa saja yang akan membantu perempuan memahami pengalamannya dan menolak ideologi dan norma yang dipaksakan kepada mereka (Weiler, 1988). Tujuan upaya tersebut adalah membangkitkan kesadaran kritis gender (*gender critical consciousness*) yakni kesadaran akan ideologi hegemoni dominan dan kaitannya dengan penindasan gender. Maka, tugas utama yang harus dilakukan adalah membentuk visi yang berakar pada sistem modernisasi, *developmentalism* dan kapitalisme. Melalui pendidikan kritis, akan lahir gagasan dan nilai baru yang menjadi dasar bagi transformasi gender.
2. Melawan paradigma *developmentalism* yang berasumsi bahwa keterbelakangan kaum

perempuan disebabkan karena mereka tidak berpartisipasi dalam pembangunan. Karena perempuan dianggap tidak mampu memecahkan masalahnya sendiri, maka program perlu didesain oleh perencana ahli yang kemudian dikirimkan kepada mereka. Perempuan dianggap sebagai obyek pembangunan, yakni diidentifikasi, diukur, dan diprogramkan. Perempuan juga dianggap sebagai obyek pengembangan pengetahuan mereka. Karena "*knowledge is power*", maka riset terhadap perempuan adalah juga proses dominasi. Tujuan riset mereka adalah untuk memahami perempuan, agar dapat melakukan prediksi perilaku perempuan dalam rangka merekayasa peranannya dalam pembangunan. Dengan demikian perjuangan perempuan termasuk senantiasa mempertanyakan dominasi elit yang menggunakan pengetahuan dan *diskursus pembangunan* dari *hegemoni kapitalisme dan modernisasi.*

Ketidakadilan Gender Harus Dihentikan

Memperjuangkan keadilan gender merupakan tugas berat, karena masalah gender adalah masalah yang sangat intens, di mana kita masing-masing terlibat secara emosional. Banyak terjadi perlawanan manakala perjuangan ketidakadilan gender diaktifkan, karena menggugat masalah gender

sesungguhnya juga berarti menggugat *privilege* yang kita dapatkan dari adanya ketidakadilan gender. Persoalannya, spektrum ketidakadilan gender sangat luas, mulai yang ada di kepala dan di dalam keyakinan kita masing-masing, sampai urusan negara.

Dengan demikian bila kita memikirkan jalan ke luar, pemecahan masalah gender perlu dilakukan secara serempak. Pertama-tama perlu upaya-upaya bersifat jangka pendek yang dapat memecahkan masalah-masalah praktis ketidakadilan tersebut. Sedangkan langkah berikutnya adalah usaha jangka panjang untuk memikirkan bagaimana menemukan cara strategis dalam rangka memerangi ketidakadilan.

Dari segi pemecahan praktis jangka pendek, dapat dilakukan upaya-upaya program aksi yang melibatkan perempuan agar mereka mampu membatasi masalahnya sendiri. Misalnya dalam hal mengatasi masalah marginalisasi perempuan di berbagai proyek peningkatan pendapatan kaum perempuan, perlu melibatkan kaum perempuan dalam program pengembangan masyarakat, serta berbagai kegiatan yang memungkinkan kaum perempuan terlibat dan menjalankan kekuasaan di sektor publik.

Akan halnya yang menyangkut subordinasi perempuan, perlu diupayakan pelaksanaan

pendidikan dan mengaktifkan berbagai organisasi atau kelompok perempuan untuk jangka pendek.

Untuk menghentikan masalah kekerasan, pelecehan dan berbagai stereotipe terhadap kaum perempuan, suatu aksi jangka pendek juga perlu mulai digalakkan. Kaum perempuan sendiri harus mulai memberikan pesan penolakan secara tegas kepada mereka yang melakukan kekerasan dan pelecehan agar tindakan kekerasan dan pelecahan tersebut terhenti. Membiarkan dan menganggap biasa terhadap kekerasan dan pelecehan berarti mengajarkan dan bahkan mendorong para pelaku untuk melanggengkannya. Pelaku penyiksaan, pemerkosaan dan pelecehan seringkali salah kaprah bahwa ketidaktegasan penolakan dianggapnya karena diam-diam perempuan juga menyukainya. Perlu kiranya dikembangkan kelompok perempuan yang memungkinkan mereka saling membahas dan saling membagi rasa pengalaman untuk berperan menghadapi masalah kekerasan dan pelecehan. Karena kekerasaan, pemerkosaan, pelecehan, dan segala bentuk yang merendahkan kaum perempuan bukan semata-mata salah kaum perempuan, maka usaha untuk menghentikan secara bersama perlu digalakkan.

Termasuk ke dalam kegiatan praktis jangka

pendek adalah mempelajari berbagai teknik oleh kaum perempuan sendiri guna menghentikan kekerasan, pemerkosaan dan pelecehan. Misalnya mulai membiasakan diri mencatat setiap kejadian dalam buku harian, termasuk sikap penolakan dan responsi yang diterima, secara jelas kapan dan di mana. Catatan ini kelak akan berguna jika peristiwa tersebut ingin diproses secara hukum. Usaha seperti menyuarakan *uneg-uneg* ke kolom "surat pembaca" perlu diintensifkan. Usaha ini tidak saja memiliki dimensi praktis jangka pendek tetapi juga sebagai upaya pendidikan dengan cara kampanye antikekerasan dan antipelecehan terhadap kaum perempuan bagi masyarakat luas. Secara praktis dalam surat-surat itu harus tersirat semacam ancaman, yakni jika pelecehan dan kekerasan tidak segera dihentikan, maka kejahatan semacam itu bisa dan akan dilaporkan ke penguasa pada tingkatan yang lebih atas. Kesankan bahwa anda tidak sendiri melainkan suatu kelompok perempuan yang tengah menyadari hal itu. Suatu kelompok atau organisasi lebih sulit diintimidasi ketimbang individu.

Usaha perjuangan strategis jangka panjang perlu dilakukan untuk memperkokoh usaha praktis tersebut. Mengingat usaha-usaha praktis di atas sering kali justru berhenti dan tidak berdaya hasil karena hambatan ideologis,

misalnya bias gender, sehingga sistem masyarakat justru akan menyalahkan korbannya, maka perjuangan strategis ini meliputi berbagai peperangan ideologis di masyarakat. Bentuk-bentuk peperangan tersebut misalnya dengan melancarkan kampanye kesadaran kritis dan pendidikan umum masyarakat untuk menghentikan berbagai bentuk ketidakadilan gender. Upaya strategis itu perlu dilakukan dengan berbagai langkah pendukung, seperti melakukan studi tentang berbagai bentuk ketidakadilan gender dan manifestasinya baik di masyarakat, negara maupun dalam rumah tangga. Bahan kajian ini selanjutnya dapat dipakai untuk melakukan advokasi guna mencapai perubahan kebijakan, hukum dan aturan pemerintah yang dinilai tidak adil terhadap kaum perempuan.

Agenda Mendesak

Feminisme sebagai gerakan sosial dalam dua dasawarsa terakhir telah menunjukkan dampaknya yang secara kuantitatif terhitung spektakuler. Secara kuantitatif dan praktis dampak tersebut terlihat dalam dua puluh tahun terakhir dengan terjadinya perubahan yang menyangkut nasib kaum perempuan secara global. Misalnya saja dari aspek politik, kaum perempuan secara global saat ini telah memiliki hak untuk memilih. Secara kualitatif mereka belum memberi dampak yang terlalu besar,

terutama dalam hal memainkan peran sebagai penentu kebijakan politik dan ekonomi, karena peran kaum perempuan memang belum banyak berubah dan masih dalam posisi minoritas. Misalnya saja sampai pada tahun 1990an hanya enam negara di dunia ini yang pemimpinnya adalah perempuan. Dari 93 negara di seluruh dunia, hanya 3,5% dari menteri-menteri kabinetnya yang dijabat oleh kaum perempuan. Bahkan hanya 10% posisi senior di PBB yang dijabat kaum perempuan.

Dari aspek pendidikan, prestasi kaum perempuan dalam mengejar ketertinggalan mereka dari pendidikan kaum laki-laki justru jauh lebih mengesankan. Jumlah kaum perempuan buta huruf dalam dasawarsa terakhir menurun secara drastis dibanding kaum laki-laki. Dari segi kesehatan, kondisi mereka juga mengalami perbaikan luar biasa. Jumlah kaum perempuan yang melahirkan secara global mengalami penurunan, dari 2,6% pada tahun 1970, turun hanya 1,8 pada tahun 1990. Demikian halnya penggunaan kontrasepsi secara global juga naik dari 15% ke 33% tahun 1980an. Secara ekonomi, peran kaum perempuan juga melonjak dengan pesat. Perjuangan mereka dalam mengesahkan *Anti-discrimination Law* secara global telah membawa dampak luas terhadap kesempatan kerja kaum perempuan. Jika dulu hanya kaum laki-laki

yang mendominasi lapangan pekerjaan karena dianggap produktif, namun saat ini jam kerja kaum perempuan dan laki-laki secara global tidak menunjukkan perbedaan signifikan.

Prestasi gerakan feminisme yang terbesar sesungguhnya justru dalam membawa isu perempuan menjadi isu dominan. Saat ini hampir seluruh organisasi internasional baik yang berada di bawah pemerintah seperti USAID, CIDA, ODA dan lain-lain, maupun international NGOs seperti OXFAM, Save the Children, NOVIB, dan ratusan lainnya, meletakkan agenda dan ide gender dalam kegiatan mereka. Bahkan PBB di tahun 70an telah meletakkan kaum perempuan sebagai agenda global, yakni dengan menetapkan Dekade Perempuan PBB. Akibat dari itu, hampir semua negara di Dunia ketiga kemudian juga membuat agenda dan direalisasikan dalam kabinet mereka dengan membentuk kementerian *urusan wanita* ataupun *peranan wanita* dalam pembangunan. Seluruh usaha tersebut mencapai puncaknya dengan diselenggarakannya konferensi internasional tentang perempuan di Beijing pada akhir tahun 1995.

Namun demikian, pertanyaannya adalah apakah perubahan kuantitatif tersebut yakni perubahan yang hanya menyentuh dan menyangkut persoalan-persoalan praktis kaum perempuan (*women condition*) cukup untuk

mengubah posisi kaum perempuan (*women position*)? Dalam aspek yang lebih strategis, jangka panjang, sesungguhnya perjuangan emansipasi kaum perempuan barulah dimulai. Masih diperlukan upaya yang lebih strategis yang menyangkut perubahan asumsi, konsepsi, keyakinan dan persepsi masyarakat tentang kaum perempuan. Usaha menggeser asumsi ini pada dasarnya merupakan usaha dan perjuangan jangka panjang karena menyangkut perjuangan dalam aspek ideologi. Untuk menuju gerakan yang lebih strategis, feminisme masih membutuhkan berbagai rumusan dan memahami tantangan-tantangannya.

Gerakan Feminisme di Indonesia: Tantangan dan Strategi Mendatang

Secara kasar kita bisa mengamati tahapan-tahapan dari perjuangan isu perempuan dan isu ketidakadilan gender oleh gerakan feminisme di Indonesia. Meskipun gerakan feminisme sudah terdengar sejak awal tahun 60an namun baru menjadi isu dalam kaitannya dengan pembangunan pada tahun 70an oleh sejumlah aktivis LSM. Secara sederhana dapat dibagi dalam tiga dasawarsa tahapan. Dasawarsa pertama adalah tahapan "pelecehan". Selama tahun 1975-1985 hampir semua aktivis LSM menganggap masalah gender bukan menjadi masalah penting, bahkan banyak yang melakukan pelecehan. Umumnya mereka tidak

menggunakan analisis gender, sehingga reaksi terhadap masalah itu sendiri sering menimbulkan konflik antaraktivis perempuan dan lainnya. Perlawanan terhadap masalah perempuan di kalangan aktivis mengambil bentuk bermacam-macam. Umumnya bentuk perlawanannya adalah dengan penjinakan demi kelancaran proyek dari agenda utama program organisasi yang bersangkutan.

Periode dasawarsa kedua adalah 1985-1995. Dasawarsa tersebut pada dasarnya merupakan dasawarsa pengenalan dan pemahaman dasar tentang apa yang dimaksud analisis gender dan mengapa gender menjadi masalah pembangunan. Banyak orang menganggap bahwa masa pengenalan analisis gender tersebut erat kaitannya dengan kuatnya kebijakan lembaga-lembaga donor tentang masalah tersebut. Sehingga, banyak sekali orang meragukan apakah memang para aktivis LSM menerima isu tersebut dengan kesadaran kritis mereka. Banyak indikasi menunjukkan bahwa penerimaan tersebut lebih merupakan formalitas belaka. Reaksi mereka lebih kepada pendekatan kuantitatif, tanpa analisis yang mendalam. Lambat laun upaya tersebut membawa hasil, di mana isu gender dan isu perempuan tidak lagi dilecehkan, bahkan mulai diminati. Pelatihan yang bertujuan membangkitkan kepekaan gender (*gender sensitivity training*) dilakukan di

mana-mana, dan hal tersebut sangat membantu menjelaskan pengertian isu gender sebenarnya. Berbagai buku yang menjelaskan isu tersebut mulai dikembangkan. Selain itu berbagai LSM mulai membuat program-program percontohan yang dikenal dengan program *Women in Development.* Analisis *gender and development* pada saat yang sama juga mulai dikembangkan. Beberapa LSM juga mulai memakai analisis gender dalam mengembangkan program-programnya.

Berbagai tantangan pada dasawarsa kedua ini muncul dalam berbagai bentuknya. Pertama, tantangan dari pemikiran dan tafsiran keagamaan yang patriarki. Berbagai usaha untuk mendialogkan antara pengikut agama dengan isu gender juga telah sering dilakukan. Berbagai buku karya Riffat Hassan, Fatima Mernisi dan Asghar Ali Engineer menjadi bahan diskusi kalangan Muslim di Indonesia. Yang diperlukan adalah berbagai kajian terhadap ajaran-ajaran agama yang bias gender. Ini berarti perlu suatu pengorganisasian penafsiran kembali ayat-ayat al-Qur'an dan fikih dengan menggunakan perspektif gender. Tantangan lain yang sudah diidentifikasi pada tahap ketiga ini adalah tantangan gerakan kilas balik dari aktivis baik lelaki maupun kaum perempuan sendiri. Ini berarti bahwa masalah ketidakadilan gender telah mencapai puncak dinamikanya, dan selanjutnya mulai dirasakan adanya persoalan

yang ditimbulkan dan harus dihadapi. Salah satu reaksi, bahwa masalah gender dianggap bukan masalah lagi. Nasibnya akan menjadi seperti analisis kelas, diabaikan dan sudah dianggap tidak relevan. Reaksi lainnya, justru penolakan dalam bentuk keinginan untuk kembali seperti sedia kala. Dengan kata lain pada masa ketiga ini diperlukan strategi yang matang, kalau tidak justru akan menghancurkan apa yang telah dibangun selama dua dasawarsa terakhir.

Pada dasawarsa mendatang, dua strategi utama diusulkan, yakni: pertama, mengintegrasikan gender ke dalam seluruh kebijakan dan program berbagai organisasi dan lembaga pendidikan dan, kedua, strategi advokasi. Untuk yang pertama, diperlukan suatu tindakan yang diarahkan menuju terciptanya kebijakan manajemen dan keorganisasian yang memiliki perspektif gender atau *gender policy* bagi setiap organisasi. Ini berarti bahwa upaya-upaya penanganan masalah perempuan harus dikembangkan secara struktural dan sistemik seiring dengan perkembangan kelembagaan setiap organisasi maupun institusi pendidikan. Suatu kebijakan *yang* tegas mulai harus diperkenalkan, misalnya kebijakan *gender staff recruitment* dan *staff development,* perencanaan program yang berwawasan gender, pengembangan kurikulum dan metode

pendidikan, dalam setiap kegiatan evaluasi, dalam kegiatan penelitian dengan mengenalkan *feminist research*, manajemen yang berperspektif gender dan seterusnya.

Sedangkan untuk strategi kedua yakni advokasi, diperlukan suatu pengkajian terhadap letak akar persoalan ketidakadilan gender di negara dan masyarakat. Untuk mempersiapkan perjuangan melalui perubahan hukum dan pelaksanaannya ini perlu dilakukan identifikasi permasalahannya, pertama, apakah letak masalahnya berada dalam substansi hukum (*substance of the law*) yang memuat ketidakadilan gender. Yang dimaksud "substansi hukum" di sini adalah baik hukum yang tertulis seperti perundang-undangan negara maupun tafsiran agama dalam bentuk fikih, ataupun hukum yang tak tertulis seperti hukum adat. Apabila persoalannya di sana, strateginya adalah melakukan advokasi untuk mendesakkan alternatif hukum yang berperspektif keadilan gender. Kedua, jika persoalannya terletak pada kultur hukum (*culture of the law*), artinya kultur masyarakat dalam menaati hukum, maka strategi yang dianggap paling strategis adalah kampanye dan pendidikan massa. Terakhir jika persoalannya terletak pada aparat pelaksana hukum atau struktur hukum (*structure of the law*) maka strategi yang tepat adalah kampanye pendidikan dan penyadaran aparat hukum

tentang masalah ketidakadilan gender tidak sama dengan perjuangan kaum perempuan melawan laki-laki. Karena persoalan penindasan perempuan bukan datang dari laki-laki *an sich,* melainkan persoalan sistem dan struktur ketidakadilan masyarakat dan, salah satunya, ketidakadilan gender.

Gerakan kaum perempuan adalah gerakan transformasi perempuan: yaitu suatu proses gerakan untuk menciptakan hubungan antarsesama manusia yang secara fundamental baru, lebih baik dan lebih adil.

Maka, dengan kata lain, proses transformasi sosial sesungguhnya bisa dinamakan proses demokratisasi. Proses demokratisasi itu merupakan alternatif bagi *developmentalism,* karena pada kenyataannya *developmentalism* merupakan perwujudan sistem yang secara ekonomi sesungguhnya sangat otoriter dan eksploitatif, secara politik sangat represif, dan secara kultural melahirkan dominasi. Jadi, demokratisasi merupakan satu-satunya cara dan proses yang memungkinkan terciptanya ruang kesempatan, wewenang dan memungkinkan rakyat mengelola dirinya sendiri melalui diskusi dan aksi bersama, dengan prinsip persamaan dan keadilan. Demokratisasi akan terjadi jika memang masyarakat sendiri mengidamkan, mencita-citakan, dan memenangkan perjuangannya.

Gerakan transformasi gender lebih merupakan gerakan pembebasan perempuan dan laki-laki dari sistem yang tidak adil. Maka transformasi gender adalah upaya liberasi dari segala bentuk penindasan, baik secara struktural, personal, kelas, warna kulit maupun ekonomi internasional. Dengan demikian sesungguhnya gerakan feminisme bukanlah gerakan semata-mata untuk menyerang laki-laki, tetapi merupakan gerakan perlawanan terhadap sistem yang tidak adil, serta citra patriakal bahwa perempuan itu pasif, tergantung dan inferior. Sehingga, transformasi gender –sebagai jalan menuju transformasi sosial yang lebih luas– harus merupakan proses penghapusan atau penyingkiran segala bentuk ketidakadilan, penindasan, dominasi dan diskriminasi: sebagai hubungan yang saling terkait, yang meliputi hubungan ekonomi, sosial, kultural, ideologi, lingkungan dan termasuk di dalamnya adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan. Jelas sekali, bahwa gerakan transformasi gender mempunyai arah tujuan yang tidak sekadar memperbaiki status perempuan dengan menggunakan ukuran indikator norma laki-laki, melainkan suatu usaha untuk meningkatkan martabat dan kekuatan perempuan. Tentu saja, dalam hal tersebut, sangat dibutuhkan perubahan peran gender, baik perempuan maupun laki-laki.

Kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan internal dalam rangka mengontrol hidup dan kemampuan mendapatkan akses terhadap alokasi sumber-sumber material dan nonmaterial. Dengan demikian transformasi gender menolak integrasi perempuan ke dalam *developmentalism* karena kaum perempuan tidak dapat menetapkan pilihan dan memberikan suara guna mempertahankan kehidupan macam apa yang diidamkannya. ❖

DAFTAR PUSTAKA

Adamson, W.L. 1980. *A Study of Hegemony and Revolution: Antonio Gramsci's Political and Cultural Theory*. Berkeley: University California Press.

Aguilar, D.D. 1988. *The Feminist Challange: Initial Working Principles Toward Reconceptualizing the Feminist Movement in the Philippines*. Manila: The Asian Social Institute.

Althusser, L., "Ideology and Ideological State Apparatus". Dalam Althusser, L. 1984. *Essay on Ideology*. London: Verso.

_____. 1970. *Reading Capital,* diterjemahkan oleh Ben Brewser. London: New Left Books.

Amin, Samir. 1976. *Unequal Development*. New York: Monthly Review Press.

Andersen, M.L. 1983. *Thinking about Women, Sociological and Feminist Perspective*. New York: MacMillan Pub. Inc.

Arnold, R., et al. 1991. *Educating For a Change*. Toronto: Between the Lines and Doris

Marshall Institute for Education and Action.

Al-Qur'an, Tafsir Al-Bayaan

Ali. M, Muhammad.1978. *Holy Qur'an.* Terjemahan dalam bahasa Inggris, Lahore.

Asad, Muhammad.1980. *The Mesage of the Qur'an.* Giblartar.

Bhasin, Kamla, dan Khan, Nighat Said. 1986. *Some Question on Feminism and Its Relevance in South Asia.* New Delhi: Kali For Women.

Bernisnghausten, J., dan Kerstan, Brigitte. 1978. "The Socio-economic of Rural Women: A Case Study from Java." Dalam *The Impact of Pesantren in Education and Community Development.* Jakarta: P3M.

Bocock, *R.* 1986. *Hegemony.* New York: Tavistock Publications.

Boserup, E., 1970. *Women's Role in Economic Development.* London: George Allen and Unwin.

Boulding, Elisa. 1984. *Women in the Twentieth Century World,* New York: Halsted Press.

Brandt, D. et. al. 1989. *Naming the Moment: Political Analysis for Action, Manual for Community Groups.* Toronto: The Jesuit Centre.

Bronner, E. S., dan Kellner, D.M., (Eds.). 1989. *Critical Theory and Society: A Reader*. New York: Routledge.

Budiman, Arief, (Ed.). 1990. *State and Civil Society in Indonesia*. Clyton: Monash paper on Southeast Asia No. 22.

Brittan, A., dan Maynard, M. 1984. *Sexism, Racism and Opression*. Oxford: Basil Blackwell.

Charlton, Sue Ellen. 1984. *Women in Third World Development*. Boulder: Westview Press, Inc.

Clark, Michael. 1983. *Michel Foucaul, An Annotated bibliography: Tool kit for a New Age*. New York: Garland Publishing.

Cooper, B. 1981. *Michel Foucault: An Introduction to the Study of His Thought*. New York: E. Mellen Press.

Cott, Nancy F. 1987. *The Grounding of Modern Feminism*. New Haven and London: Yale University Press.

Cousins, M., dan Hussain, A. 1987. *Michel Foucault*. London: McMillan Co.

Davis, M. (ed.). 1983. *Third World, Second Sex: Women's Struggle and National Liberation*, London: Zed Press.

DAWN (Development Alternatives with Women for a New Era). 1986. *Development Crisis and Alternative Visions:*

Third World Women Perspectives. Canadian Women Studies, V. 7.

Douthwaite, Richard. 1992. *The Growth Illusion.* Dublin, Ireland: A Resurgence Book.

Davis, Kathy. 1986. *The Gender of Power.* Leiden: Leiden University Press.

Dos Santos, T. 1976. "The Crisis of Development Theory and the Problem of Dependency in Latin America", dalam Henry Bernstein (ed.). *Underdevelopment and Development: The Third World to Day.* Harmondsworth, England: Penguin.

Engels, F. 1970. *The Origin of Family Private Property, and the State.* New York: International Publisher Company.

Engineer, Asghar Ali. 1984. "On Developing Liberation Theology in Islam", dalam *Islam and Revolution.* New Delhi: Ajanta Publication.

Escobar, Arturo. 1985. *Discourse and Power in Development: Michel Foucault and the Relevance in his Work to the Third World.* Alternatives No. X.

Eisenstein, Zillah, (ed). 1974. *Capitalist Patriarchy and the Case for Socialist Feminism.* New York: Monthly Review Press.

Eyerman, R., dan Jamison, Andrew. 1991. *Social Movements: A Cognitive Approach.* University Park: The Pennsylvania State University Press.

Eviota, Uy Elizabeth. 1992. *The Political Economy of Gender*. London: Zed Books Ltd.

Fals Borda, Orlando, dan Rahman, Muhammad Anisur. 1991. *Action and Knowledge*. New York: The Apex Press.

Farganis, James. "A Preface to Critical Theory", dalam *Theory and Society, Renewal and Critique in Social Theory*. Kluwer Academic Publishers. Winter 1975.

Fay, Brian. 1975. *Social Theory and Political Practice*. London: George Allen and Unwin.

Femia, Joseph. "Hegemony and Consciousness in the thought of Antonio Gramsci". *Political Studies*, 23 No. 1. March 1975.

Fernandes, W., dan Tandon, Rajesh, (Ed.). 1981 *Participatory Research and Evaluation: Experiment in research as a process of liberation*. New Delhi: Indian Social institute.

Firestone, S. 1970. *The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution*. New York: William Morrow and Co. Inc.

Folbre, Nancy. 1986. "Cleaning House: New Perspectives on Households and Economic Development", *Journal of Development Economics 22*. North-Holland.

Foucault, M. 1980. *Power/Knowledge: Selected Interviews and other writings*, C., Gordon (ed.), New York: Pantheon.

_____. 1980 a. *The History of Sexuality: An Introduction*, Volume 1, New York: Random House.

Frank, Andre Gunder. 1973. "The Development of Underdevelopment", dalam C. K. Wilbwer (ed.), *The Political Economy of Development and Underdevelopment*. New York: Random House.

Freire, Paulo 1986. *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Preager.

Gendzier, Irene. 1985. *Managing Political Change: Social Scientists and the Third World Boulder*. Colorado: Westview Press.

Gramsci, Antonio. 1971. *Prison Notebooks*. New York: International Publisher.

Habermas, Jurgen. 1972. *Knowledge and Human Interest*, diterjemahkan oleh Jeremy Shapiro. Boston: Beacon Press.

Harding, Susan. 1986. *The Science Question in Feminism*. Ithaca: Cornell University Press.

Heilbroner, R.L. 1985. *The Nature and Logic of Capitalism*. New York: W.W. Norton & Company.

Horkheimer, M. 1972. *Critical Theory*. New York: Herder and Herder.

Hope, Anne, dan Timmel, Sally. 1988. *Training for Transformation*, Vol 1-3. Gweru: Mambo Press.

Inkeles, Charles, dan Smith, David. 1974. *Becoming Modern*. Massachusetts: Harvard University Press.

Jaggar, A. 1977. "Political Philosophies of Women's Liberation" dalam Veterling-Braggin, M., (ed.). *Feminism and Philosophy*. West Hartforth: Kumarian Press.

_____, 1983. *Feminist Politics and Human Nature*. Brighton: Harvester Press.

Kassam, Yusuf, dan Mustafa, Kemal, (eds.). 1982. *Participatory Research: An Emerging Alternative Methodology in Social Science Research*. New Delhi: Society for Participatory Research in Asia.

Khun, Thomas. 1970. *The Structures of Scientific Revolutions*. Chicago: The University of Chicago Press.

Laclau, E., dan Mouffe, C. 1985. *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*. London: Verso Editions.

MacDonald, M, (ed.). 1994. *Gender Planning in Development Agencies: Meeting the Challange*. Oxford: Oxfam Publication.

MacDonell, Diane. 1986. *Theories of Discourse*. New York: Basil Blackwell.

Maguire, Pat. 1987. *Doing Participatory Research: A Feminist approach*. Amherst: Center For

International Education, University of Massachusetts.

_____. 1984. *Women in Development: An Alternative Analysis*. Amherst MA: Center For International Education.

Marcuse, Herbert. 1964. *One-Dimensional Man*. Boston: Beacon Press.

Mbiblinyi, Marjorie. 1984. *Research Priorities in Women's Studies in Eastern Africa*. Women's Studies International Forum, 7 (4), 289-300.

McClelland, David C. 1961. *The Achieving Society*. New York: D.Van Nostrad.

McClelland, David C., dan Winter, D. G. 1969. *Motivating Economic Achievement*. New York: The Free Press.

Mernisi, Fatima, dan Hassan, Riffat. 1995. *Setara Di Hadapan Allah*. Yogyakarta: LSPPA - Yayasan Prakarsa.

Mies, Maria. 1989. *Patriachy and Accumulation on a World Scale: Women in the International Division of Labor*. London: Zed Books Ltd..

Mitchell, J., dan Oakley, Ann. 1985. *What is Feminism*. Bringhamton, New York: Yale University Press.

Mosse, Julia Cleves. 1992. *Half The World, Half a Change: An Introduction to Gender and Development*. Oxford: Oxfam.

Myrdal, Gunnar.1969. *Objectivity in Social Research*. Middletown, Connecticut: Wesleyan University Press.

Mueller, A. 1987. *Peasants and Professionals: The Production of Knowledge about in the Third World*. Sebuah paper yang dipresentasikan dalam Pertemuan tentang The Association for Women in Development. Washington D.C. April 1987.

Nicholson, L., (ed.). 1990. *Feminism/ Postmodernism*. New York: Routledge.

Ng, Cecilia, dan Young, Carol. *Malaysian Women at the Crossroads*. CHANGE International Reports, No. 17. London.

O'Connell, H., (ed.). 1994. *Women and Conflict*. Ox ford: Oxfam.

Reardon, G. 1994. *Women and the Environment*. *Ox*ford: Oxfam.

Resnick, S., dan Wolf, Richard D. 1987. *Knowledge and Class: A Marxian Critique of Political Economy*. Chicago: Chicago University Press.

Robert, Helen., (ed.). 1981. *Doing Feminist Research*. London: Routledge and Kegan Paul.

Rogers, Barbara. 1979. *The Domestication of Women: Discrimination in Developing Society*. New York: St. Martins Press.

Rostow, W. W. 1960. *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto.* New York: Cambridge University Press.

_____. 1964. *The Stage of Economic Growth.* Cambridge: Cambridge University Press.

Sacks, K. 1979. *Sister and Wives: The Past and the Future of Sexual Inequality*. Westport CT: Greenwood Press.

_____. 1975. "Engels revisited: Women, the Organisation of Production and Private Property", dalam Reiter, (ed.). *Toward an Anthropology of Women*. New York: Monthly Review.

Sachs, Wolfgang, (ed.). 1992. *The Development Dictionary: A guide to Knowledge as Power*. London: Zed Books.

Schroyer, Trent. 1973. *The Critique of Domination: The Origins and Development of Critical Theory*. Boston: Beacon Press.

Shiva, Vandana. 1986. "Ecology Movements in India". *Alternatives*, Vol. 11, No. 2.

_____.1989. *Staying Alive*. London: Zed Book.

Stamp, P.1989. *Technology, Gender, and Power in Africa*. Ottawa: IDRC.

Staudt, K. 1985. *Women, Foreign Assistance, and Advocacy Administration*. New York: Preager Publisher Inc.

Sweetman, C., dan De Selincourt, Kate. 1994. *Population and Reproductive Rights*. Oxford: Oxfam.

Tong, Rosemaries. 1989. *Feminist Thought*. Boulder and San Fransisco: Westview Press.

Wallace, Tina, dan March, Candida. 1991. *Changing Perceptions: Writing on Gender and Development*. Oxford: Oxfam.

Walker, B., (ed.). 1994. *Women and Emergencies*. Oxford: Oxfam.

William, S., Seed, Janet, dan Mwau, Adelina. 1994. *The Oxfam Gender Training Manual*. Oxford: Oxfam Publication.

Indeks

A

Akumulasi kapital *lihat juga* pembangunan 47, 92, 93
Al-Qur'an 135, 136, 138, 140, 142-144, 147, 169
Althusser, Louis xi, 5, 38
Analisis kelas xii, 4, 55, 95, 102, 110, 170
Analisis kritis 4, 5, 26

B

Bakar, Abu 140
Bank Dunia 52, 67
Baran, Paul 39
Black feminism 100
Boserup, Ester 64, 65, 66

C

Caplan, Patricia 75
Chodorow, Nancy 98, 99
Cina 17
Comte, Auguste 31

D

Developmentalism 36, 42, 44, 47, 49, 54, 61-65, 68-70, 72, 105, 116, 117, 124, 125, 130, 159, 172
Dialectics 36
Diskriminasi 78, 87, 89, 113, 123, 173
Diskriminasi Gender 15, 77, 112, 113
Diskursus xii, 28, 41, 42, 45, 46, 51, 64, 70, 116
Diskursus pembangunan 26-29, 49, 51, 52, 63, 116, 160
Dominasi 4, 50, 57, 58, 61, 69, 70, 92, 104, 110, 127, 138, 150, 160

E

Eco feminism 82, 100
Eisenstein, Zillah 89, 96, 97, 110, 152
Ekonomi klasik, *lihat juga* Adam Smith 59, 128
Eksploitasi 14, 36, 37, 39, 41, 61, 62, 69, 70, 81, 83, 92, 94, 95, 103-105, 108, 110,

111, 114, 116, 119, 151, 153
Emansipasi perempuan 81, 94, 103, 109, 152
Engels, Friedrich 91, 94, 96, 99, 108
Engineer, Asghar Ali 100, 138, 169
Escobar, Arturo 42, 49, 51
Etika Protestan 33, 34

F

Feminis 95, 96, 97, 108
feminisme liberal 87
feminisme sosialis 97
feminis 4, 63, 65, 81-83, 86, 87, 89, 91, 94-103, 105, 111
Feminisme liberal 87, 101, 106, 153
feminisme liberal 82, 85, 86
feminisme marxis 82, 89-91, 93, 102
feminisme muslim 100
feminisme radikal 82, 87, 89, 90, 97, 101, 152
feminisme sosialis 82, 94, 95, 97, 102, 152
Feminisme xii, xiv, 63, 81-84, 89, 93, 95, 100-105, 110-119, 133, 153, 166, 167, 173
Feminitas 104, 105, 110, 114, 117, 118, 119
Feodal 23, 36, 80, 98, 139
Foucault, Michel 5, 41, 42, 51, 59, 128
Frank, Gunder 39
Freire, Paulo 40, 114
Freud, Sigmund 99
Friedan, Betty 111
Fungsionalisme 32, 34-36, 84, 85, 88

G

Gender 3-18, 23, 26, 27, 55, 57, 70-79, 81, 82, 87, 90, 91, 95, 102, 104, 107, 108, 110, 117, 125, 142, 143, 145, 147, 148, 151, 153-157, 159, 160, 164, 166-174
bias gender 18, 19, 20, 22, 23, 25, 77, 97, 144, 146, 164, 169
identitas gender 99, 100
kekerasan gender 18
ketidakadilan gender 3, 12-14, 24, 26, 27, 30, 61, 76, 80, 95, 97, 134, 138, 146, 148, 153, 157, 158, 160, 164, 167, 169, 171
peran gender 11, 13, 76, 79, 80, 81, 159, 173

perbedaan gender 3, 9, 10, 12, 14, 76, 153, 157
Gramsci, Antonio xi, 4, 38, 57
Gutierrez, Gustavo 40

H

Habibah bin Zaid 139
Harding, Susan 104
Hassan, Riffat 100, 169
Hegel, Friedrich 31, 36
Hegemoni 4, 33, 38, 57, 58, 62, 69, 70, 105, 111, 114, 118, 119, 127, 159, 160
Hirarki seksual 89, 96, 107, 110, 152
Huntington, Samuel P. 33

I

Imperialisme 39
Industri sosial 94, 109, 151
Industrialisasi 54, 68
kelompok industrialis 59
Industrialisasi 88, 94, 106, 125, 152, 155
Inkeles, Alex 34, 46, 48
International Monetary Fund (IMF) 52
investasi ekonomi 43

K

Kapitalisme 34
pascakapitalisme 96, 110
prakapitalisme 91
kapitalisme 4, 5, 37, 39, 45, 48, 55, 59, 60, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 102, 108, 110, 111, 116, 117, 124, 128, 129, 134, 151, 153, 159, 160
Kekerasan terhadap perempuan, *lihat juga* kekerasan gender 19, 20, 79
Keluarga Berencana (KB) 106
Keterbelakangan perempuan 65
Ketidakadilan sosial xi, xii, 3, 7
Ketidakadilan struktural 75, 106
Kodrat 8, 10, 11, 12, 75, 76, 81, 82, 153, 156, 157
Kolonialisme 36, 39
Konstruksi sosial 10, 11, 97

L

Leacock, Eleanor 98
Lenin, V.I. 39
lumpen-bourgeoisie 39

M

Marginalisasi 13-15, 24, 76, 78, 80, 95, 104, 154, 161
Marx, Karl 4, 36, 37, 38, 91, 96, 110
Marxis 40, 90, 94, 98, 107, 110, 150, 151
Marxisme ortodoks determinisme ekonomi, *lihat juga* Gramsci 38
MASKULINITAS 103
Maskulinitas 104, 105
Maskulinitas 104-106, 110, 114, 116, 118, 119
ideologi maskulinitas 90, 105, 108, 113, 115
Mazhab Frankfurt xi, 4, 38
McClelland, David C. 33, 46, 48
McGregor, Douglas 59, 128
Mernisi, Fatima 100, 169
Merton, Robert 32, 84
Modernisasi 29, 32, 33, 35, 38, 43-51, 54, 62, 66, 87, 106, 124, 159, 160
high mass consumption 34, 43
Mueller, Adele 42, 51

N

Nisbet, Robert Alexander 36

O

Oakley, Ann 75
Orde Baru 28, 29
Orde Lama 28
overdeterminism 56, 124

P

Parsons, Talcott 32, 84
Patriarki 89, 93, 95, 96, 101, 107, 110, 111, 134, 138, 150-152, 158, 169
Ideologi Patriarki 87, 106
Pekerjaan domestik 22, 23, 80, 94, 110, 152
Pembangunan iii, xv, 7, 14, 24, 26-36, 38, 40, 42-55, 61-65, 67, 87, 88, 116, 124, 125, 130, 131, 133, 153, 154, 158, 160, 166-168
Perang Dingin 45
Perang Unta 140
Perbedaan biologis 75
perbedaan biologis 97, 152
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 24, 112, 165, 166
Perubahan Sosial 41

Perubahan sosial xiii, 6, 7, 29, 30, 31, 36, 48, 50, 91, 124, 131, 133
Perusahaan multinasional 39, 129
Positivisme xi, 4, 31, 38, 105
Proletarisasi buruh 96, 111

R

Reduksionisme 5, 102, 105, 124
Rekayasa sosial 32, 153
Revolusi Hijau 15, 67-69, 76, 155
Rogers, Barbara 67
Rostow, Walt Whitman 46, 47
Rubin, Gayke 98, 99

S

Saad bin Rabi 139
Sacks, Karen 98
Schultz, Theodore 35
Sheikh Nefzawi 137
Shiva, Vandana 64, 100
Smith, Adam 48, 59, 128
Spencer, Herbert 32
Stereotipe 13, 17, 18, 24, 66, 78, 79, 104, 153, 155, 156, 158, 162
Strauss, Levi 99
struktur kelas 38, 93, 96, 109, 110, 152
Subordinasi 13, 16, 24, 77, 78, 80, 95, 98, 104, 144, 154, 158, 161

T

Taylor, Frederick W. 59, 128
Teknologi pertanian 66, 69
Tenaga buruh cadangan 109
Teologi Pembebasan 41, 62
Tong, Rosemarie 82
Transformasi sosial v, vii, ix, 70, 81, 104, 114, 134, 141, 172, 173
Truman, Harry S. 44, 46

W

Weber, Max 33
Women in Development (WID) 27, 30, 42, 63, 64, 65, 70, 71, 86, 159, 169

Y

Yahudi 17

TENTANG PENULIS

MANSOUR FAKIH (1953–2004), menyelesaikan sarjana teologi di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta tahun 1978, dan meraih Master dan Doktor bidang Pendidikan di University of Massachusetts at Amherst, Massachusetts, USA, pada tahun 1990 dan 1994. Pernah bekerja sebagai tenaga penyuluh lapangan pada program pengembangan industri kecil di LP3ES Jakarta dan Lembaga Studi Pembangunan (LSP). Lantas menjadi koordinator Program Pendidikan dan Pengembangan di Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M). Tahun 1993-1996 menjabat sebagai Country Representative Oxfam-UK/I di Indonesia, serta menjadi anggota Dewan Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Aktifitas lainnya adalah sebagai peneliti, konsultan dan fasilitator pelatihan. Pernah menjadi pengajar di IAIN, almamaternya. Posisi terakhirnya adalah anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM). Bersama

Roem Topatimasang dan Utomo Dananjaya menerjemahkan buku *Pedagogy of Oppressed* (Pendidikan Kaum Tertindas) karya Paulo Freire (LP3ES), dan menyusun berbagai Modul Pendidikan Orang Dewasa seperti *Belajar dari Pengalaman, Biarkan Mereka Bicara, Budaya Bisu,* dll, yang seluruhnya diterbitkan oleh P3M. Lalu bersama Roem Topatimasang dan Toto Rahardjo menulis buku *Pendidikan Popular, Mengubah Kebijakan Publik,* dan beberapa buku karya bersama yang diterbitkan oleh INSISTPress. Buku yang ditulis sendiri adalah *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM di Indonesia, Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi, Jalan Lain: Menifesto Intelektual Organik,* dan *Bebas dari Neoliberalisme.*